



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT  
KOMISI IX DPR RI**

- Tahun Sidang : 2019-2020  
Masa Persidangan : III  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat (RDP) Virtual  
Dengan : 1. Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)  
2. Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan  
3. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan  
Hari, Tanggal : Selasa, 28 April 2020  
Waktu : Pukul 10.00 s.d selesai  
Sifat Rapat : Terbuka  
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. 1  
Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta  
Ketua Rapat : Dra. Sri Rahayu/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI  
Acara : 1. Penjelasan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) mengenai:  
a. Penjelasan terhadap Penilaian Indikator Pencapaian Kinerja (IPK) BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2019;  
b. Penjelasan terhadap Usulan Kebijakan Investasi Dana Jaminan Sosial dan Anggaran Operasional serta Hasil Monitoring dan Evaluasi BPJS Ketenagakerjaan;  
2. Penjelasan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan mengenai:  
a. Hasil Pengawasan terhadap Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan Dana Jaminan Sosial (DJS) dan Kinerja Direksi BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2019;  
b. Penetapan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2020 termasuk Komposisi Program dalam Upaya Peningkatan Kepesertaan, Skema Investasi dan Layanan Manfaat Tambahan;  
c. Perluasan Manfaat dan Layanan Tambahan sebagai Hasil Pengembangan Dana Pekerja melalui Pembelian Investasi BPJS

Ketenagakerjaan khususnya terhadap Pandemi Covid-19;

3. Penjelasan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan mengenai:

- a. Program dan Kegiatan terhadap Pengelolaan dan Pengembangan Dana Jaminan Sosial (DJS) bagi Peserta, terutama Pengadaan Alat-alat Penanganan Covid-19 yang dapat dimanfaatkan dalam Mendeteksi Penyebarannya kepada Pekerja dan Masyarakat;
- b. Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Program Jaminan Hari Tua bagi Pekerja/Buruh yang mengalami Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), Positif Covid-19 dan Meninggal akibat Covid-19;
- c. Program Jaminan Hari Tua dalam Mengatasi Permasalahan Kekurangan Daya Beli Pekerja/Buruh dalam Upaya Mewujudkan Jaminan Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Hidup Layak bagi Peserta dan/atau Anggota Keluarganya sebagaimana Amanat UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS);
- d. Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2020 termasuk Komposisi Program dalam Upaya Peningkatan Kepesertaan, Skema Investasi dan Layanan Manfaat Tambahan bagi Peserta.

Sekretaris Rapat : Yanto Supriyanto, S.H.

Hadir : **A. Anggota DPR RI:**

46 dari 51 orang Anggota dengan rincian:

1. **Fraksi PDI Perjuangan**

1. Dra. ELVA HARTATI, S.I.P., M.M.
2. Dra. SRI RAHAYU
3. TUTI NUSANDARI ROOSDIONO
4. Dr. H. EDY WURYANTO, S.KP., M.Kep.
5. RAHMAD HANDOYO, S.PI., M.M.
6. MUCHAMAD NABIL HAROEN, S.Pd., M.Hum.
7. KRISDAYANTI
8. H. ABIDIN FIKRI, S.H., M.H.
9. I KETUT KARIYASA ADNYANA, S.P.

2. **Fraksi Partai Golongan Karya**

1. EMANUEL MELKIADES LAKA LENA
2. DELA PRATIWI SITEPU, S.H.
3. Drs. H. DARUL SISKI
4. Hj. SANIATUL LATIVA, S.E.
5. Hj. DEWI ASMARA, S.H., M.H.

6. Dra. WENNY HARYANTO, S.H.
7. M. YAHYA ZAINI, S.H.

**3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya**

1. dr. H. SUIR SYAM, M.Kes., MMR.
2. ADE REZKI PRATAMA, S.E., M.M.
3. Ir. H.A.R. SUTAN ADIL HENDRA, M.M.
4. Ir. SRI MELIYANA
5. OBON TABRONI
6. drg. PUTIH SARI
7. Dra. Hj. RUSKATI ALI BAAL

**4. Fraksi Partai Nasionalis Demokrat**

1. FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E.
2. Drs. FADHOLI
3. Hj. SRI WULAN, S.E.
4. RATU NGADU BONU WULLA, S.T.
5. drg. Hj. HASNAH SYAM, MARS.

**5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa**

1. Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A.
2. Hj. NUR NADLIFAH, S.Ag. M.M.
3. ARZETI BILBINA, S.E., M.A.P.
4. Ir. NUR YASIN, M.B.A., M.T.
5. ANGGIA ERMA RINI, M.K.N.
6. H. HARUNA, M.A., M.B.A.

**6. Fraksi Partai Demokrat**

1. Drs. H. ZULFIKAR ACHMAD
2. ANWAR HAFID
3. Hj. ALIYAH MUSTIKA ILHAM, S.E.
4. MUHAMMAD DHEVY BIJAK

**7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera**

1. H. ANSORY SIREGAR
2. Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.
3. Dr. Hj., NETTY PRASETIYANI, M.Si.
4. H. ALIFUDDIN, S.E., M.E.

**8. Fraksi Partai Amanat Nasional**

1. Dr. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag.,  
M.Hum., M.A.
2. Hj. INTAN FAUZI, S.H., LLM.
3. Drs. H. ASHABUL KAHFI, M.Ag.

**9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan**

1. Sy. ANAS TAHIR

**B. Pemerintah**

1. KETUA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL (DJSN)

2. KETUA DEWAN PENGAWAS BPJS  
KETENAGAKERJAAN
3. DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN

**KETUA RAPAT (Dra. SRI RAHAYU):**

*Bismillaahirrahmaanirrahiim,  
Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,  
Selamat pagi menjelang siang.  
Shallom, Om Swastiastu, Namo Budaya, Rahayu.*

Yang terhormat Saudara Ketua Dewan Jaminan Sosial (DJSN) beserta jajaran,  
Yang terhormat Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan beserta jajaran; dan  
Yang terhormat Saudara Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan beserta jajaran,  
Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI,

Marilah kita panjatkan rasa syukur kita ke hadirat *Alloh Subhaanahu Wa Ta'aala*, Tuhan Yang Maha Kasih yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa bersama-sama mengikuti rapat pada hari ini.

Salam sehat untuk semuanya Bapak/Ibu sekalian, baik yang hadir di Komisi IX maupun yang hadir secara virtual, mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan baik secara fisik maupun psikis kita sehingga kita bersama-sama bisa melewati wabah Covid-19 yang kita hadapi bersama-sama. Tetap semangat, *Insyaa Alloh* kita tetap sehat.

Sebelum rapat kita mulai, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak agar perjalanan dalam rapat komisi ini bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai.

**(BERDOA BERSAMA)**

Terima kasih.

Saat ini yang mengikuti rapat baik secara tatap muka maupun virtual jumlah fraksi ada 6 dari 9 fraksi. Mungkin ada yang belum ter-cover, 14 Anggota. Untuk itu secara fraksi kita sudah memenuhi korum, maka rapat secara resmi saya nyatakan kuorum dan tertutup untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 11.16 WIB)**

Bapak/Ibu sekalian yang saya hormati,

Saya ingin minta waktu terlebih dahulu kepada Bapak/Ibu sekalian untuk waktu rapat. Ini sudah kita mulai pada Pukul 11.16 menit. Untuk itu saya minta waktunya terlebih dahulu kepada Bapak/Ibu sekalian, rapat akan kita mulai pada saat ini Pukul 11.17 menit sampai dengan Pukul 13.00. Apakah disetujui dari Bapak/Ibu sekalian waktunya? Nanti apabila memang kurang baru kita sepakati.

Silakan, Bapak/Ibu sekalian, apakah disetujui? Bapak/Ibu Anggota, setuju? Setuju ya.

**(RAPAT: SETUJU)**

Rapat pada hari ini acaranya atau materinya adalah:

1. Penjelasan Ketua DJSN yang terdiri dari:
  - a. Penjelasan terhadap penilaian Indikator Pencapaian Kinerja (IPK) BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2019;
  - b. Penjelasan terhadap usulan kebijakan investasi dana jaminan sosial dan anggaran operasional serta hasil monitoring dan evaluasi BPJS Ketenagakerjaan;
2. Penjelasan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan mengenai:
  - a. Hasil pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan dan pengembangan dana jaminan sosial dan kinerja Direksi BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2019;
  - b. Penetapan Rencana Kerja Anggaran Tahun BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2020, termasuk komposisi program dalam upaya peningkatan kepesertaan, skems investasi, dan layanan manfaat tambahan;
  - c. Perluasan manfaat dan layanan tambahan sebagai hasil pengembangan dana pekerja melalui pembelian investasi BPJS Ketenagakerjaan, khususnya terhadap pandemik Covid-19;
3. Penjelasan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan mengenai:
  - a. Program dan kegiatan terhadap pengelolaan dan pengembangan dana jaminan sosial bagi peserta, terutama pengadaan alat-alat penanganan Covid-19 yang dapat dimanfaatkan dalam mendeteksi penyebaran kepada pekerja dan masyarakat;
  - b. Program jaminan kecelakaan kerja dan program jaminan hari tua bagi pekerja/buruh yang mengalami Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), positif Covid-19, dan meninggal akibat Covid-19;
  - c. Program jaminan hari tua dalam mengatasi permasalahan kekurangan daya beli pekerja/buruh dalam upaya mewujudkan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup layak bagi peserta dan/atau anggota keluarganya sebagai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS);
  - d. Rencana Kerja Anggaran Tahunan BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2020, termasuk komposisi program dalam upaya peningkatan kepesertaan, skema investasi, dan layanan manfaat tambahan bagi peserta.

Untuk itu selanjutnya kepada Dewan Jaminan Sosial dulu, kemudian Ketua Dewan Pengawas, dan Saudara Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, nanti untuk menyampaikan paparan masing-masing. Kita berikan waktu 15 sampai 20 menit. Kalau memang terpaksa nanti kami persilakan.

Untuk itu kami persilakan terlebih dahulu kepada Saudara Dewan Jaminan Sosial untuk menyampaikan paparannya.

**KETUA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL/DJSN (T.B ACHMAD CHOESNI):**

Terima kasih Ibu Pimpinan.  
*Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,*

Ibu Pimpinan/Ibu Sri, Pimpinan dan Anggota yang hadir disini maupun yang hadir *virtually*,

Terima kasih atas kesempatannya, kami akan singkat saja.

Ini cuma mau info ke Bapak/Ibu, yang paling besar kalau kita lihat dari 34 provinsi itu sebagian besar itu kepesertaan hanya DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten. Khususnya memang DKI Jakarta. Tapi walaupun demikian memang ada beberapa yang kita harus lihat, nanti kami bahas di pembahasan perlunya data yang lain.

Ini data yang kita dapatkan dari laporan BPJS Ketenagakerjaan juga, memang terjadi penurunan kepesertaan bulan Januari dan Maret tahun ini. Jumlah peserta per Maret 2020 sebesar 61,6 juta. Tapi yang non aktif itu hampir 48 persen.

Jumlah yang menarik adalah JHT, karena dari jumlah yang kita catat itu yang tidak aktif/yang non aktif itu malah 1,87 kali dibandingkan peserta aktif. Dan juga kalau JP kita catat hampir sekitar sepertiganya itu non aktif.

Kalau kita lihat datanya dari laporan, kita mendapatkan data itu sekitar 61,6 juta seperti yang saya katakan tadi. Yang aktif terdiri tidak mencapai 52 persen, bahkan yang PBPU hanya 8 persen yang peserta aktif. Yang tidak aktif 48 persen, terdiri dari jaminan hari tua dan jaminan pensiun.

Peserta Bukan Penerima Upah per Maret masih relative kecil, padahal yang kita tahu semuanya ini yang paling rentan terhadap guncangan ekonomi akibat pandemik Covid-19 yang kita harus hadapi.

Satu yang saya nanti juga akan minta arahan dari Bapak/Ibu, ini isunya adalah ada data-data yang kita curigai mungkin memang harus diperbaiki. Kita sudah diskusi dengan Pak Dewas dan pihak Direksi juga.

Kalau kita lihat pembayaran klaim jaminan sosial bidang ketenagakerjaan tahun 2016 sampai 2019, memang yang jauh lebih besar itu adalah JHT. JHT itu bisa sampai 71 triliun, sampai 32 triliun tahun 2019 ini. Sedangkan yang lain *relatively*, bahkan tidak sampai 1 triliun. Kecuali JKK tahun 2019 1 setengah triliun.

Pembayaran seperti yang kami laporkan tadi, pembayaran meningkat untuk semua program selama periode Januari-Maret 2020. Yang pembayaran klaim 11,24 triliun di bulan Maret, kami estimasi dapat berdampak pada penggerusan penurunan asset dana jaminan sosial. Dan JHT juga meningkat sangat tajam, mencapai 6 setengah triliun di bulan Maret 2020. Memang ini JHT jadi perhatian yang kami pastikan supaya kita kaji secara hati-hati.

Kalau kita melihat sebaran pembayaran JHT per provinsi, seperti yang kita duga memang ini didominasi oleh 4 provinsi, ada Jakarta yang pasti, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Jadi yang kalau keempat terbesar adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Ini yang kita juga catat tahun 2019 dari laporan BPJS yang belum di audit. Hasil evaluasi per Maret 2020 total dana hasil investasi dan dana jaminan sosial ketenagakerjaan masih di bawah yang ditargetkan di RKAT 2019.

Pengelolaan dana jaminan sosial mengacu pada beberapa PP, PP 99/2013, yang merupakan perubahan dari PP 55 ya. Terbalik ya, PP 99 Tahun 2015? 2013. JO PP 55, maaf Bapak/Ibu, tahun 2015. Yang kita catat adalah tahun 2019 masih 97,4 persen dari RKAT 2019, sementara hasil investasinya itu hampir mencapai 81 persen dari RKAT 2019.

Selanjutnya, ini total aset dan liabilitasnya yang ada, datanya ada semuanya.

Selanjutnya, ini yang kita laporkan tentang *performance indicator* BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2020 tentang tata kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Jadi ini mencakup dua badan, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Pada Pasal 26 ayat (1) diatur dalam rangka penilaian capaian kinerja menteri, dalam hal ini Keuangan, melakukan *review* dan pembahasan atas laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan yang disampaikan oleh BPJS. Dan pada ayat (2)-nya pada pasal yang sama, dalam melakukan *review* tersebut menteri berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan untuk BPJS Kesehatan, Menteri Ketenagakerjaan untuk BPJS Ketenagakerjaan, dan Ketua DJSN untuk kedua-duanya.

Yang pernah kita lakukan, Ibu/Bapak Anggota Komisi IX yang terhormat, penilaian kinerja itu baru sampai 2018. Jadi 2018-2019 masih dalam proses penelaahan, karena masih ada beberapa angka capaian realisasi yang sedang kita diskusikan dengan Dewan Pengawas. Tapi yang kita hasilkan tahun 2014 itu sehat sekali, nilainya lebih dari 100 persen, 2015 sehat, 2016 kembali sehat sekali, 2017 sehat. Dan yang seperti saya katakan, 2018-2019 masih dalam proses, karena kami harus mengkaji ada beberapa angka yang agak berbeda.

Kalau tentang RKAT memang DJSN ikut serta dalam pembahasan dana operasional tahun 2020. Namun saat ini kita belum menerima dokumen RKAT yang resmi. Waktu kita melaksanakan diskusi, Permenkeu yang terkait dengan ini sudah ada PMK02/2019, itu ditentukan presentase dana operasional yang diambil dari DJS adalah 1,22 dari JKK, juga dari JKN, tapi 4 persen dari JHT dan JP, dan 5 persen dari dana hasil pengembangan JHT setelah dikurangi beban pengembangan. Demikian juga dengan JP. Besaran nominal dana operasional sekitar hampir 5,3 triliun, dan ini kita diskusikan dengan pihak-pihak terkait, termasuk Menkeu.

Ini yang Ibu dan Bapak-bapak juga melihat ada beberapa konsern, khususnya dalam pandemic Covid-19 ini. Jika pemberi kerja telah menetapkan *work from home*, dan pekerja telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, maka kami berpendapat penjaminan resiko kecelakaan setelah selama *work from home* ini termasuk dalam perlindungan JKM dan JKK. BPJS Jamsostek memberikan perlindungan khusus bagi para tenaga medis non ASN yang telah menjadi peserta dan bekerja di rumah sakit yang telah ditunjuk pemerintah. Jika berakibat kematian/meninggal dunia, cacat tetap, maka ahli waris akan mendapatkan santunan JKK. Jadi teman-teman tenaga kesehatan (*nakes*) yang bekerja jika mereka menjadi peserta akan di *cover* dari JKK juga. Untuk biaya perawatan/pengobatan tenaga medis tersebut akibat Covid-19 dibebankan kepada anggaran pemerintah seperti yang dikeluarkan oleh Permenkes. Karena memang pandemic itu tidak dibebankan kepada asuransi tenaga kerja maupun kesehatan.



Selanjutnya yang saya mau katakan ada beberapa yang penting. Data kita sudah mengkoordinasikan beberapa. Data saya kira masih menjadi masalah. Jadi yang kami takutkan adalah akan ada beberapa isu yang nanti terjadi kedepan, jadi kami bekerjasama dengan Dewas dan Direksi akan melihat data dengan baik juga.

Yang kita lihat memang dengan adanya covid ini dampak yang kita suda lihat adalah kepesertaannya menurun, keaktifan kepesertaan menurun, iuran yang diterima juga menurun. Seperti yang saya perlihatkan tadi pembayaran klaim meningkat, dan hasil investasi dana jaminan tidak terlalu mencapai target. Tapi yang pasti saya pikir ini adalah saat yang baik untuk kita memperbaiki BPJS Ketenagakerjaan secara sistemik untuk memastikan keberlangsungan dari program ini.

Demikian, Ibu Pimpinan, Bapak/Ibu Anggota Dewan yang terhormat.

*Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumsalam.*

Terima kasih Pak Ketua paparannya.

Selanjutnya saya persilakan kepada Dewan Pengawas, silakan.

**KETUA DEWAN PENGAWAS BPJS KETENAGAKERJAAN (GUNTUR WITJAKSONO):**

*Bismillaahirrahmaanirrahiim,  
Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,  
Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.*

Yang terhormat Pimpinan Komisi IX DPR RI dan Anggota,  
Ketua DJSN, jajaran Direksi dan Anggota Dewas yang hadir,

Kami akan mempresentasikan apa yang dijadikan isu. Ada 3 (tiga) isu, yang pertama mengenai hasil pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan dan pengembangan dana jaminan sosial, dan kinerja Direksi BP Jamsostek Tahun 2019. Pertama akan kami sampaikan kinerja Direksi dahulu, baru nanti hasil pengawasan. Kinerja Direksi tentu sangat terkait dengan isu kepesertaan dana jaminan sosial didapatkan dari kepesertaan.

Bapak/Ibu sekalian,

Per 31 Maret 2020 kepesertaan BP Jamsostek adalah 51.732.073. Ini terdiri dari kepesertaan aktif, artinya yang masih mengiur terus/rutin dengan dua program, tiga program dan empat program. Dan peserta yang non aktif ini jumlahnya sekitar 40 persen, yaitu 19.832.114 peserta, ini adalah mereka-mereka yang masih mempunyai saldo JHT-JP saja tapi tidak mengiur.

Ini *trend* kepesertaan kita terhadap target RKAT. RKAT adalah target yang ditetapkan Dewas dari tahun ke tahun selama lima tahun. Dari tahun 2015 sebelum manajemen dan Dewas ada, dan kemudian 2016 mulai kita

ditugaskan disini, itu memang terhadap RKAT kepesertaan aktif mencapai target sampai tahun 2019. Tapi *trend* menurun memang. Sigmanya di 2019 kenaikannya hanya sekitar puluhan ribu.

Dan kita lihat di Maret 2020 terakhir itu ada tendensi menurun. Ini artinya ada beberapa peserta yang keluar. Ini dari 34.367 menjadi 31.899, ini adalah kumulatif. Kenapa demikian, ini dari capaian kepesertaan kumulatif triwulan pertama tahun 2020. Kita lihat penambahan tenaga kerja itu yang merah panah itu yaitu PMI dan jasa konstruksi itu *year to year*-nya merah, itu di bawah 100 persen, artinya program PMI memang berhenti, dan jasa konstruksi juga mengalami pelambatan, bahkan berhenti. Saya kira sesuai dengan apa yang kenyataan yang dilakukan saat ini. Dan kalau kita lihat tenaga kerja aktif itu secara kumulatif dari 40 target tahun 2020 (40,6 juta) menjadi 31. Banyak yang realisasinya di bawah 100 persen, artinya banyak tenaga kerja keluar. Hanya jasa konstruksi yang tenaga-tenaga *carry over* proyek yang lama masih berjalan. Ini kondisi saat ini.

Setelah dari kepesertaan, kita meningkat kepada total penerimaan iuran. Ini terhadap target juga. Demikian juga di target penerimaan iuran memang sampai 2018 tercapai semua, dan tetap tumbuh total penerimaannya sampai 2019, walaupun targetnya tidak tercapai di 2019. Iuran di 2019 tidak tercapai, ini di akhir-akhir tahun memang sudah ada kelihatan kondisi krisis mulai, dan di Maret target yang cukup besar (82,5 triliun) baru tercapai 18,16 triliun.

Kemudian total dana kelolaan ini berdasarkan RKAT secara kumulatif dana yang teriur tadi telah dikelola sampai tahun 2019 mencapai 431.6 triliun, dan di akhir Maret terjadi penurunan. Ini terjadi karena beberapa *portofolio* terdepresiasi, terutama IHSG yang turun, sehingga terjadi *potential lost* yang cukup signifikan. Dan memang juga seiring dengan total iuran tadi, target RKAT memang belum bisa terpenuhi di 2019.

Kemudian dana kelolaan, ini hanya menggambarkan secara proporsional bahwa kita mengelola baik dana jaminan sosial yang merupakan iuran dan dana badan/merupakan asset badan yang kita kelola. Sangat besar di dana kelola DJS. Ini mencerminkan dana kelolaan per program, baik jaminan hari tua, JKK/JKN, JKM, LCB, semuanya terlihat bahwa JHT itu masih menjadi dana yang terbesar dalam pengelolaan kita. Di 2019 masih tumbuh JHT dibandingkan dari tahun ke tahun. Tapi di awal Maret kita belum bisa pastikan nanti di akhir tahun seberapa besar.

Berikut ini hanya memberikan gambaran apa yang disebut *risk appetite* dari investasi atau koridor-koridor investasi, dimana diatur di dalam PP 99 jo. PP 55. Diantaranya di sini bisa dilihat misalnya deposito maksimum 15 persen, kemudian surat utang korporasi 50 persen, berikut diatur lagi dengan POJK bahwa untuk surat utang negara minimum 50 persen dan sebagainya ada disini semua. Ini POJK nya yang mengatur minimum surat utang negara itu investasi kita adalah 50 persen dari total investasi.

Ini *risk appetite* internal dari Perdir 2809/2015 bahwa dalam mencapai tujuan badan, BPJS Ketenagakerjaan mengelola resiko yang dihadapinya untuk seluruh kegiatan badan hingga rata-rata ke tingkat *low*. Jadi termasuk rendah *risk appetite*. Baik terkait hal-hal strategis, operasional, kepatuhan, pelaporan perusahaan, serta investasi, dan keuangan.

Kemudian kita lihat sebaran instrument. Sebaran instrument ini seperti dalam *risk appetite* tadi masih di dominasi oleh surat utang negara, yaitu pada

posisi Pebruari 271.764 triliun. Ini memang Direksi cenderung mengalihkan kepada SUN. Mengingat situasi IHSG yang tidak baik, terlihat di sini saham diturunkan dari 2019 ke Februari 2020.

Kemudian deposito karena mungkin bunganya juga ikut turun, dialihkan kepada SUN yang mungkin masih membawa *interest* cukup baik. Reksadana pun juga demikian, karena Reksadana masih didominasi oleh Reksadana saham. Penyertaan dan property masih sangat sedikit, karena memang aturannya masih hanya maksimum 1 persen untuk properti misalnya.

Berikutnya ini adalah persentasenya dari instrumen tadi, 60 persen untuk surat utang, kemudian yang kedua saham 19 persen menjadi 16 persen, 60 menjadi 64, jadi seperti yang kami sampaikan sebelumnya.

Kemudian berikutnya adalah tabel-tabel *chart* mengenai komposisi-komposisi. Jadi investasi BP Jamsostek ini masih di dominasi oleh investasi yang terkait pemerintah, baik BUMN, BUMD, maupun Surat Berharga Negara. Ini sebesar 86,5 persen, 13 persennya di sector swasta.

Berikut ini profil instrumen. Kalau mau melihat lebih detail deposito bagaimana, BUMN berapa persen, BBD berapa persen. Ini BBD memang lebih tinggi karena memang mempunyai *interest* yang lebih menjanjikan dibandingkan BUMN. Kemudian Surat Utang tadi seperti kita katakan masih 86 persen di pemerintah. Kemudian saham sektornya ini masih di Keuangan. Infrastruktur, (suara tidak jelas) industri barang konsumsi yang mendominasi, yaitu 30, 22, dan 19 persen. Di sektor kesehatan memang belum terlihat signifikan. Kemudian Reksadana juga begitu, Reksadana saham yang terbesar 77 persen, yang lainnya minor.

Investasi infrastruktur seperti yang menjadi prioritas pemerintah, kita sudah mempunyai *share* dalam berbagai portofolio sebesar 21 persen, atau total nominalnya 87 triliun. Ini dalam bentuk surat utang terutama yang besar, dan saham, dan penyertaan langsung yang masih kecil. Kemudian investasi property yang 1 persen tadi. Berikutnya ini bagaimana proporsinya kecil dan masih dalam bentuk besarnya di deposito.

Bapak/Ibu sekalian,

Kita mau lihat sekarang total hasil investasinya yang mungkin berimbang kepada apa yang diterima bagi peserta BPJS. Terhadap RKAT di 2016 sampai dengan 2017 memang mencapai target, namun di 2018 tidak tercapai, dan 2019 juga tidak tercapai. Ini tampaknya memang asumsi IHSG yang dicanangkan di RKAT tidak bisa tercapai, dan tentu berimbang kepada perolehan di saham maupun di reksadana. Kemudian di 2020 Maret masih bisa kita mencapai hasil investasi sekitar 7.8 triliun.

Ini total kelolaan yang dibagi dua. Jadi kami ini mengelola dana jaminan sosial dan BP Jamsostek, ini seperti dilihat tadi juga hasilnya cukup signifikan dengan jumlah yang kita kelola.

Hasil investasi per program ini kita bisa lihat, JHT masih mendominasi, kemudian JP juga sudah mulai bertumbuh. Ini yang menjadi perolehan JHT khususnya yang diatur bahwa harus lebih tinggi di atas bunga deposito atau BI Rate. Dari tahun ke tahun bunga depositonya yang kuning itu 2015 hampir dekat 6,7, perolehannya 6,89, terus meningkat cukup baik 7,83, tapi menurun lagi di 2018, di 2019 agak naik sedikit. Dan pada Maret 2020, karena bunga

juga kecil 4,93, kita masih bisa 5,99 ini perolehan pengembangan JHT dan JP nya.

Bapak/Ibu sekalian,

Ini kita memasuki hasil pengawasan Dewas. Dalam melakukan pengawasan terhadap dana kelolaan ini Dewas melakukan pertama *review* tata kelola dengan menunjuk konsultan *Price Water House Cooper* pada tahun 2018. Dan beberapa temuan, diantaranya masih terdapat beberapa portofolio yang belum sesuai PP 55. Tidak besar memang, sedikit melebihi dan sebagainya, tapi segera bisa disesuaikan.

Kemudian SOP eksekusi investasi pada saat itu komite investasi masih belum berjalan dengan baik. Kemudian yang masih berlangsung sampai sekarang memang kewenangan kanwil atau kancab dalam alokasi penempatan dana di daerah masih belum bisa 100 persen dilakukan, masih bersifat sentralistik, jadi masih bersifat pengajuan kepada pemerintah pusat. Ini tentu juga mempengaruhi fleksibilitas para kepala cabang untuk tentu bernegosiasi dengan perbankan dalam konteks perluasan kepesertaan, fasilitas, dan sebagainya.

Kemudian tentu Dewan Pengawas terus melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi auditor eksternal. Kita di audit oleh BPK, oleh OJK, dan oleh Kantor Akuntan Publik. Di 2019 ini belum selesai auditnya, hampir selesai barangkali bulan depan sudah dapat kita umumkan di publik.

Kemudian yang ketiga, beberapa kebijakan strategic investasi yang perlu mendapatkan perhatian yang pertama adalah penguatan manajemen resiko investasi untuk menerapkan *For I Principles*, dalam pengambilan keputusan investasi masih perlu ditingkatkan. Ini tampaknya direksi akan merespon dalam waktu dekat dengan mengembangkan unit MR untuk investasi, karena dari rasio staf MR untuk bidang investasi masih jauh dibandingkan dengan rasio organisasi investasi sendiri.

Kemudian isu *cut lost* dalam investasi saham dengan *trend* merugi belum pernah dilakukan, padahal Perdir tentang *cut lost* telah ditetapkan. Ini juga salah satu temuan oleh OJK barangkali ini yang perlu kita sikapi memang. Jadi mengenai bagian bahwa prinsip *high risk/high return* di saham belum bisa terpenuhi dengan maksimal. Ini berdasarkan diskusi dengan direksi tampaknya Undang-Undang Tipikor mengenai Keuangan Negara masih menjadi kendala. Jadi ini perlu menurut Dewas barangkali satu PP mengenai *cut lost* yang bisa menjabarkan lebih lanjut untuk meyakinkan bahwa *cut lost* dapat dilakukan, dan bisa menghindari apa yang disebut kerugian negara apabila terjadi kerugian.

Kemudian cara perhitungan *yield of investment* atau hasil memang tidak mengakomodir *potential lost* yang diakibatkan dari saham. Ini tentu kalau dihitung akan sangat jauh dengan yang tidak dihitung. Ini tentunya karena ada tuntutan hasil pengaman JHT harus di atas deposito *rate*. Jadi perhitungannya hanya hasil dikurangi beban investasi, pajak, macam-macam, dibagi rata-rata jumlah investasi. Tapi *potential lost* memang tidak diperhitungkan. Itu juga masih menjadi isu yang perlu didiskusikan lebih lanjut kedepan.

Kemudian beberapa isu yang penting lainnya adalah revisi PP 55 tadi yang menyangkut *risk appetite* atau koridor dalam investasi agar menjadi lebih fleksibel. Ini revisinya belum selesai. Ini prakarsa ada di Kementerian Tenaga Kerja. Dan Kementerian Keuangan juga ikut membahas, namun sampai saat ini belum dikeluarkan. Diantaranya misalnya penyertaan kita usulkan dari 1 persen menjadi 5 persen, kemudian juga asset property bisa dilakukan penjualan. Sekarang tidak boleh dijual, jadi hanya disewakan.

Kemudian, tergerusnya dana program JHT ini karena adanya peraturan yang memungkinkan dapat diambil satu bulan setelah ter-PHK. Tentu secara aktuarial akan menghantam ketahanan dananya, walaupun di dalam era covid saya kira ini tentu menjadi harapan para pekerja.

Kemudian, belum disetujuinya kenaikan iuran program JP dari 3 persen ke 4 persen yang memungkinkan terjadinya penggerusan asset jaminan pensiun di tahun 2030 cukup signifikan.

Dan yang terakhir, saat ini memang berdasarkan situasi makro ekonomi dan variabel-variabelnya ini berdasarkan protocol krisis investasi sudah masuk waspada. Kemudian Direksi sudah melihat *assessment-nya/indikatornya* menjadi siaga, *business impact analysis-nya* masuk dalam kondisi waspada, dan sudah diaktifkan *working group of crisis* yang saya kira nanti akan juga dilaporkan kepada Dewas. Barangkali nanti direksi bisa meng-*update* apa yang telah dilakukan, karena saya dengar hari ini baru mulai rapat.

Demikian, itu agenda nomor satu.

Agenda kedua yaitu penetapan rencana kegiatan dana anggaran tahun/RKAT Tahun 2020, termasuk komposisi program dalam upaya peningkatan kepesertaan, skema investasi, dan manfaat layanan tambahan.

Sebelumnya, Bapak/Ibu sekalian, perlu kami jelaskan mengenai RKAT ini. Di BP Jamsostek, dan juga barangkali BPJS Kesehatan, mempunyai dua asset besar. Yang pertama asset badan itu sendiri dan juga asset dana jaminan sosial. RKAT diturunkan dari kedua asset ini.

Sebagai contoh kita lihat RKAT belanja modal ini, ini berasal dari asset badan. Kemudian juga berasal dari asset badan yang berupa penyertaan modal negara, ini khusus untuk IT nya. Kemudian RKAT SKP (Sarana Kesehatan Pekerja) ini juga berada di asset badan, ini merupakan bawaan CSR nya PT Jamsostek waktu transformasi jaman dahulu. Ini masih kita kelola untuk kesejahteraan pekerja. Kemudian hasil pengembangannya asset badan baru boleh untuk insentif Dewas, Direksi, dan Karyawan.

Kemudian untuk sumber dari asset dana jaminan sosial ini iuran peserta dan hasil pengembangannya iuran tahun berjalan dan hasil pengembangannya jaminan sosial diatur oleh PMK akan menjadi RKAT dana operasional. Ini yang paling besar diantara RKAT yang ada saat ini sekitar 5.2 triliun, dan berasal semuanya dari iuran peserta dan pengembangan DJS. DJS itu hanya boleh untuk tiga hal, yang pertama untuk RKAT, kemudian untuk membayar klaim, dan untuk dikembangkan. Dari RKAT dan operasional apabila terjadi sisa efisiensi di akhir tahun itu disebut sebagai surplus. Surplus ini bisa digunakan untuk menyusun RKAT tanggungjawab sosial yang besarnya hanya 1 persen dari surplus. Kita pikir ini masih terlalu kecil, karena tahun ini saja surplusnya 180 miliar. Jadi satu tahun RKAT TJSL, atau dulu disebut CSR, hanya 1,8 miliar setahun. Jadi kita sedang berusaha kepada

Menteri Keuangan untuk dinaikkan persentasenya barangkali sekitar 10 persen.

Dan juga dari sisa surplus tadi itu sejumlah yang sama untuk TJSL harus disetorkan juga kepada dana jaminan sosial kembali. Baru sisa terakhirnya memperkuat asset badan. Itu mekanisme dari penganggaran di BP Jamsostek.

Kita liha satu persatu mengenai RKAT. Yang pertama mengenai dana operasional. Ini sudah kami putuskan tanggal 27 Pebruari. Ini sumber dananya ditetapkan PMK, tadi sudah kami sebutkan 5,279 *point something* triliun. Ini nilai maksimal. Jadi kalau iuran mencapai diatas itu, itu tidak boleh menjadi dana operasional, tetap kembali kepada nilai maksimal.

Kemudian nilai ini asumsinya iuran adalah 82 triliun. Ini asumsi normal, waktu ditetapkan belum terjadi krisis, terutama pandemic covid, dan analisis dari kepesertaan. Kalau ekonomi memberat bisa hanya 52 iurannya, triliun. Bahkan berat sekali, bisa 42 triliun. Belum kalau ada regulasi yang memungkinkan katakanlah penundaan iuran dan sebagainya mungkin akan lebih berat. Kita saat ini terus monitor dari bulan ke bulan bagaimana perkembangan dari iuran ini. Ini alokasinya sekitar 4,2 triliun di kantor pusat, cukup besar. Kenapa, karena memang untuk pembayaran gaji dan pengembangan SDM seluruh Indonesia. Kemudian ditetapkan juga untuk program vokasi 260 miliar, kemudian untuk operasional kanwil dan kantor cabang sekitar 794 miliar.

Ini sedikit penjabaran dari dana operasional. Dari sisi jenis pengeluaran kita lihat poin 6 memang beban personil cukup tinggi, 3,2 triliun. Kemudian beban penyuluhan dan pembinaan, ini untuk tentu kepesertaan dan pelayanan, ada sekitar 870 miliar seluruh Indonesia.

Kemudian berikut ini kita coba melihat bagaimana komposisi program di kantor pusat dalam kaitannya tentu dengan program-program yang dimintakan, yaitu perluasan kepesertaan, kemudian juga skema investasi, dan bagaimana mengatasi juga manfaat lain, terutama covid.

Direktur Kepesertaan ini mendapat alokasi sekitar 79 miliar. Ini beberapa program yang akan dicanangkan di tahun ini adalah sosialisasi dan akuisisi program secara ketok pintu. Tentu ini untuk mendorong sektor-sektor UMKM yang masih kepesertaannya belum sebesar perusahaan-perusahaan yang *established* di Cikarang dan sebagainya. Seperti toko-toko, kemudian *home industry*, ini perlu dilakukan program-program ketok pintu. Kemudian juga unit layanannya seluruh kabupaten/kota, sehingga para UMKM itu dengan mudah bisa mengakses untuk mendaftar dan membayar.

Kemudian kalau pengembangan investasi hanya 10 miliar. Ini memang hanya biaya-biaya rutin, operasional. Jadi untuk memperbesar hasil investasi tidak terlalu signifikan kaitannya dengan dana operasional, karena mereka hanya melihat market dan bagaimana kelincahan di dalam berinvestasi .

Kemudian di Direktorat Pelayanan ini ada satu program, namanya *promotive/preventive*. Ini besarnya 12 miliar. Ini Dewas meminta untuk bisa dialokasikan untuk covid. Jadi sekitar 7,5 M di tahun ini untuk *promotive/preventive* ketika bagi peserta untuk perlindungan covid berupa vitamin, alat pelindung diri, dan sosialisasi.

Kemudian juga program vokasi dikelola oleh Direktorat Pelayanan 260 M. Ini bagi mereka yang ter-PHK peserta akan dilakukan pelatihan. Barangkali situasi sekarang mungkin banyak dengan *long distance* atau *web*

(suara tidak jelas) yang mungkin menghindari covid tetapi bisa meng-*upgrade skill* mereka sehingga bisa memasuki pasar kerja kembali dan menjadi peserta BPJS kembali.

Kemudian di berikut, renstra. Ini 128 miliar untuk pengembangan IT umumnya, *maintenance* pengembangan IT, kajian strategis untuk meningkatkan pelayanan secara digital. Kemudian Direktorat Keuangan 68,9 miliar. Ini untuk administrasi keuangan badan, membayar pajak, kemudian juga *fee-fee* untuk pengembangan investasi dan sebagainya. Kemudian SDM dan Umum yang kami sebutkan tadi cukup besar, 3,6 triliun. Ini memang demikian postur dari anggaran operasional.

Kemudian di bawah Dirut langsung itu ada beberapa unit, humas, hukum, pengawas internal, sekretariat, dan sebagainya. Ini di humas ada sekitar 5 miliar untuk anggaran bansos. Termasuk Covid-19 berupa APD. Kami telah menyumbang masker di beberapa negara untuk PMI, kemudian pembagian sembako kepada peserta yang bekerja rentan, sosialisasi, dan lain-lain. Sekarang ini Dewas sedang me-*review* terus menyisir bagaimana revisi-revisi anggaran RKAT 2020 itu untuk dimaksimalkan untuk penanganan *covid* ini. Misalnya program mudik yang sekarang dilarang tentu bisa kita alihkan kepada program untuk covid. Juga tentu memonitor kecukupan dana operasional ini. Karena ini berdasarkan iuran juga. Kalau iurannya tidak tercapai tentu apapun yang kita anggarkan disini tidak ada anggarannya.

Berikutnya ini RKAT tanggungjawab sosial dan lingkungan yang besarnya hanya 1,8 miliar tadi ini juga ada anggaran untuk kontribusi sosial disamping anggaran untuk lingkungan yaitu pembangunan taman yang sudah menjadi komitmen tahun-tahun sebelumnya untuk disesuaikan.

Ini RKAT Belanja Modal cukup besar, 636.4 miliar. Ini untuk (suara tidak jelas) operasional, kantor, pembangunan renovasi, *furniture*, dan pelayanan kepada peserta, *e-card reader*, IT ada disini, *hardware*. Ini intinya adalah untuk pelayanan dan kenyamanan bekerja para karyawan juga.

Berikutnya RKAT sarana kesejahteraan pekerja. Ini memang luncheon dari Jamsostek. Ini dimaksudkan untuk pengelolaan rusun pekerja yang sudah dibangun sejak lama, baik di Batam maupun di Cikarang. Sekarang ini akan dicoba dikembangkan/di renovasi yang di Cikarang dengan nilai 37,9 M. Masih menunggu hasil *visibility study*-nya dahulu. Karena ini akan membantu pekerja di dalam mendapatkan rumah murah di sekitar Kawasan industri. Ini masih dikelola di aset badan.

Demikian poin kedua/agenda kedua, Bapak/Ibu sekalian.

Terakhir agenda pembahasan nomor tiga yaitu perluasan manfaat layanan tambahan sebagai hasil pengembangan dana pekerja melalui investasi BP Jamsostek, khususnya terhadap pandemik covid. Kami bisa bagi beberapa hal kontribusi BP Jamsostek kepada kondisi pandemic covid ini. Tentu yang pertama regulasi. Saat ini sedang dibahas relaksasi iuran bagi pengusaha dan kemudahan pengambilan JHT bagi peserta. Ini Kemenaker sebagai pemrakarsa, dan memang merupakan usulan dari BP Jamsostek. Saat ini belum selesai, mungkin nanti direksi bisa meng-*update* perkembangannya. Kemudian juga secara operasional kami telah melakukan pelayanan tanpa kontak fisik yang tidak pernah tutup. Dan bahkan di kantor cabang 76 persen masih buka, masih *work at office*, dan 91 persen kantor cabang pembantu pun masih buka.

Kemudian tentu kita terus melakukan revisi RKAT untuk kegiatan yang pro covid. Tentu ini bisa juga diupayakan melalui revisi PMK untuk dana operasional, khususnya untuk kita tambah jumlahnya. Dan kalau perlu memang di *state* disitu dikatakan sekian miliar misalnya untuk dana bantuan sosial menanggulangi covid, itu akan lebih bagus sekali. Seperti halnya vokasi, sekian miliar untuk vokasi. Jadi kita akan mencoba mengusulkan kepada Kementerian Keuangan, dan mohon dukungan dari Bapak/Ibu yang terhormat dari DPR.

Kemudian yang dari *budgeter*, tadi dari RKAT dana operasional, *promotive/preventive* K3, vokasi, bansos, pembagian sembako dan sebagainya. Aksi sosial di hari buruh 1 Mei akan juga dilakukan hal-hal serupa.

Kemudian untuk yang non *budgeter* kami telah menyumbangkan gaji karyawan, Dewas, Direksi, untuk bantuan kepada pandemik covid ini berupa kepesertaan JKK-JKM, relawan medis dari BNPB sebesar 1.240 orang, pembagian APD dan ini bisa kita kembangkan lagi pada hal-hal yang lain.

Yang terakhir, Bapak/Ibu sekalian, manfaat layanan tambahan dari dana investasi memang untuk covid secara langsung tidak ada/belum ada. Karena memang covid sifatnya belum komersial, di sini masih *charity* dari pemerintah/hibah dari pemerintah. Jadi manfaat layanan tambahan dana investasi hanya satu, masih fasilitas kredit pemilikan atau uang muka rumah bagi peserta JHT dengan Permenaker 35/2016, dengan penempatan di Bank BTN/BRI sebesar 1.8 triliun dengan saat ini bisa tersalurkan 5.716 unit senilai 1.087 triliun.

Saya kira itu, Bapak/Ibu sekalian, apa yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan mohon maaf kami menyita waktu setengah jam.

*Wabillaahit Taufiq Wal Hidayah,  
Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumsalaam.*

Terima kasih Pak Ketua.

Selanjutnya saya persilakan kepada Direktur BPJS Ketenagakerjaan, Pak Agus.

#### **DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN (AGUS SUSANTO):**

Terima kasih Ketua.

*Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.*  
Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat, Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI;  
Ketua DJSN, Ketua dan Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan;  
dan seluruh hadirin  
Bapak/Ibu yang kami hormati,



Dari jajaran direksi diwakili oleh tiga orang. Saya sendiri, dan juga Direktur Kepesertaan (Pak Ilyas) sebelah kanan saya, dan Direktur Pelayanan (Pak Krisna) di sebelah kanan lagi.

Saya akan memaparkan penjelasan sesuai dengan yang diminta di dalam surat undangan.

**INTERUPSI F-PAN (Dr. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A.):**

Interupsi, Ketua.

Mestinya Pak Dirut menjelaskan juga direksi yang lainnya kemana, supaya kita ini tahu semua. Inikan persoalan tanggungjawab dari BPJS ini adalah kolektif kolegial. Ini beberapa dari direksinya saya lihat ini ada yang memang malas datang kesini. Jadi perlu juga ditanya, Ketua.

Demikian, terima kasih Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Izin, Pak Saleh.

Memang kita hanya meminta tiga dari masing-masing lembaga, baik dari BPJS Ketenagakerjaan, Dewas. Karena memang aturan dari kita melaksanakan rapat yang hadir secara fisik memang demikian, sehingga kita tidak bisa menghadirkan semuanya.

Lanjut Pak.

**INTERUPSI F-NASDEM (Hj. SRI WULAN, S.E.):**

Pimpinan, tadi yang disampaikan Pak Saleh amanahnya itukan bukan harus hadir secara fisik yang disini, tetapi kan *virtual* masih juga bisa. Karena bagaimanapun itu nanti pertanyaan kita tidak hanya mengarah kepada beliau yang hadir disini, tetapi kan ini juga secara keseluruhan. Jadi kan alangkah baiknya juga disampaikan. Dan siapa tahu juga direktur yang lain juga mengikuti secara *virtual*.

Terima kasih.

**DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN (AGUS SUSANTO):**

Terima kasih.

Memang sesuai undangan kita di undang tiga orang. Namun demikian kalau diizinkan untuk mengikuti secara *virtual* kami mohon dikirimkan untuk *link* dan id-nya Pak.

Barangkali sambil jalan mungkin bisa kami teruskan, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Ini ada yang interupsi sedikit tadi siapa?

Silakan, Pak Ansory.

**WAKIL KETUA (H. ANSORY SIREGAR, Lc.):**

Mitra kalau sudah ada (suara tidak jelas) tidak perlu lagi. Karena keamanan juga. Seperti yang kita bahas di Lapan, jadi cukup mereka (suara tidak jelas).

Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Silakan Ibu Wulan.

**F-NASDEM (Hj. SRI WULAN, S.E.):**

Ini kan kita membahas untuk semuanya. Kalau misalnya segi keamanan, *virtual* kan bisa juga. Bukan harus tadi disampaikan bahwa kita hadir secara fisik, kita sudah dihadiri oleh tiga sesuai yang diminta, tetap nanti bahasan yang akan kita sampaikan dan juga penjelasan yang harus kita dengarkan secara bersama-sama, baik itu yang ada disini maupun ada di *virtual*, inikan semuanya harus secara komplit. Jadi bukan masalah keamanan dan tidak aman, semuanya kita *Insy Allah* aman. Karena bagaimanapun kita sudah melakukan dengan berbagai cara, baik itu fisik maupun *virtual*.

Terima kasih Pimpinan.

**WAKIL KETUA (H. ANSORY SIREGAR, Lc.):**

Kemarin kalau *virtual* di anggota kan (suara tidak jelas). Kalau *virtual* (suara tidak jelas) kita kemarin ada yang *live*. Kita tidak tahu tapi sudah ada *live* kita dibuat. Mungkin masalah (suara tidak jelas)

**INTERUPSI F-PAN (Dr. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A.):**

Interupsi, Pimpinan.

Saya mau jelaskan ini sama Pak Ansory.

Saya datang ke kantor ini bukan tanpa berjuang juga. Saya juga takut Pak, sama-sama Pak Ansory yang lebih takut dari saya. Inikan Pak Ansory yang takut ini untuk ikut rapat-rapat beginian.

Inikan urusannya urusan rakyat ini. Persoalan ada putusan dari Pimpinan itu hanya tiga yang rapat, itu putusan pimpinan. Komisi ini bukan milik pimpinan, ini milik semua anggota. Saya disini atas nama fraksi saya. Bukan atas nama Fraksi PKS saya disini.

Jadi mohon ini kearifannya, saya minta supaya direksi-direksi yang ada itu dihadirkan walaupun *virtual*. Kalau tidak begitu saya minta rapat ditutup saja, tidak jelas kayak begini. Tutup saja rapatnya.

Jadi mohon ini, Pak Ansory ini saya dengar dari kemarin rapat dipimpin selalu mengganggu terus. Saya tidak suka. Saya juga mantan pimpinan disini. Sampai sekarang saya masih pimpinan di MKD. Jangan kayak begitu. Mohon maaf ini, saya tidak mau kalau misalnya ini dilanjutkan tanpa menghadirkan semuanya. Karena tanggungjawabnya itu sama. Kasihan kan misalnya Pak Direktur Utama saja terus yang menjawab disini.

Mohon maaf, terima kasih.

**INTERUPSI F-PG (Hj. DEWI ASMARA, S.H., M.H.)**

Interupsi, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Sebentar, Pak Ansory masih interupsi.  
Silakan Pak.

**WAKIL KETUA (H. ANSORY SIREGAR, Lc.):**

Bang Saleh, Bapak boleh juga jadi pimpinan tidak apa-apa seperti ini. Saya tidak pernah melarang. Kan kita rapat pimpinan sebagaimana biasa, tidak ada yang kita halang-halangi disini. Jadi ini Bapak harus bertanggungjawabkan semuanya. Bapak juga bisa saya ini balik. Jadi disini harus saling menghormati.

Tidak apa-apa. Tapi rapat kita di pimpinan, ini kan cuma kita memberikan ini. Kemarin kan yang mengusulkan itukan Ibu Nini. Karena Ibu Nini dia ada rapat secara langsung, padahal dia tidak tahu. Tapi kalau memang forum kita disini membolehkan mitra kita ini *virtual* saya kira terserah saja. Tapi jangan sampai omongan Bang Saleh itu kalau Bapak tidak cabut berarti kita akan berhadapan.

**F-PAN (Dr. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A.):**

Apa tadi omongan saya yang salah? Izin, Pimpinan. Omongan saya yang salah apa? Coba saya tanya?

**KETUA RAPAT:**

Sebentar.  
Sudah Pak Ansory ya.

**F-PAN (Dr. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A.):**

Karena itu menyangkut nama saya.

**KETUA RAPAT:**

Sebentar Pak. Ibu Dewi dulu.

**F-PAN (Dr. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A.):**

Karena menyangkut nama saya, saya klarifikasi dulu.

**KETUA RAPAT:**

Nanti setelah itu Bapak.

**INTERUPSI F-PAN (Dr. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A.):**

Ini interupsi dulu, *of clarification* ini.

Saya kasih tahu dulu sama Pak Ansory, ini karena nama saya disebut-sebut.

Saya mau kasih tahu Pak Ansory, saya tidak ada yang menyentuh apapun yang terkait dengan mekanisme rapat di sini. Saya hanya mempertanyakan mengapa tidak dibolehkan mereka ikut rapat *virtual*. Kalau katanya ada rapat pimpinan yang hanya menugaskan tiga orang, tanya sama anggota dulu. Anggota kan berhak juga untuk memberikan pendapat bahwa mereka harus ikut rapat di sini. Kecuali kalau semua anggota menyetujui hanya tiga, ya saya akan mengalah. Ini namanya demokrasi. Tapi jangan dianggap semua bahwa rapat pimpinan itu sudah final, itu salah. Itu yang saya katakan sama Pak Ansory, itu jaga itu. Jangan mentang-mentang pimpinan kita dianggap anak buah. Kita ini anggota bukan anak buah, beda sekali. Hak kita disini sama. Anda jadi pimpinan itu mengatur jalannya bagaimana komisi ini berjalan dengan benar, lalu lintas diskusi di rapat. Ini yang penting dicamkan dulu apa yang mau dituntut ke saya.

**KETUA RAPAT:**

Sebentar, Pak Ansory.

Sudah selesai Pak?

Silakan Ibu Dewi.

**F-PG (Hj. DEWI ASMARA, S.H., M.H.):**

Pimpinan dan Rekan-rekan sekalian,

Mungkin memang kita harus sama-sama juga memahami tanggungjawab dan wewenang masing-masing epada mitra kerja dan rekan-rekan pimpinan dan para anggota sekalian. Kalau yang namanya rapat, rapat itu tentunya kita kembali kepada fungsi pengawasan pada mitra kerja. Rapat ini sebetulnya masalah itu mau *virtual* ataupun ini, inikan sifatnya terbuka. Saya rasa dalam era transparansi ini kita tidak perlu melakukan khawatir terhadap data dan apa. Justru dana yang dikelola oleh mitra kerja ini adalah *other people money*. Bukan uang negara, bukan juga uang *pure* daripada seperti perusahaan milik-milik pribadi saja, tapi adalah milik masyarakat yang menyetorkan preminya. Jadi milik para tenaga kerja. Oleh karena itu kita mengawasi uang yang preminya dibayarkan oleh para pekerja. Tentunya semakin terbuka semakin baik. Jadi secara tidak langsung semua juga melihat. Transparansi itu ada, dan tidak ada yang perlu ditakuti. Apa yang perlu ditakuti di era transparansi ini.

Kemudian yang kedua, bahwa apa yang memang diputuskan dalam rapat pimpinan itu harus disampaikan pada anggota. Dan memang anggota mempunyai hak. Mari kita sama-sama melihat bahwa memang bukan berarti apa yang diputuskan pimpinan anggota harus mengatakan "iya". Jangankan pimpinan komisi, Pimpinan DPR saja kan juga bukan berarti harus "iya", kan masih ada rapat paripurna. Kita juga ada Bamus harus diputuskan, pleno

komisi. Jadi marilah kita masing-masing menghargai. Semua masuk ke DPR ini tidak ada unsur pimpinan. Semua sama-sama punya hak suara. Jadi marilah kita sama-sama menghargai hak suara kita masing-masing.

Saya rasa agar supaya melengkapi sehingga bisa bicara secara teknis, karena saya yakin Pak Dirut juga tidak menguasai secara teknis kalau kawan-kawan mau mengupas. Dan semakin terbuka semakin baik, agar semua juga menyaksikan. Teman-teman ini mempunyai hak dan juga ingin menjalankan tugasnya secara benar. Kalau cuma hanya sekedar rapat melempar pertanyaan yang dijawab hanya secara normatif, ya kalau begitu teman-teman kita kumpulkan saja pertanyaan tertulis, kita tinggalkan rapat, silakan TA baca, silakan BPJS jawab. Tidak perlu kita hadir rapat. Ini kayak seperti kontes pertanyaan, kemudian menjawab, bikin kesimpulan. Buat apa anggota hadir rapat kalau tidak ada hak bicara dan mendapatkan jawaban yang memuaskan untuk tugas konstitusinya. Kalau begitu kumpulkan pertanyaan. Pimpinan rapat saja, pertanyaan kumpulkan ke TA, bacakan saja. Jadi tolong hak bicara para anggota untuk menjalankan hak konstitusinya sebagai Anggota DPR yang dipilih oleh rakyat dengan hak suara. Bukan menjalankan tugas dan keputusan apa yang telah ditetapkan oleh Pimpinan.

Demikian kiranya, terima kasih.

**F-PDIP (ABIDIN FIKRI, S.H.):**

Daftar, Ibu Ketua.  
Saya Abidin Fikri, Ibu Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Silakan.  
Masih terkait ini ya Pak.

**F-PDIP (ABIDIN FIKRI, S.H.):**

*Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

Saya juga ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama sebenarnya *simple*, tinggal dijawab saja pertanyaan dari Pak Saleh. Saya kira itu sudah *clear*, tidak ada masalah. Memang semua harus disampaikan ke anggota. Tinggal di jawab saja tiga orang direksi yang hadir, yang lain boleh keluar, agar mengikuti perkembangan rapatnya. Ada hal-hal teknis mungkin perlu ditanyakan. Ada direksinya hadir dalam *virtual* ini. Saya kira *simple* ini, Ibu Ketua. Saya kira bisa diberikan (suara tidak jelas) dengan *password*-nya ke direksi yang lain. Saya kira *simple* saja agar rapat ini bisa dijalankan secara baik. Memang kita semuanya punya hak yang sama, Pimpinan agar arif dan bijaksana mengatur lalu lintas.

Saya kira itu, Pimpinan.  
Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Abidin.

Tadi sudah saya sampaikan kepada sekretariat, menurut saya silakan dari masing-masing DJSN, kemudian Dewan Pengawas, dan Dirut. Silakan diperintahkan untuk mengikuti secara *virtual*.

**WAKIL KETUA (Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A.):**

Pimpinan/Anggota, baik yang datang secara fisik maupun *virtual* dan seluruh Anggota DJSN, Dewas Ketenagakerjaan, dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan,

Jadi *reason*-nya kenapa yang di undang yang datang cuma tiga dari tiap-tiap perwakilan, itu adalah kita terbentur dengan peraturan yang terkait dengan yang mengikuti rapat tidak lebih dari 20 orang yang hadir fisik. Namun bukan berarti yang tidak hadir fisik ini tidak bisa mengikuti, walaupun ini sifatnya tertutup. Di beberapa komisi saya tahu, seperti Komisi II, itu yang hadir fisik dua orang KPU nya, yang lain tiga orang hadir secara *virtual*.

Jadi adanya pembatasan ini terkait juga dengan peraturan yang ada di DPR. Tapi bukan berarti yang tidak hadir tidak bisa mengikuti. Jadi saya sepakat dengan Ibu Pimpinan tadi untuk membuka ID juga kepada yang ada di kantor. Tapi mohon, karena ini sifatnya tadi tertutup, jadi juga teman-teman Bapak/Ibu yang mengikuti dari rumah juga bisa menjaga itu.

Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Saya kira sudah bisa dilanjut ya, Bapak/Ibu sekalian.

**F-NASDEM (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E.):**

Apa yang disampaikan oleh Anggota DPR yang terhormat (suara tidak jelas) saya harus luruskan di tempat ini. Bahwa rapat semalam itu rapat pimpinan, kami putuskan adalah rapat fisik dan rapat *virtual*. Itu keputusan kami, tidak ada embel-embel yang lain. Jadi rapat fisik dan rapat *virtual*. Rapat ini rapat tertutup. Tapi keputusan kita adalah fisik dan *virtual*, itu keputusannya. Tidak ada embel-embel lain-lain, karena yang rapat saya sendiri tadi malam bersama dengan pimpinan lengkap. Jadi itu keputusannya. Kalau ada yang lain minta maaf, Pak Saleh. Kami putuskan seperti apa yang saya sampaikan tadi. Jadi biar (suara tidak jelas) bahwa memang keputusan rapat tadi malam adalah *virtual* dan fisik. Jadi tidak ada batasan *virtual* dan fisik, dimana kita harus memberikan *id* kepada yang akan mengikuti rapat. Itu yang kami sampaikan.

Perkembangan yang lain adalah, kenapa harus memimpin fisik? Karena dari mitra kerja diminta untuk hadir fisik, kemudian dari Pimpinan DPR pun harus hadir fisik. Makanya saya tidak bisa memimpin dari tempat lain.

**KETUA RAPAT:**

Kita juga tidak menyatakan fisik saja, dari awal kita tidak menyatakan, saya memimpin tidak menyatakan tidak *virtual*, tidak ada.

Lanjut Pak, silakan.

**DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN (AGUS SUSANTO):**

Saya jadi *bengong*, Bapak/Ibu. Itulah dinamikanya, sangat hidup. Terima kasih Bapak/Ibu sekalian.

Saya akan mencoba mohon izin untuk memaparkan empat hal sebagaimana yang ditanyakan dalam surat undangan kepada kami. Yang pertama terkait dengan program dan kegiatan terhadap pengelolaan dan pengembangan dana jaminan bagi peserta, terutama pengadaan alat-alat penanganan Covid-19 yang dapat dimanfaatkan di dalam mendeteksi penyebarannya kepada pekerja dan masyarakat.

Bentuk program atau kegiatan kita di dalam pengelolaan dan pengembangan terkait dengan Covid-19 ini kita membuat inisiatif tanggap darurat Covid-19 BPJS Ketenagakerjaan yang kita tujukan tanggap darurat ini kepada karyawan, kepada peserta, dan juga kepada masyarakat. Bentuk inisiatif ini diantaranya yang pertama kami membuat sebuah krisis protokol, dan kami sudah mulai mengimplementasikan krisis protokol. Kemudian juga kami memberikan bantuan kepada pihak-pihak yang terdampak Covid-19, dan ini sudah kami lakukan. Kemudian ada beberapa bantuan untuk yang terdampak Covid-19 ini yang saat ini masih dalam proses.

Beberapa kebijakan krisis protokol kita di masa pandemik Covid-19 ini kita buat kebijakan ini tidak lain ditujukan untuk keselamatan dan kesehatan, baik itu karyawan ataupun peserta, dan juga secara umum kepada masyarakat. Kemudian juga kita tujukan untuk kepatuhan terhadap regulasi. Dan yang terakhir, untuk memastikan *business continuity*-nya. Didalam krisis protokol ini kita membentuk satu tim untuk menangani krisis manajemen yang kita sebut CMT (*Crisis Management Team*) yang terdiri dari BOD dan tim operasional yang terus menerus setiap hari memantau seluruh kegiatan aktifitas yang terkait dengan kondisi kedaruratan pandemic Covid-19.

Kemudian kita juga membuat kebijakan atau protokol tanggap darurat Gerakan Cegah Penyebaran Corona. Sejak 18 Maret 2020 kita sudah mengimplementasikan *Crisis Management Team*, dan telah mengeluarkan 22 kebijakan protokol untuk Gerakan Cegah Penyebaran Corona-19. Dari 22 kebijakan atau protokol tersebut kami sampaikan di dalam materi kami, tidak saya baca satu persatu. Namun ini tidak lain meliputi, baik itu kebijakan terkait dengan kesehatan, masuk kantor, pengaturan kerja di kantor, kemudian pengaturan operasional di kantor, kemudian juga pengaturan untuk pelayanan selama wabah Covid-19, kemudian juga pengaturan yang terkait dengan protokol investasi, kedaruratan investasi. Kemudian ada protokol krisis investasi. Dan kita sudah mengaktifkan *working group crisis*, seperti disampaikan oleh Pak Ketua tadi. Kemudian juga ada beberapa protokol yang lain terkait dengan IT. Bahkan yang sangat sederhana, protokol untuk melakukan rapat-rapat melalui *video conference* atau *online*.

Kemudian selama operasional di kondisi kedaruratan wabah covid ini, khusus untuk daerah-daerah yang terdampak Covid-19 dan diberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), maka kami mengambil kebijakan untuk menerapkan WFH (*Work From Home*). Dan di dalam *work from home* ini kantor kami tidak tutup, operasional kami tidak tutup, tetapi kantor dan operasional layanan kami tetap berjalan normal sebagaimana mestinya. Namun dilakukan dengan cara yang berbeda. Dan ini kami selalu memastikan, dan kami memerintahkan seluruh jajaran setiap hari dilakukan

*morning briefing* secara virtual untuk memastikan bahwa walaupun kita menerapkan WFH dalam rangka untuk sinergi membantu program pemerintah memutus mata rantai penyebaran penyakit corona. WFH bukanlah libur, tapi WFH adalah tetap bekerja dari rumah. Cara kerja itu kita ganti, yang tadinya berbasis fisik menjadi berbasis digital. Dan kita terapkan layanan itu kita sebut dengan sebutan 'lupa fisik' atau 'layanan tanpa kontak fisik'. Jadi kita tetap memberikan layanan dan operasional tanpa kontak fisik yang kita gunakan melalui beberapa fasilitas kita.

Kemudian yang terkait dengan bantuan kepada yang terdampak Covid-19 yang sudah kita lakukan adalah diantaranya untuk pemberian masker dan *hand sanitizer* kepada pekerja Indonesia atau PMI. Kemudian waktu itu kita juga memberikan makan siang gratis kepada ojol di wilayah DKI. Kemudian tadi juga sudah disebutkan dari internal kita, Direksi, Dewas, dan karyawan di potong gajinya. Kita di potong gaji mulai dari April sampai wabah ini kira-kira selesai. Kita juga akan menanyakan kembali nanti kepada internal kita. Tetapi ini sudah jalan dari bulan lalu.

Berikutnya ini adalah daftar pemberian masker dan *hand sanitizer* kepada pekerja Indonesia dan pekerja migran Indonesia. Kita berikan bagi yang ada di Indonesia, di Hongkong, di Taiwan, di Korea Selatan, dan di Brunei Darussalam. Dan waktu lalu kita juga bekerjasama dengan 150 warteg, karena mereka mulai kesulitan, kita berikan order pekerjaan untuk menyediakan makan siang gratis kepada para ojek *online* di wilayah DKI Jakarta. Dan ini akan kita evaluasi untuk daerah yang lainnya.

Kemudian yang donasi dari potong gaji karyawan, direksi dan Dewas BPJS Ketenagakerjaan kemarin sudah terkumpul, dan ini akan kita berikan untuk membantu para relawan tenaga medis yang terdaftar di BNPB. Jadi mereka kita bantu untuk pembayaran iuran jaminan sosial kecelakaan kerja dan kematian. Saat ini ada 18.000 relawan, dan kelihatannya akan bertambah terus. Dan kemarin sudah kita lakukan tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga. Saat ini kurang lebih ada 10.000, dan kita akan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan dari internal kita, karena ini dari gaji Direksi, Dewas, karyawan.

Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana bantuan kepada para peserta dan kepada masyarakat umum. Ini untuk sebelum memberikan bantuan, izinkan kami untuk menyamakan persepsi. Dana di BPJS Ketenagakerjaan selalu dianggap dananya besar, kenapa tidak bisa mengalir kepada masyarakat atau kepada pihak-pihak yang terdampak. Ini dana tersebut telah diatur sedemikian rupa oleh para pendiri kita dulu di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, ini kemudian ada di PP. Ada dua dana di situ:

1. Dana dari aset badan, aset badannya institusi BPJS Ketenagakerjaan;
2. Aset dari iuran peserta, kita sebut aset DJS atau aset Dana Jaminan Sosial.

Aset badan itu bisa untuk apa saja? Itu di nomor satu, yaitu hanya bisa digunakan untuk biaya operasional, untuk pengadaan barang dan jasa, untuk peningkatan kapasitas pelayanan, untuk investasi di badan.

Kemudian kelompok yang kedua, dana jaminan sosial. Ini adalah uang iuran dari masyarakat tersebut. Uang iuran yang terkumpul itu bisa digunakan apa, ini diatur oleh undang-undang, hanya bisa digunakan:

1. Untuk pembayaran manfaat. Jadi kalau ada yang kecelakaan, kematian, atau hari tua, ini dibayarkan dari dana DJS;



2. Untuk pembayaran dana operasional penyelenggaraan program. Kegiatan kita sehari-hari ini didanai dari dana operasional asalnya dari dana DJS;
3. Dana itu keluar hanya untuk dilakukan investasi.

Kita lihat bagaimana petanya kalau kita ingin memberikan bantuan kepada yang terdampak di Covid-19 di halaman 13. Jadi kami memetakan.

Yang nomor 2, saya mulai dari nomor 2, aset DJS. Apakah mungkin dari aset DJS dana-dana yang terkumpul itu bisa diperbantukan? Kalau kita lihat dari skema regulasi yang ada itu tidak memungkinkan. Baik itu dari undang-undang sampai ke turunannya saat ini tidak memungkinkan. Untuk mungkin bagaimana? Di halaman berikutnya akan kami sampaikan. Karena untuk dana *share* DJS ini dibayarkan untuk cadangan teknis, untuk klaim investasi, dan lainnya. Kemudian yang memungkinkan adalah dari aset DJS. Namun ini sesuai dengan RKAT yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Inilah yang sebagian kecil yang saya sampaikan tadi bantuan yang sudah dan tadi sudah dilakukan mungkin kenapa kecil, kenapa tidak bisa besar. Karena sumbernya memang kecil seperti yang kami gambarkan seperti ini. Tadi adalah bantuan yang sudah kami berikan.

Kemudian apa yang akan kita usulkan lagi? Yaitu, ini bantuan yang dalam *progress*, relaksasi iuran BP Jamsostek. Kami menerima masukan surat dari dunia usaha/seluruh pengusaha, kemudian dari kementerian, dan dari berbagai pihak untuk bisa memberikan relaksasi iuran, baik itu untuk penangguhan/penundaan atau penghapusan denda. Untuk itu kami sudah bersurat kepada pemerintah melalui Kementerian Koordinator Perekonomian dan juga PMK, dan sudah ditindaklanjuti langsung oleh Pemerintah. Dan sudah dibahas terus menerus, setiap hari tim kami *intense* untuk menyiapkan regulasi ini agar kita bisa memberikan relaksasi iuran kepada para peserta kita. Ini memang kita butuhkan, karena bagaimanapun *standing position* BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan namanya BP (Badan Penyelenggara), kami adalah penyelenggara atas sebuah regulasi, sehingga kalau kita ingin memberikan sesuatu yang di luar ketentuan kita butuh payung regulasi.

Kemudian yang sedang dalam *progress* juga, ini bantuan terdampak covid, adalah dalam bentuk program *promotive/preventif*. Ini kegiatannya ada rencana kita untuk memberikan APD kepada pekerja berupa masker kain, kemudian pemberian multivitamin untuk peningkatan daya tahan tubuh, kemudian untuk paket APD untuk penanganan Covid-19 di pusat pelayanan kecelakaan kerja BP Jamsostek. Ini yang sekarang masih dalam proses.

Kemudian bagaimana nanti momentum *mayday* ini *engagement*-nya dan *empowerment*-nya dengan serikat pekerja/serikat buruh dan masyarakat pada umumnya. Di kegiatan *mayday* nanti kami akan lebih meningkatkan untuk edukasi jaminan sosial dan edukasi yang terkait dengan wabah Covid-19 melalui *webinar*. Saat ini kita sudah melakukan *webinar* secara desentralisasi ke daerah-daerah. Mereka melakukan sosialisasi edukasi melalui *webinar* dan di *mayday* nanti akan kita *massive*-kan. Kemudian kita melakukan edukasi *vocational training* untuk pekerja ter-PHK. Dan yang ketiga, kita akan melakukan bhakti sosial kepada peserta yang terdampak. Penerima manfaat adalah anggota serikat pekerja/serikat buruh. Kemudian dapat dilaksanakan beberapa kali hingga akhir 2020. Kemudian wajib mengikuti anjuran pemerintah *physical distancing* dan sebagainya. Kemudian

kita akan kolaborasi dengan serikat pekerja, asosiasi pengusaha, pemda, mitra PLKK, BLK, dan lainnya. Dan kita akan memanfaatkan aplikasi *virtual* yang ada beberapa jenis aplikasi yang beredar di masyarakat.

Demikian agenda yang pertama tadi yang terkait apa saja yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan selama Covid-19 ini untuk membantu para peserta dan juga masyarakat.

Izinkan kami masuk yang agenda dua, ini terkait dengan program jaminan kecelakaan dan program jaminan hari tua bagi pekerja buruh yang mengalami Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang positif Covid-19, dan juga yang meninggal dunia.

Kami sampaikan beberapa rujukan perlindungan peserta saat wabah corona. Itu ada kami paparkan di halaman 18, ada 11 rujukan regulasi. Mohon maaf saya tidak bacakan disitu. Kemudian dari regulasi ini bisa disimpulkan bahwa kebijakan kita untuk memberikan perlindungan JKK dan PAK bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan di saat Covid-19 ini, diantaranya kita mencakup atau melindungi para pekerja yang bekerja dari rumah atau yang menerapkan *Work From Home* (WFH). Kemudian juga kita *cover* untuk para tenaga medis dan paramedic, para tenaga *support* administrasi di area kesehatan, kemudian kepada *volunteer* atau relawan. Jadi dari nomor 1, 2, 3 ini kita *cover* JKK, artinya kalau mereka mengalami meninggal dunia itu adalah karena kecelakaan kerja. Kemudian yang lainnya masih diterapkan secara umum sebagaimana regulasi yang ada.

Demikian yang agenda dua.

Mohon izin saya teruskan ke agenda tiga yaitu program jaminan hari tua dalam mengatasi permasalahan kekurangan daya beli pekerja/buruh dalam upaya mewujudkan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi peserta dan/atau anggota keluarganya sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Yang bisa dilakukan sesuai dengan regulasi yang kami sampaikan di depan tadi adalah bahwa jaminan hari tua ini bisa dimanfaatkan oleh peserta saat terdampak Covid-19. Yang pertama adalah peserta yang ter-PHK. Jadi bagi mereka yang ter-PHK ini bisa langsung mengajukan mengambil JHT nya. Jadi kalau ada atau memiliki JHT bisa langsung mengajukan pengambilan JHT-nya secara *lumpsum* setelah masa tunggu satu bulan.

Kemudian yang kedua, sebetulnya peserta aktif, ini yang bukan ter-PHK, masih aktif, itu juga bisa mengambil tabungan JHT nya secara parsial, yaitu hanya 10 persen, karena sesuai dengan ketentuan namun demikian sesuai dengan regulasi. Dan ini diatur di undang-undang. Malahan ini diperbolehkan bagi peserta yang sudah terdaftar minimal 10 tahun.

Kemudian yang ketiga mohon maaf tidak saya tulis di sini, kami mohon maaf kelewatan, sebetulnya yang ter-PHK itu juga diberikan bantuan. Namun demikian sumber dananya dari pemerintah. Ini diintegrasikan dengan program pemerintah, yaitu program Kartu Pra Kerja. Kami terus menerus berinteraksi dengan kementerian terkait, Kementerian Koordinator Perekonomian. Dan hari ini hari terakhir kita menyajikan data siapa saja, berapa jumlahnya orang ter-PHK, yang nanti akan diberikan program Kartu Pra Kerja. Perhari ini sudah kami sampaikan kepada kementerian terkait, dan kita juga sudah koordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja.

Jadi sebetulnya ada tiga tadi yang bisa diberikan kepada para peserta kita:

1. Yang ter-PHK bisa mengambil JHT-nya;
2. Akan mendapatkan Kartu Pra Kerja, karena ini disinergikan dengan program pemerintah;
3. Bisa mengambil 10 persen, namun bagi peserta yang 10 tahun.

Kemudian kita lihat di halaman berikutnya disampaikan data pengambilan klaim JHT saat Covid-19, Januari, Februari, Maret. Ini kelihatan yang nomor 4 dari atas, peserta 10 itu naik signifikan, jadi ternyata banyak sekali mengambil tabungan JHT-nya. Kemudian yang mengundurkan diri/putusan PHK juga naik. Dilihat dari rata-rata ada kenaikan cukup signifikan untuk pengambilan JHT. Di bulan Maret, satu bulan saja, kemarin kita membayarkan JHT sebanyak 7,6 triliun rupiah.

Demikian yang agenda tiga.

Ini yang agenda empat, agenda yang terakhir, kami sampaikan terkait dengan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2020, termasuk komposisi program dan upaya peningkatan kepesertaan, skema investasi, serta layanan manfaat tambahan bagi peserta.

Berikutnya adalah tema badan RKAT Tahun 2020 saya kira ini saya lewati saja. Ini adalah untuk memandu kita supaya bisa mencapai RKAT Tahun 2020. Dan di halaman berikutnya masih strategi tahun 2020. Ini ada strategi di kita bagaimana kita bisa mencapai target-target yang ditetapkan.

Di halaman berikutnya kami sampaikan juga program dan kegiatan strategi selama 2020. Tentu saja ini akan kita *review* kembali melihat perkembangan situasi pandemik wabah penularan penyakit Covid-19.

Berikutnya adalah kami berikan gambaran pertumbuhan dana investasi. Ini saya kira tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Dewan Pengawas terkait dengan pertumbuhan investasi. Yang kami sampaikan ini kelihatan naik semua, karena ini adalah *forecast* yang paling terakhir. Namun demikian ini akan kita lihat lagi realisasinya. Karena per bulan Maret ini juga turun, tidak sebesar itu. Tetapi ada koreksi karena terdepresiasi penurunan harga saham dan juga harga obligasi, tentunya akan ada penurunan di situ.

Kemudian dari hasil investasi, ini yang unik di BPJS Ketenagakerjaan ini, adalah hasil investasi di patok atau di target undang-undang, yaitu tidak boleh kurang dari rata-rata deposito bank pemerintah. Ini kami gambarkan hasil investasi sebagaimana di halaman 28.

Kemudian juga YOI atau *return* ini kami sampaikan secara *historical*-nya di halaman 29. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua. Ini di halaman 30 yang saya sampaikan tadi bahwa JHT ini di target oleh regulasi harus di atas rata-rata *counter rate* bank pemerintah. Ini yang warna merah yang bawah ini adalah rata-rata deposito bank pemerintah, kemudian yang di atas adalah rata-rata tingkat pengembangan JHT kita. Ini kondisi yang kami paparkan dari tahun 2016 hingga 31 Maret 2020.

Yang terakhir terkait dengan realisasi manfaat layanan tambahan atau MLT. Benar bahwa kita ada program namanya MLT, ini penyaluran untuk memberikan pinjaman KPR besubsidi kepada para pekerja kita. Kemudian juga untuk pembelian uang muka pembelian KPR. Ini adalah datanya kita bekerjasama dengan BTN, BNI, BRI. Namun belum maksimal karena banyak juga yang tidak *bankable*. Semua ini kita tergantung dan serahkan kepada kebijakan dari bank masing-masing karena ini menyangkut kebijakan kredit kepada bank masing-masing. Kami/BPJS Ketenagakerjaan yang

menyediakan dana apabila itu terserap untuk kebutuhan pengadaan KPR bagi para peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Kemudian yang kesembilan ini terkait dengan evaluasi triwulan satu 2020. Saya kira ini mungkin tidak saya bacakan, bisa dilihat. Memang kita kondisi sekarang, seperti indeks itu turun, kemudian juga pertumbuhan ekonomi turun dan sebagainya saya paparkan di halaman 32.

Yang lain adalah peran BP Jamsostek di pasar modal. Ini yang sebelah kiri mungkin mohon maaf ini kekurangan informasi. Ini adalah stimulus dari pemerintah di tahap tiga sebesar 405 triliun. Namun di sebelah kanan 1 dan 6 inilah yang menjadi peran BPJS Ketenagakerjaan di pasar modal bahwa kita selalu aktif di pasar surat utang, baik primer atau sekunder. Kemudian aktif selama bulan Maret itu untuk membuktikan investasi domestic itu masih berperan. Kita tidak meninggalkan pasar, tetapi kita tetap ada di pasar. Kemudian juga aktif untuk pemenuhan dana pemerintah dimana setiap lelang obligasi pemerintah, baik itu di konvensional maupun di *primary market* kita selalu masuk. Dan di bulan April ini juga kita membeli surat utang dari pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan keuangan pemerintah. Dan selama masa pandemik covid ini *fresh fund* akan kita prioritaskan ditaruh di deposito untuk memperkuat likuiditas di BPJS Ketenagakerjaan kalau ada penarikan besar-besaran JHT. Dan tentunya kita juga terus mendukung sistem perbankan nasional dengan menempatkan deposito-deposito kita di bank-bank pemerintah dan juga di bank BPD.

Demikian peran dari BPJS Ketenagakerjaan, kemudian bantuan, kemudian juga inisiatif yang kami lakukan selama wabah Covid-19 yang bisa kami sampaikan kepada Bapak/Ibu yang terhormat.

Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Dirut/Pak Agus.

Bapak/Ibu sekalian,

Kami saya informasikan terlebih dahulu, dari jumlah anggota yang hadir secara *virtual* maupun fisik hari ini ada 36 anggota, kemudian ada 9 fraksi yang telah hadir. Dan saya informasikan juga bahwa Dewas Jaminan Sosial yang hari ini hadir adalah Bapak Tubagus Ahmad Gusni/Ketua DJSN, dan Ine Mulyati/Anggota DJSN. Selanjutnya, Dewas BPJS Ketenagakerjaan yang hadir yaitu Pak Guntur Wicaksono, kemudian Pak Rekson Silaban, Pak Pompida Hidayatullah. Kemudian Direksi Ketenagakerjaan yang hadir Pak Agus, kemudian Pak Ilyas, Pak Krisna. Saya ulang, Pak Ilyas ini Direktur Kepesertaan, kemudian Pak Krisna Syarif adalah Direktur Pelayanan.

Baik, Bapak/Ibu sekalian, ini waktunya masih ada 3 menit, selanjutnya adalah pendalaman dari teman-teman Komisi IX. Tadi kita sampai jam satu (13.00), kita perpanjang setengah jam? Apa jam dua (14.00)? Apa *break* dulu? *Break* dulu setengah jam saja, setelah itu setengah dua (13.30) kita masuk lagi untuk langsung pendalaman dari Bapak/Ibu Komisi IX.

Setuju? Setuju ya. Sebelum saya ketok, saya sampaikan juga kepada Bapak/Ibu sekalian, baik yang secara *virtual*, terutama yang hadir pada kesempatan hari ini di ruang Komisi IX, dari anggota ada Ibu Nadlifah dari

PKB, kemudian Pak Saleh Daulay dari PAN, Ibu Dewi Asmara dari Fraksi Partai Golkar, dan Ibu Wulan dari Nasdem, Ibu Putih Sari dari Gerindra, dan Pak Nabil dari PDI Perjuangan. Pimpinan yang hadir di ruangan, Ibu Nini dari PKB dan saya Sri Rahayu dari PDI Perjuangan.

Baik, sekarang kita skors sampai dengan Pukul 13.30.

**(RAPAT DISKORS PUKUL ..... WIB)**

**KETUA RAPAT:**

Sudah lebih dari 10 menit. Skors kita cabut.

**(SKORS DICABUT PUKUL 13.40 WIB)**

Selanjutnya kita tentukan waktu, kita sampai jam berapa, Bapak/Ibu sekalian? Jam 16.00 ya? Oke, kita sampai Jam 16.00.

**(RAPAT: SETUJU)**

Selanjutnya saya persilakan terlebih dahulu untuk menyampaikan masukan ataupun pertanyaan. Kita mulai dari fraksi-fraksi yang ada disini dulu ya. Kita mulai yang ada dulu.

Silakan Ibu Wulan.

**F-NASDEM (Hj. SRI WULAN, S.E.):**

Terima kasih.

Pimpinan juga Rekan-rekan yang saya hormati, dan juga tamu undangan yang dalam hal ini mengikuti rapat fisik dan juga teman-teman di *virtual* sana.

Hanya sedikit menegaskan tadi apa yang sudah disampaikan untuk memperjelas saja bagaimana kita juga peran kita di dalam penanganan *covid* ini. Salah satunya tadi disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan bahwa adanya bantuan-bantuan yang mungkin sudah teralokasikan di dalam anggarannya. Tetapi ini kapan berlakunya kita juga tidak tahu, kepada siapa juga kita tidak tahu. Apakah ini *by name by address*-nya juga jelas. Terus kemudian tadi salah satunya ada yang pemberdayaan warteg yang kemudian untuk diberikan kepada ojek *online* kalau tidak salah, itu juga itu yang seperti apa, apakah mungkin ada kriteria juga. Terus kemudian disini juga ada bantuan *preventif* dan *promotive*, yaitu salah satunya bentuk kegiatannya adalah APD untuk pekerja yang berupa masker yang jumlahnya juga lumayan banyak, 615 ribu masker, kemudian multivitamin ada 123 ribu vitamin, kemudian ada paket APD yang jumlahnya juga 6.400 paket. Jadi ini juga kita belum tahu kepada siapa akan diberikannya, dan kriterianya apa. Apakah tadi saya sudah sampaikan *by name by address*-nya, kemudian vitaminnya ini apa saja, paketnya juga apa saja, maskernya itu satu orang itu dapat berapa. Itu yang pertama.

Kemudian, tadi banyak hal yang sudah disampaikan oleh Dewas juga mengenai audit yang belum selesai, itu tolong nanti dipertegas disini.

Kemudian tergerusnya dana program JHT yang mengancam ketahanan dana. Ini kita juga tidak mengerti JHT itu berapa yang nanti sudah disiapkan untuk mengantisipasi ini semuanya. Paling tidak akan ada penarikan dana yang luar biasa. Jadi ada tidak semacam analisa berapa kira-kira yang akan melakukan penarikan itu, dan berapa juga jumlah anggaran yang musti disediakan. Karena kita mengingat juga bahwa ini kalau misalnya tidak terukur kan juga akan menjadi parah untuk kita semuanya.

Mungkin itu saja, Pimpinan. Nanti selebihnya kita susulan kembali.  
Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Ibu Wulan.  
Selanjutnya, Pak Saleh.

**INTERUPSI F-GERINDRA (drg. PUTIH SARI):**

Saya dulu ya.  
Terima kasih.

Pimpinan dan juga Rekan-rekan Anggota Komisi IX yang hadir secara fisik maupun *virtual*, dari BP Jamsostek, dan Dewas, dan juga dari DJSN,

Pertama saya ingin mengomentari terkait dengan kebijakan yang dibuat secara internal oleh BP Jamsostek, yaitu kebijakan tentang *Work From Home* (WFH) yang dilakukan. Menurut saya ini tidak tepat, karena kan tupoksi dari BP Jamsostek ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, dalam hal ini adalah peserta yang dalam hal ini juga adalah pekerja. Kalau kita lihat dari aturan regulasi PSBB ini hal yang dikecualikan, kebutuhan dasar ini hal-hal yang dikecualikan, sehingga pelayanan yang seharusnya bisa dilakukan maksimal oleh BP Jamsostek ini tidak dilakukan secara *online*. Walaupun tadi sudah disampaikan tetap memberikan pelayanan secara *online* dan sebagainya, tapi tentunya *online* ini saya juga menganggap kondisi normal saja *online* ini banyak hambatan, apalagi saat ini dengan kebijakan yang semuanya *full* dilakukan secara *online*, pasti banyak kendalanya. Terlebih lagi juga *online* menambah beban juga untuk peserta, dalam hal ini teman-teman pekerja. Selain mereka harus menyiapkan kuota lebih untuk mengakses *online* tersebut, *internet*, banyak juga pekerja yang sebenarnya juga gagap teknologi, tidak paham dengan hal-hal berbau teknologi, terutama mereka yang mungkin akses *internet* susah, tidak pahami bagaimana mekanisme *online* itu seperti apa, karena sosialisasi juga yang kurang. Belum lagi mereka juga pasti pemenuhan secara administrasi kan harus *scanning* dan lain sebagainya, ini tentu ada biaya-biaya lebih yang memang jadi beban tersendiri untuk para pekerja.

Lalu yang selanjutnya apa yang sudah dilakukan oleh BP Jamsostek. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Wulan, tentu saja memang banyak hal-hal yang menurut saya masih jauh dari maksimal. Terutama yang pertama ini terkait dengan perlindungan kepada pekerja migran. Di Malaysia sendiri ratusan ribu kalau kita lihat jumlah PMI kita yang ada di Malaysia. Apa yang sudah dilakukan oleh BP Jamsostek ini masih jauh dari kebutuhan. Bahkan

yang terdaftar sudah menjadi peserta BP Jamsostek ini mungkin nanti bisa di konfirmasi berapa jumlahnya. Dan itu saya mendapatkan informasi bahwa mereka juga belum tersentuh sama sekali, dan mereka masih mengalami krisis kebutuhan pangan. Sama, gagap teknologi juga. Lalu sulit juga menjangkau bantuan yang rata-rata sentralnya ada di KBRI, sedangkan PMI kita tersebar di daerah-daerah, ada yang di perkebunan dan lain sebagainya yang memang jauh dari konjen ataupun juga kantor KBRI kita. Dan teknis apa yang sudah dilakukan tadi disampaikan sudah ada pembagian 73.000 masker, 2.700 botol *hand sanitizer*. Ini seperti apa di negara-negara penempatan PMI kita, mekanismenya seperti apa.

Lalu yang selanjutnya sama saya kira tadi bantuan dalam masa pandemic *covid-19* ini. Memang baru rencana, tapi tentu dari rencana ini kalau kita lihat jumlahnya juga masih sangat jauh. Mungkin bisa disampaikan juga dari jumlah peserta lah yang hari ini terdaftar sebagai peserta BP Jamsostek pekerja-pekerja kita itu berapa. Karena sampai dengan hari ini banyak pekerja kita yang mau tidak mau memenuhi sendiri APD nya. Yang mereka masih bekerja di industri-industri tertentu masih melakukan aktifitas pekerjaannya mereka justru memenuhi alat pelindungnya sendiri, tidak ada sama sekali bantuan dari perusahaan maupun juga dari BP Jamsostek sendiri. Ini yang harus kita kejar saya kira BP Jamsostek ke depan untuk bisa melindungi para pekerja kita. Terutamanya paling tidak mereka yang memang sudah terdaftar sebagai peserta di BP Jamsostek. Kan jelas harusnya ya, *by name by address*-nya ada. Baik yang bekerja secara formal maupun juga peserta yang bukan penerima upah, itu juga harus saya kira menjadi sasaran utama yang sangat besar kemungkinan terkena dampak dari pandemic ini. Karena rata-rata PBPU itu adalah UMKM, industry kecil menengah, yang pasti hari ini juga terkena dampak cukup besar. Ini yang saya kira perlu dipertegas kedepan untuk bisa menjadi prioritas di dalam program BP Jamsostek.

Lalu yang selanjutnya titipan pertanyaan. Sebelum titipan pertanyaan, ada satu hal terkait dengan pencairan JHT. Pencairan JHT yang kita tahu dengan maraknya PHK hari ini, kalau tidak salah itu sudah 1,5 juta tenaga kerja kita yang di PHK ataupun juga dirumahkan, sehingga mau tidak mau banyak yang memanfaatkan pencairan JHT. Ini ada kebijakan di dalam pencairan JHT itu ada yang namanya (suara tidak jelas). Saya mau tanya, (suara tidak jelas) ini dasar regulasinya seperti apa uang yang harus dibayar oleh pekerja untuk daftar ulang sebagai peserta BP Jamsostek di segmen pekerja informal setelah mereka mengklaim jaminan yang ada di BP Jamsostek ini seperti apa regulasinya, dasarnya itu.

Selanjutnya dari titipan pertanyaan dari rekan Poksi Gerindra Komisi IX. Yang pertama dari Pak Sutan Nabel yang tentunya mengapresiasi ada beberapa langkah cepat tanggap BP Jamsostek dalam menghadapi wabah Covid-19 ini dengan berbagai program, tadi APD, pembagian vitamin, *hand sanitizer*, dan lain sebagainya. Hanya tentu harus lebih jelas lagi disampaikan seperti apa mekanismenya bagaimana proses dari pembagian program-program tersebut. Dan harapannya juga untuk pasien positif Covid-19 dan Pasien Dalam Pemantauan yang juga harus di isolasi dan tidak memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, BP Jamsostek juga bisa turut serta memberikan bantuan untuk kehidupan sehari-harinya.

Yang kedua, diharapkan BP Jamsostek menyiapkan skema bantuan pendanaan untuk membantu para pekerja yang mengalami PHK karena corona.

Dan yang ketiga, BP Jamsostek di dalam pemaparan membahas program jaminan kecelakaan kerja dan program jaminan hari tua bagi pekerja yang mengalami ODP, PDP, maupun positif *covid* dan meninggal akibat *covid*.

Ini dukungan saya kira dari Pak Sutan Nabil untuk bisa terus dilanjutkan.

Yang selanjutnya dari Ibu Melyana. Pertanyaannya yang pertama adalah seberapa besar efektifitas layanan klaim secara *online* yang dilakukan oleh cabang-cabang dalam merealisasikan klaim. Saat ini banyak tenaga kerja yang terdampak. Bahkan kedepan pekerja yang terkena PHK akan semakin meningkat dan akan melakukan klaim yang sama.

Yang menjadi pertanyaan, apakah BP Jamsostek siap menghadapi klaim, baik dari sisi pelayanan maupun dari sisi kecukupan dana? Karena diperkirakan tentu klaim tersebut akan bernilai triliunan rupiah. Dutinya darimana, anggarannya seperti apa, likuiditas keuangannya seperti apa. Kalau jual saham saat inipun masih rugi. Jual obligasi pemerintah, pemerintah saja jual Surat Utang Negara (SUN). Lalu cairkan deposito sebesar itu bank daerah juga tidak akan sanggup, duitnya karena banyak ditarik secara besar-besaran. Ini tentu akan berpengaruh secara luas kepada ekonomi.

Yang kedua, terkait dengan stimulus yang diberikan terhadap krisis Covid-19 harus hati-hati, dan dipastikan bahwa dana yang diberikan tidak mengganggu dana peserta. Dan harus sesuai juga dengan aturan. Karena BP Jamsostek itu dasar aturannya adalah undang-undang, jadi tidak bisa dibijaki dengan keputusan Direksi semata. BPJS itu hanya sebagai pelaksana saja, jadi tentu harus koordinasinya jelas.

Dan yang ketiga, bagaimana cara penanganan atau strategi yang diambil oleh direksi untuk menghadapi penurunan indeks saham yang sangat dalam hari ini.

Itu saya kira pertanyaan dari Poksi Gerindra.

Terima kasih Pimpinan.

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih Ibu Putih.

Pak Saleh, silakan.

#### **F-PAN (Dr. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A.):**

Terima kasih.

*Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,*

Ibu Pimpinan beserta seluruh Anggota yang hadir di ruangan ini dan juga yang *virtual*, terutama Banganda Ansory Siregar yang saya kira juga masih ikut,



Yang saya hormati Bapak-bapak dari DJSN, ada Bapak Kepala DJSN, kemudian Direktur Utama BPJS dan juga Dewas beserta seluruh jajaran direksi yang hadir,

Saya tidak menunjuk satu persatu ke direksi mana yang saya tanya, tapi mungkin nanti bisa dijelaskan. Pertama saya bertanya ke DJSN dulu, pertanyaannya sederhana saja, sejauhmana keterlibatan DJSN ini di dalam melakukan pengawasan dan pengelolaan dana BPJS Ketenagakerjaan. Jangan-jangan kan di dalam regulasi ternyata tidak masuk misalnya seperti itu, seperti apa?

Pertanyaan kedua, ini ke BPJS secara umum, bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Dewas terhadap penempatan dana BPJS Ketenagakerjaan ini. Walaupun tadi saya lihat paparannya panjang ini, angka semua. Ini agak aneh ini sebetulnya, Dewas ini justru yang lebih banyak memaparkan angka kepada kita ini. Kalau saya kan berpikirnya itu mestinya yang memaparkan angka itu lebih banyak direksi, kalau ini saya lihat justru malah lebih banyak disampaikan oleh Dewas. Makanya saya mau bertanya ini, sebetulnya pertanyaan ini sudah berulang, tapi ini penting juga untuk mengingatkan kita kembali soal peran daripada Dewan Pengawas ini.

Kemudian yang ketiga, pada halaman 14 dari paparan ini sebaran instrument yang disampaikan disini itu ada instrument deposito, saham, reksadana, surat utang, penyertaan, dan property ini. Ini nanti boleh dijawab oleh direksi, boleh juga oleh Dewas. Dari semua instrumen itu kira-kira yang paling menguntungkan itu di sektor yang mana, di instrument yang mana ini yang ini?

Kemudian pertanyaan berikutnya, sekarang kan ternyata dana BPJS Ketenagakerjaan ini sudah luar biasa besar. Dulu waktu saya pertamakali bergabung di Komisi IX ini tahun 2017 itu dananya masih sekitar 320 triliun itu, sekarang ternyata sudah 463,3 triliun, dan ini saya kira angka yang sangat besar. Bisa jadi kalau 5-6 tahun ke depan itu bisa 800 triliun, bisa hampir sepertiga dari APBN kita misalnya. Karena itu saya ingin bertanya ini, dari yang 463,3 triliun ini sebetulnya berapa dana hasil investasi yang diperoleh dari situ, berapa keuntungannya. Inikan ditempatkan/diinvestasikan di banyak tempat, keuntungannya berapa, sehingga kita bisa proyeksikan ini kira-kira tahun berapa ini uang supaya jadi angka berapa. Kemudian berapa dana hasil dari iuran. Jadi kan ada dua sebetulnya, ada penempatan, ada iuran. Kita mau dengar ini, iuran itu sebetulnya sekarang dari 463 ini iuran itu nilainya berapa? Itu uang rakyat itu. Kemudian ada keuntungan dari investasi. Itu tidak langsung uang rakyat, tapi adalah uang rakyat yang di investasikan, hasilnya itu. Jadi ada komponen itu yang bisa dijelaskan.

Yang berikutnya yang ingin saya tanya adalah ditengah suasana Covid-19 seperti sekarang ini apakah ada penurunan pembayaran iuran dari peserta, dari juga perusahaan-perusahaan? Karena tadi sudah disinggung oleh Ibu Putih Sari ada juga sekarang per 3 minggu yang lalu sudah 1,5 juta orang yang terdaftar di PHK. Berarti kan perusahaan-perusahaannya bermasalah itu, artinya kekurangan likuiditas, sehingga mereka mencari jalan terakhir untuk mem-PHK orang. Apakah misalnya itu berpengaruh pembayaran iuran? Jika itu berpengaruh kan tentu akan berpengaruh juga pada sistem keuangan dan likuiditas BPJS itu sendiri.

Kemudian yang berikutnya apa saja langkah-langkah yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk mengantisipasi sehingga tidak terjadi *problem* didalam pembayaran iuran itu? Jadi supaya iuran itu tetap jalan sebagaimana mestinya itu.

Kemudian, Bapak-bapak dari BPJS, itu kan pemerintah sering itu pinjam uang BPJS/sering dipakai dalam bentuk surat utang, itu sekarang sudah berapa utang dari negara ke BPJS ini, berapa lagi yang bisa dikasih *spare* untuk kita utangkan ke negara. Karena sekarang negara melalui Perpu Nomor 1 Tahun 2020 itu ingin mengutang lagi ke luar negeri. Maka angka yang 405,1 triliun itu sebetulnya salah satu sumbernya itu nanti kelihatannya adalah utang luar negeri. Kita mau tanya, ini uang kita di BPJS ini berapa. Daripada kita utang luar negeri, kita hitung-hitung dulu dalam negeri, jangan-jangan utang dalam negeri kan bisa. Apalagi bunganya saya dengar malah besar itu. Malah sekarang tenornya sampai 50 tahun. Ini jadi pertanyaan serius apakah misalnya *resources* kita dalam negeri ini bisa dipakai untuk menutupi hal-hal seperti itu.

Kemudian saya bertanya hal-hal yang lebih sedikit minor, agak kecil-kecil, ini terkait dengan pemberian bantuan-bantuan yang dilakukan oleh BPJS semasa Covid-19 ini. Misalnya di sini ada penyebutan pemberian masker, *hand sanitizer*, untuk PMI. Di Indonesia sudah dibagi 10.000 masker ini, kemudian *hand sanitizer*-nya 2.000. Di Hongkong 8.000, di Taiwan 24.000, kira-kira begitu yang saya baca di sini.

Saya ingin bertanya, ini dasar penyebutan angka-angka seperti ini, misalnya di Hongkong 8.000, di Taiwan 24.000, itu apa dasarnya? Kemudian, kenapa Malaysia tidak masuk disini. Malaysia inikan jumlah PMI kita itukan besar juga, tapi saya tidak lihat ini. Malah di Taiwan itu yang warga kita diperlakukan dengan baik. PMI kita itukan paling baik itu diperlakukan di Taiwan, ini sudah 24.000. Di Malaysia sekarang mereka menjerit disana. Saya bisa tunjukkan kepada Bapak video-video yang dikirimkan langsung oleh PMI kita kepada kami di Komisi IX ini terkait dengan penderitaan mereka. Disamping mereka tidak bisa bekerja, kemudian tidak ada hak gaji, kemudian mereka juga sekarang ter Bengkalai karena bantuan-bantuan sosial yang diberikan kepada mereka tidak sampai, dan ada yang terancam tidak makan, dan lain sebagainya itu. Ini kelihatannya tidak menjadi perhatian BPJS Ketenagakerjaan.

Kemudian yang kedua, yang teknis juga ini yang soal bekerjasama dengan 150 warteg di wilayah DKI Jakarta ini. Pertanyaan pertamanya, ini mengapa hanya Jakarta? Kenapa tidak di Surabaya, Medan, Makassar, inikan juga daerah-daerah yang terdampak juga semua ini. Seperti Bandung juga termasuk besar, Semarang juga termasuk besar. Bahkan sekarang juga saya dengar malah perawat-perawatnya dan dokter-dokternya itu di isolasi, ada 46 orang sekarang di isolasi karena terpapar.

Kemudian pertanyaan yang kedua, 150 warteg ini penunjukannya seperti apa persebarannya? Ini teknis ini, Pak Nabil, tapi penting menurut saya.

Kemudian, ini kan yang makan di situ ojek *online*. Pertanyaan seriusnya, apakah mereka ini diminta alamat, nomor telepon, dan namanya? Atau siapa saja boleh datang? Atau misalnya dia pokoknya kalau dia pakai baju Ojol, berhenti, makan. Tadi warteg itu seperti apa kan perlu dijelaskan. Karena kalau misalnya mereka tidak punya nama, tidak punya nomor telepon,

tidak punya alamat, ini bisa kita periksa lagi ini berapa sehari orang makan disitu. Jumlah orang yang makan berapa kali 150 warteg ini, kali berapa uang.

Kemudian yang berikutnya, inikan ada relawan-relawan ini, 18.355 relawan Covid-19 yang terdaftar di BNPB per 10 April. Yang Bapak bantu berapa relawan ini? Apakah yang 1.240 ini saja, sisanya bagaimana? Kemudian bagaimana proses kerjasamanya dengan BNPB ini? Dari sisi mana Bapak bisa bekerjasama dengan mereka? Apa yang Bapak sumbangkan kepada mereka? Ini saya lihat kan ada APD bagi tenaga medis ini, kelihatannya belum kedengaran BPJS Ketenagakerjaan berkontribusi. Malah justru perusahaan yang pidato kemarin yang katanya sudah menemukan vaksin, sampai heboh juga videonya. Malah itu yang pidato disitu. Ini penting, Bapak/Ibu/Saudara, supaya kita juga lihat ini kinerjanya BPJS Ketenagakerjaan ini. Soalnya, Bapak/Ibu, terutama para Direksi yang saya hormati, Komisi IX tidak tahu ini ada pembagian-pembagian begini. Ternyata luar biasa kan sebetulnya kedermawanannya BPJS Ketenagakerjaan ini yang tanpa kita ketahui.

Lalu pertanyaan saya yang mengikat dengan itu dan mengikat dengan ini adalah sebetulnya yang disumbangkan itu dananya dari mana sumbernya? Apakah dari yang tadi, investasi tadi diambil sedikit-sedikit, atau keuntungan dari investasi itu. Atau, apasih namanya itu CSR nya itu. Kan ada istilahnya itu. Bukan CSR namanya kalau di BPJS ini, tapi adalah. Apakah itu? Kalau itu sebesar apa angkanya? Karena kemarin waktu kita diskusi disini kita minta supaya membuka data CSR nya supaya kita dibagi, katanya tidak bisa dibagi lagi, karena masih menutupi CSR yang tahun lalu. Itu kalau tidak salah kemarin jawabannya. Karena tahun lalunya itu kurang, sekarang ini tidak bisa dipakai. Ini berarti dana darimana bisa muncul tiba-tiba ada. Ini merupakan bagian yang penting kita untuk ketahui.

Yang berikutnya yaitu soal bantuan preventif dan promotif pada halaman 15. Disitu ada disebutkan, ada APD untuk pekerja berupa masker kain 615.000, multivitaminnya 123 ribu. Saya tidak tahu ini multivitamin seperti apa ini. Apakah vitamin C, vitamin E, belum ada penjelasan. Kemudian ada paket APD untuk penanganan Covid-19 di pusat layanan kecelakaan kerja sebanyak 6.400. Ini mohon dijelaskan ini kira-kira mekanisme pembagiannya seperti apa, target sasarannya siapa, akan dibagi dimana, distribusinya seperti apa, penentuan tempat dan lokasinya itu seperti apa, sehingga dengan demikian kita punya data yang jelas terkait dengan ini.

Kemudian pada halaman 16, kan ada momentum *mayday* katanya, disana akan ada bhakti sosial. Ini bhakti sosial seperti apa ini yang dimaksud bhakti sosial. Apakah hanya pakai pajangin spanduk saja. Atau ada bhakti sosial pembagian bantuan sosial, misalnya sembako atau yang lain-lain. Tolong kalau misalnya itu ada dijelaskan juga jenis-jenis bhakti sosialnya seperti apa, akan dibagi kepada siapa, jumlahnya berapa, dimana tempatnya, sehingga kita bisa melakukan pengawasan yang lebih detail.

Jadi saya kira itu dulu. Kebetulan teman-teman yang lain juga masih ada kesempatan untuk bertanya. Demikian dari fraksi saya, Fraksi Partai Amanat Nasional.

*Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumsalam.*

Terima kasih Pak Saleh.  
Selanjutnya Pak Nabil, silakan.

**F-PDIP (MUHAMAD NABIL HAROEN, S.P.D., M.Hum.):**

*Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi IX, para Mitra Kerja,

*Alhamdulillah* hari ini akhirnya Dewas BPJS Ketenagakerjaan dihadirkan juga, jadi kelihatan ada gunanya.

Pertama saya ingin menyampaikan pertanyaan titipan dari poksi PDI Perjuangan, dari Ibu Dewi Aryani. BKKBN menggunakan dana APBN, konsultasi ke BPK dulu. Kalau BPJS Ketenagakerjaan menggunakan dana CSR ini apakah tanpa ijin BPK. Dan mereka juga sudah melaksanakan program sembako untuk ojol dan lain-lain. Ini mohon penjelasannya.

Kemudian berikutnya, kalau tadi Pak Saleh Daulay menyampaikan bahwa berapa keuntungan dari investasi BPJS Ketenagakerjaan ini. Kalau saya sebaliknya, saya justru ingin tanya berapa *potential lost*-nya. Tentu ada *potential lost* dan angkanya berapa, nanti saya minta jawaban dari Pak Dirut. Nanti setelah dijawab berapa *potential lost*-nya, baru saya akan perdalam lagi.

Kemudian berikutnya ini untuk Dewas BPJS Ketenagakerjaan atas nama Pak Pompida. Saya pernah melihat tayangan Bapak di salah satu stasiun TV swasta, Bapak bicara soal mafia-mafia BPJS Ketenagakerjaan. Ini mumpung rapat tertutup, tolong dibuka disini. Kita ingin tahu mafianya kayak apa dan seperti apa. Jadi silakan dibuka di ruangan ini supaya kita tahu, supaya tidak menjadi *syak wasangka*. Waktu itu ada di salah satu stasiun TV swasta, kalau tidak salah program *one on one*. Mungkin Pak Pompida masih ingat. Dan banyak sekali, tidak hanya disitu, beberapa media Pak Pompida juga sering menyampaikan. Namun karena itu di ruang publik mungkin agak sulit berbicara. Tapi ini rapat tertutup, saya kira kita bisa bicara apa adanya, dan saya kira itu menjadi hak dari Anggota Komisi IX untuk bertanya itu, dan menjadi kewajiban dari Pak Pompida untuk menjawabnya.

Mungkin itu dulu, Pimpinan.  
Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Nabil.  
Selanjutnya Ibu Dewi, silakan.

**F-PG (Hj. DEWI ASMARA, S.H., M.H.):**

Terima kasih.

Pimpinan, para Mitra Kerja, BPJS dan Rekan-rekan Komisi IX, baik yang hadir maupun yang *virtual*.

*Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

Berdasarkan Undang-Undang SJSN dan BPJS mengamanatkan, bahwa amanatnya adalah pengelolaan dana jaminan sosial tentunya dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta. Dari sini saya garisbawahi, semua yang dilakukan ini/yang dikelola adalah bukan dana negara, tetapi adalah dana peserta.

Oleh karena itu tentunya dalam rangka kita sekarang ini tahu yang dikelola dana pekerja itu adalah 460 triliun. Tentunya ini harusnya kami harap dapat menciptakan program inisiatif baru. Jadi jangan yang itu-itu saja. Pengertian daripada Undang-Undang SJSN maupun BPJS untuk pengembangan program sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta. Saya disini tidak melihat terobosan, hanya itu-itu saja. Apakah kemudian investasinya di saham, kemudian membuat ada CSR dan lain-lain, apa program perumahan dan lain-lain. Dimana program inisiatif, terutama dalam pandemic *covid* saat ini. Sementara kami melihat ada cukup ruang lebar dalam pemanfaatan dana operasional sebagaimana tercantum dalam PMK Nomor 224 Tahun 2019 tentang Dana Operasional BPJS TK Tahun 2020 dimana Kemenkeu menetapkan tahun 2020 besarnya 5,2 triliun. Alokasi program vokasi disini memang hanya 260 miliar, yakni sebesar 5 persen. Jumlah ini tentunya berkurang. Kalau kita bandingkan 2019 saja yang lalu itu adalah 296 miliar. Tentunya kalau kita melihat Pasal 13 PMK, di dalam peraturan itu disebutkan bahwa dalam hal dana operasional yang disebut Pasal 2 tidak cukup untuk mendanai operasional penyelenggara program jaminan sosial ketenagakerjaan karena terdapat kebutuhan operasional baru atau inisiatif kegiatan baru, maka BPJS dapat mengajukan usulan perubahan dana operasional pada Menteri Keuangan. Jadi kalau Bapak tidak ada inisiatif program baru ya mungkin di tolak itu, mungkin-mungkin saja, karena memang belum ada/belum saya lihat setidaknya-tidaknya saat ini. Kalau hanya itu-itu saja, tidak ada inisiatif baru, padahal kita sama-sama tahu ini pandemik. Kalau Bapak bilang potong gaji, mohon maaf, itu bukan kebijakan BPJS. Itu kebijakan pribadi. Saya rasa jangankan Bapak, semua DPR RI, DPRD, seluruh Indonesia banyak yang melakukan itu. Itu sumbangsih kita pribadi, beramal, *shodaqoh*. Tetapi kebijakan Bapak memimpin BPJS ini, Bapak kelola, apa inisiatifnya program baru, dimana. Bukan yang dari pribadi. Kalau yang pribadi-pribadi kita juga harus sama-sama tahu *lah*, beda Pak. Tapi kalau Bapak buat program baru itu menyangkut penilaian atas kinerja Bapak, apa kegiatan barunya dalam rangka pandemik ini. Itu dimungkinkan di peraturan PMK sebagaimana dicantumkan pada Pasal 13. Sementara kita tahu kalau besaran dana operasional yang tadi ditetapkan itu kan penelaahannya atas rancangan kerja dengan memperhatikan kelayakan dan kepatutan. Oleh karenanya kami ingin tahu sejauhmana upaya optimal BPJS TK untuk memperluas pemanfaatan dana tersebut, baik dengan inovasi maupun apa upaya optimal yang lain. Kalau belum inovasi, apa upaya optimal.

Kalau tadi upayanya untuk pandemik ini bagi-bagi ke Ojol, tidak jelas, apa memang iya. Seperti tadi Pak Saleh bilang, apa ada nama *by name by*

*address*. Sementara Bapak mensyaratkan yang lain harus secara detail. Bukankah bantuan itu kemana-mana, apa iya harus seperti itu. Sementara kementerian lain saja juga bisa salah-salah datanya. Mana coba, tunjukkan sama kita ada tidak. Hari ini mana yang Bapak sudah bagikan? Ada tidak *by name by address*-nya? Dan dari mana? Jawab nanti pertanyaan teman-teman, itu saya inginkan secara detail.

Kemudian BPJS ini kan tentunya harus membuat kebijakan yang membantu risiko sosial ekonomi bagi pekerja sebagai pemilik dana tersebut. Jadi jangan hanya mikirin kalau pensiun, kalau meninggal, itu biasa-biasa saja. Kan BPJS yang mengelola uang pekerja. Sekarang kan ada risiko ekonomi, bukan hanya program yang itu-itu juga, dia meninggal, dia kecelakaan kerja. Tidak ada pandemic juga orang meninggal, orang juga PHK. Inikan PHK yang mereka tidak inginkan. Oleh karenanya tentunya saya berharap benar-benar ini dituntut. Yang para direksi bukan hanya duduk dan mengelola dengan program yang itu-itu saja. Harusnya ada *sense of responsibility*, saya ini bisa di gaji dan punya karyawan karena uangnya para pekerja, saya harus sensitif. Sekarang orang yang menggaji saya iuran pekerja itu sekarang lagi susah, banyak di PHK, saya harus buat apa dengan uang mereka, terobosan. Harus ada rasa keprihatinan. Bukan cuma sekedar tidak digaji, mana kita tahu. Kita masing-masing juga meski punya *lah* tabungan biar tidak digaji berapa bulan. Tidak begitu, kita harus putar otak. Apalagi satu sisi kalau kita lihat dana kelola BPJS Tenaga Kerja, berdasarkan data Dewas hari ini per Maret 2020 402 triliun. Kalau kita lihat inikan turun kalau dibandingkan tahun 2019 itu 431 triliun. Ini bagaimana? Jadi inikan ada *potential lost* dan ada yang lain-lain juga kan, itu seperti apa, tolong dijelaskan. Jangan nanti misalnya, "Oh ini karena kemarin pandemik covid, preminya tidak lancar." Ini nanti. Tapi kan kita bicara dana dulu kenapa turun. Itu kan juga harus kita bahas. Ini kan rapat tertutup, jadi hal itu perlu dijelaskan.

Yang ketiga, kemarin Ketua Kadin di Komisi XI memaparkan imbas pandemik ke industri pariwisata dan UMKM, dimana di sektor pariwisata minggu pertama itu sudah 1.266 hotel di seluruh Indonesia menutup sementara, sehingga otomatis total karyawan terdampak itu banyak. Kalau sektor pariwisata mungkin di Komisi XI UMKM-nya. Tapi kalau buruhnya/pekerjanya itu ada di kita juga. Yang di-PHK di Kementerian Tenaga Kerja. Sekali lagi, ini kan semakin menguatkan. Bahwa uang pekerja/bayar pekerja dikelola Bapak, apa inisiatifnya. Sementara secara nasional data tinggi karyawan yang dirumahkan dan di-PHK, Kadin ini kan akan mengajukan relaksasi, pasti, dan keringanan bayar premi BPJS. Untuk itu kita juga perlu tahu apa ini skenario usulan kebijakan pemerintah untuk membantu para pekerja yang terdampak dalam kaitan skenarionya BPJS ini apa perlu kita tahu, karena para pekerja itu secara hasil-hasil pekerjaannya UMKM dan pariwisata ada di XI, tapi karyawan yang ter-PHK dan segala urusannya ada di sini di komisi kita.

Dan BPJS ini mengelola uangnya pekerja, makanya saya sangat berkepentingan. Bapak ada, Bapak dapat pekerjaan Dewas dan Direksi karena uangnya para pekerja. Kalau tidak ada itu iuran premi pekerja tidak ada BPJS Tenaga Kerja ini. Jadi kalau kemudian juga nanti mereka mengajukan relaksasi, Bapak kan tadi bilang berarti kami akan turun, nanti preminya akan begini-begini. Terkesan saya itu satu konsekuensi logis. Tapi

terus apa? Jangan nanti yang ada saja Bapak belum buat inisiatif program baru, nanti alasannya dananya turun makin *melempem* lagi. Tidak bisa begitu. Justru Bapak harus lebih kerja keras lagi, harus bagaimana. *Wong* kalau tidak ada iurannya tidak ada Bapak-bapak kerja, kita tidak akan ketemu disini. Mungkin ketemu dalam bidang lain, Bapak mungkin pengurus yang lain, Dewas yang lain barangkali.

Yang ketiga titipan rekan saya, Pak Yahya Zaini. Seandainya Bapak sudah punya program baru, Bapak sudah ajukan kepada Menteri Keuangan, kalau memang masih sulit bukan tidak mungkin bahwa harus bisa *aware*. Bapak bisa meminta fatwa kepada Mahkamah Agung. Kan ini ada kejadian luar biasa yang berdampak para pekerja susah. Orang yang dikelola itu uang pekerja, boleh-boleh pekerja juga meminta haknya. Jangan menunggu saya mati, nunggu saya hari tua, sekarang saja saya sudah tidak bisa makan. Uang saya bisa menjadi sesuatu, bagaimana caranya, apa bentuknya, tolong buat. Payung hukumnya dirubah bagaimana caranya sehingga saya bisa menikmati. Bukan jalan Baksos saja atau apa. Yang Bapak bilang ini tadi kan ada ini melalui apa itu tadi, pokoknya kegiatan-kegiatan yang kayak pelatihan, vokasi. Mau vokasi lewat ini, lewat itu. Ini bagaimana dulu.

Memang pemerintah sudah mengadakan program-program jaring pengaman sosial. Tapi jaring pengaman sosial itu bukan buat pekerja, bukan berdasarkan profesi. Berdasarkan mereka yang miskin, hampir miskin, atau apa, ada kriterianya. Kalau pekerja ini mereka adalah bukan hanya buruh, bisa terjadi golongan menengah. Mereka kalau secara tampilan fisik punya rumah. Tapi begitu mereka dirumahkan, yang biasanya bisa bayar kredit motor mungkin, apa kredit rumah, jadi tidak bisa. Mereka butuh iuran yang selama ini mereka iur preminya. Bapak lah harapan dari kaum menengah yang tidak mendapatkan jaringan pengaman sosial yang diurus oleh Menteri Sosial, mereka tidak dapat. Mau ikut pra kerja, yang menganggur banyak, pra kerja tidak mencukupi kuotanya. Uangnya ada di Bapak, masa dari sekian ratus triliun tidak bisa. Kalau Bapak takut mau mencairkan asset, takut KPK, takut ini-takut itu, peraturannya begini-begitu. Makanya saya bilang buat program baru, Bapak ajukan ke Menkeu. Kalau tidak bisa mintalah fatwa hukum. Apapun caranya Bapak harus bisa. Itu uang pekerja, jangan nunggu mati. Ini bukan uang yang harus berbunga-bunga bisa dinikmati oleh semua yang bekerja disitu, tapi tidak bisa dinikmati oleh pekerja ketika mereka butuh. Harus bisa pokoknya, orang itu memang uang mereka kok bisa mereka tidak dapat manfaat. Mau suruh pemerintah hutang lagi, terus dari hutangnya baru disalurkan lagi lewat *social fastinet*. Tidak bisa. Harus bisa dipakai, pakai fatwa hukum. Kalau tidak ya bisa juga kita *judicial review*, kenapa tidak. Pokoknya bagaimanapun caranya harus bisa. Langkah pertama yang dimungkinkan oleh peraturan PMK adalah Bapak tolong buat program baru. Jadi ada alasan, karena dasar hukumnya ada. Langkah kedua minta fatwa.

Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pada intinya adalah jangan beralasan tidak bisa membantu pekerja karena dana operasional terbatas. Kemudian yang kedua, karena dana operasional itu harus kita ajukan kepada Menteri Keuangan. Yang ketiga, kita kesulitan karena kekurangan iuran dan lain-lain. Kalau bicara susah, semua juga lagi susah, semua juga lagi pusing. Kepala daerah juga pusing APBD nya mau dipakai. Tapi kalau Bapak? Makanya tadi saya ingatkan, sejalan yang Pak Saleh bilang, mungkin pemerintah ada dana yang dipakai dalam bentuk surat utang. Entah itu

pengujian investasi di infrastruktur atau di *bond* pemerintah, atau apapun. Tapi *cash*-nya berapa? Kan tentunya aset itu tidak semuanya Bapak likuid apa tidak likuid. Kalau memang tidak likuid, yang bisa likuid apa, buat terobosannya bagaimana, itu yang saya maksud.

Jadi kita juga maklum bahwa tidak segampang saya ngomong seperti gigit cabai terus langsung besok bisa, tapi *at least do something about it*. Tolong, itu uang pekerja yang membuat Bapak bisa di gaji, jadi biarkan para pekerja itu juga bisa menikmati dikala mereka susah. Jangan tunggu mati, jangan nunggu kecelakaan.

Mungkin itu saja.

Terima kasih Pimpinan.

*Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumsalam.*

Terima kasih Ibu Dewi.  
Selanjutnya Ibu Nadlifah.

**F-PKB (Hj. NUR NADLIFAH, S.Ag., M.M.):**

Terima kasih.

*Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

Pimpinan Komisi IX, Bapak/Ibu Anggota DPR Komisi IX yang hadir maupun yang *virtual* yang saya hormati,  
Bapak Dirut BPJS beserta seluruh jajarannya,  
Bapak Dewan Jaminan Sosial Nasional beserta seluruh jajarannya yang saya hormati,

Saya tidak banyak, karena tadi teman-teman sudah menyampaikan banyak hal. Saya cuma mau beberapa hal saja. Tadi disampaikan bahwa JHT ini masih menjadi produk andalannya dari jaminan sosial, sementara sekarang kepesertaannya menurun otomatis iurannya menurun. Dan kalau iurannya menurun otomatis uang yang diterima menurun, otomatis juga uang yang diinvestasikan menurun. Uang yang diinvestasikan menurun dalam kondisi ekonomi yang seperti ini hasilnya pun menurun. Dan ini tidak hanya berhenti di bulan ini, mungkin bulan depan dan bulan depannya lagi juga masih menurun. Iurannya menurun, kepesertaan menurun, dan seterusnya. Antisipasinya seperti apa, sementara roda jaminan ini harus berjalan terus. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, banyak karyawan yang dirumahkan, bahkan terancam PHK. Yang sudah di PHK banyak yang dirumahkan. Sementara tadi dari BPJS melakukan memberikan bantuan ini, bantuan itu, dan lain sebagainya. Ini sasarannya kemana? Apakah mereka yang ter-PHK dan dirumahkan itu terdata. Dan apakah mereka ikut kepesertaan BPJS sehingga bisa mendapatkan itu semua?



Tadi disampaikan juga bahwa banyak perusahaan yang sekarang mulai berhenti berusaha, kesulitan keuangan, dan pasti akan minta keringanan pembayaran iuran untuk tenaga kerjanya. Ini juga perlu diantisipasi menurut saya. Jadi dalam kondisi pandemic seperti ini dengan segala kelemahan dan segala menurunnya roda ekonomi yang membuat kepesertaan dan iuran menurun, langkah-langkah apa/antisipasi apa yang sudah disiapkan dari pihak BPJS untuk menjaga agar tidak sampai bangkrut. Sementara disebutkan disini di halaman 21 'perlindungan JHT saat *covid*', yang nomor 2 'peserta ter-PHK dapat langsung mengajukan klaim JHT 100 persen secara *lumpsum* setelah masa tunggu satu bulan. Ini kesiapannya seperti apa, sementara banyak karyawan dari BPJS juga yang harus kerja dari rumah. Layanannya seperti apa sehingga pencairan ini benar-benar cepat. Jangan sampai iuran premi mereka yang untuk jaminan hari tua ini ketika mereka bisa cairkan dalam pandemic *covid* ini bertele-tele pencairannya. Orang sudah susah makan, hari ini orang sudah banyak susah makan. Saya sendiri banyak tetangga itu yang dirumahkan, susah makan, itu banyak, dan mencairkan juga susah. Ini jangan sampai, sehingga kesiapan dari infrastruktur BPJS harus benar-benar *ready*. Meskipun tidak harus tatap muka, tapi layanan ini cepat. Kalau biasanya layanan itu 14 hari kerja, tolonglah dipercepat, sehingga orang yang kondisi susah tidak ada pemasukan ini bisa tetap makan, bisa tetap hariannya jalan. Dan ditambah lagi anak-anak harus belajar di rumah, mereka harus bisa beli kuota. Kalau tidak, anaknya tidak bisa belajar. Kalau memang andalannya itu dari JHT ya dipercepat. Ini mekanisme pencairannya mungkin sedikit berbeda dengan yang normal. Saya rasa harus mendapat perlakuan khusus yang tanpa mengurangi aturan yang ada.

Kemudian masih di halaman 21. Tadi ditambahkan disampaikan oleh Pak Dirut bahwa ada poin nomor 3, yaitu yang ter-PHK yang sumber dananya dari pemerintah yaitu menggunakan kartu pra kerja. Bapak menyampaikan juga bahwa datanya sudah akan diserahkan hari ini atau besok tadi. Pertanyaan saya, apakah data yang Bapak serahkan itu dijamin 100 persen akan lolos? Karena yang saya tahu untuk masuk dan diterima sebagai peserta kartu pra kerja itu susahnya setengah mati, dan semuanya harus melalui jalur *online* yang orangnya sendiri harus melakukan *online* itu, karena ada ujiannya cara *online*. Kalau data ter-PHK yang Bapak serahkan ini ternyata tidak diterima atau tidak bisa mendapatkan kartu pra kerja, langkah apa yang akan Bapak siapkan berikutnya.

Kemudian halaman 15 tentang bantuan Covid-19 yang *in progress*. Ada APD, multivitamin, dan sebagainya, ini sasarannya kemana? Jangan sampai orang yang sudah mendapatkan mendapatkan lagi, orang yang belum tersentuh belum tersentuh sama sekali/tidak tersentuh sama sekali.

Tadi disampaikan juga baksos yang sudah dilakukan sama warteg. Kenapa warteg? Kemudian Ojol. Kenapa Ojol? Kenapa tidak supir bis, atau kenapa tidak orang-orang yang memang kerjanya harian dan di Jakarta itu sangat banyak kalau memang untuk efektif di Jakarta. Saya tidak mempertanyakan kenapa di Jakarta, padahal itu kenapa harus di Jakarta. Apakah di cabang-cabang lain juga melakukan hal yang sama. Memang teknis, tapi dalam masa posisi ini jangan sampai orang yang banyak mendapat bantuan berlebih mendapat bantuan terus-terus. Orang yang susah makan susah makan.

Kemarin ada ada satu orang tidak jauh dari sini, awal puasa saya memberi uang. Niat memberi uang saja, karena saya kenal. Dia nangis-nangis karena apa, *alhamdulillah* ada yang dipakai beli beras, paling tidak ada nasi. Mau pakai sambel, mau pakai apa, paling tidak ada nasi. Dan itu kebetulan dirumahkan. Yang seperti ini banyak dan belum mendapat bantuan apa-apa. Ini karena pribadi saja. Saya menceritakan bukan untuk riya, tapi membuka fenomena bahwa semakin banyak orang susah makan hari ini. Kalau memang BPJS melakukan kegiatan sosial, kita harus pastikan bahwa tepat sasaran.

Itu saja, terima kasih. Mohon responnya.  
Terima kasih Pimpinan.

*Wallaahul Muwafiq Illa Aqwamith Thoriq,  
Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumsalam.*

Ibu Nadlifah, terima kasih.

#### **INTERUPSI F-PG (Hj. DEWI ASMARA, S.H., M.H.):**

Mohon maaf, Pimpinan, bisa interupsi? Karena kebetulan ada tambahan yang tadi terlupa titipan pertanyaan dari pertanyaan dari Saniatul Lativa yang kebetulan harusnya hadir hari ini. Tapi karena sudah tidak boleh ada pesawat dari Jambi, kebetulan ini baru masuk beritanya. Jadi tambahan pertanyaan Pak.

Bahwa terkait BPJS ini adanya dampak *covid* banyak perusahaan yang meliburkan. Tentunya ini tadi terkait dengan pertanyaan yang saya sampaikan, yang Kadin sampaikan, para perusahaan yang terdampak di berbagai industry dan UMKM tentunya kan mereka akan meminta keringanan dan relaksasi. Jadi sejalan dengan pertanyaan dahulu yang ingin diketahui. Situasi ini tentunya pengusaha merasa keberatan bayar gaji dan BPJS.

Katakanlah pandemiknya bisa sampai Agustus atau apa. Kalau sampai Agustus, perusahaan besar mungkin tidak masalah Pak. Tapi yang saya ketahui, walaupun sampai Agustus, perusahaan UMKM mungkin mau mulai lagi juga berat. Apalagi yang sewa dan sebagainya. Perbankan mau pinjamkan uang juga mungkin susah. Ini kalau sampai begini mereka tidak bayar beberapa bulan, ini nasibnya bagaimana ini kalau tiba-tiba ada kecelakaan kerja, kan mereka ada tunggakan. Mungkin itu kira-kira seperti itu yang dimaksudkan. Saya mencoba untuk kira-kira mengekspresikan seperti itu.

Dan yang kedua adalah sekitar 1,2 juta pekerja yang sudah dirumahkan karena terdampak virus ini, mereka kan tentunya para pekerja ini mencoba untuk mencairkan dana Jamsostek. Apakah ini sudah dipersiapkan. Jadi memang ada yang berusaha mencairkan. Karena kan kalau saya tidak salah ada juga ketentuan yang setelah sekian tahun, apakah ada ketentuan-ketentuan itu, ada yang betul-betul jaminan hari tua, atau apa ada programnya? Atau kalau belum ada?

Inilah sebagai sumbang saran saja dari kami. Jadi pertanyaan dari Ibu Lativa itu apakah sudah ada kesiapan kalau ada yang ingin mencairkan. Atau ini dapat juga sebagai usulan kami dari Fraksi Partai Golkar, barangkali bisa dipikirkan satu program baru. Buatlah ketentuan, bagi yang telah bekerja misalnya 5 tahun, 10 tahun. Ada Batasan paket-paket bisa narik berapa persen, itu sebagai program baru. Tapi Bapak hitung dulu mampunya berapa. Terserah Bapak hitung mau pakai *value* apa, tapi ada sejumlah dana bisa mereka tarik yang tidak mengganggu. Ini yang bisa dikategorikan program baru sehingga nanti Bapak bisa ajukan dana operasional tambahan memenuhi Pasal 13 PMK.

Itu kira-kira. Jadi tadi maaf kami belum sempat sampaikan, karena pertanyaannya baru sampai. Tapi kira-kira seperti itu.

Terima kasih Pimpinan.

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih Ibu Dewi.

Selanjutnya Ibu Netti silakan, perwakilan dari PKS.

#### **F-PKS (Dr. Hj. NETTI PRASETIYANI, M.Si.):**

Pimpinan dan juga teman-teman Anggota Komisi IX yang saya cintai,

Dari BPJS Ketenagakerjaan yang mohon maaf saya tidak dapat menyebutkan satu persatu, namun harapan saya secara pribadi kita semua dalam keadaan sehat di tengah situasi keprihatinan ini.

Yang kedua saya hanya ingin me-*remind* saja. Hari ini tanggal 28 April adalah hari keselamatan ketenagakerjaan. Jadi sangat ironis kalau di tengah pandemik covid ini ada banyak pekerja yang akhirnya harus menelan pil pahit dari situasi yang serba tidak menentu. Oleh karena itu ada beberapa pertanyaan yang mudah-mudahan ini saling melengkapi dengan apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi.

Yang pertama, karena memang hari ini kita mendapati begitu banyak tenaga kesehatan yang menjadi korban sebagai garda terdepan dalam penanganan Covid-19 ini, maka pertanyaan yang ingin saya sampaikan, apakah untuk tenaga kesehatan, baik yang berstatus ASN maupun non ASN masuk dalam kategori kecelakaan kerja? Karena bagaimanapun kita semua menyadari sepenuhnya profesi yang mereka tekuni adalah profesi yang sangat beresiko dalam situasi pandemik Covid-19 ini.

Dan tentu saya juga ingin bertanya, apakah kemudian ASN yang dalam kategori tenaga kesehatan ini terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Karena kalau saya melihat dan mendengar paparan tadi dari Direktur dan juga Direksi lainnya, maka seolah-olah ada sebuah premi bahwa BPJS Ketenagakerjaan sudah melakukan banyak hal. Termasuk juga melakukan baksos. Ini yang juga perlu kita garisbawahi, seperti apa keberpihakan BPJS Ketenagakerjaan terhadap pesertanya yang boleh jadi disini juga yang tadi saya sebutkan adalah tenaga kesehatan yang menjadi korban *covid* dalam menjalankan tugas.

Kemudian yang kedua, ini sebetulnya juga ada beberapa pertanyaan yang beririsan. Saya hanya mempertajam apa yang tadi disampaikan oleh

Pak Saleh tentang makan siang gratis buat Ojol. Tadi juga sudah digarisbawahi oleh Ibu Dewi dan Nadlifah, mengapa Ojol, mengapa hanya Ojol? Kalau kita berbicara tentang segmen yang terkena dampak dari Covid-19 ini kan bukan hanya Ojol. Termasuk juga beberapa hal yang perlu kita presisi. Kalau tadi disebutkan ada 18 ribu relawan lebih yang kemudian diberikan bantuan premi ini hanya 1.200-an. Mengapa kemudian ada pembatasan seperti itu? Dan apa kriterianya? Apakah tidak menimbulkan kesenjangan sosial diantara para relawan yang juga sama-sama berjuang untuk ikut menangani pandemic *covid-19* ini. Ini tentu saja sebuah pertanyaan yang memang berangkat dari presentase yang tadi Bapak lakukan.

Termasuk juga saya ingin kita semua berpikir jernih. Jadi jangan sampai kita ingin menggulirkan program populis tapi sebetulnya menuai polemic. Sudah cukup banyak polemic yang beredar seputar program kartu pra kerja yang kemudian digambarkan dari 20 triliun itu *oke* lah 14,4 triliunnya itu untuk 5,6 juta penerima manfaat. Tapi dimana rasa keadilan kalau kemudian 5,6 dikelola oleh segelintir orang yang memiliki *platform digital* dengan menyelenggarakan pelatihan *online* seperti itu. Ini nampaknya juga akan diikuti oleh BPJS Ketenagakerjaan. Ada program advokasi yang juga nanti akan dilakukan secara daring menggandeng pihak ketiga. Saya ingatkan, jadi jangan sampai kemudian Bapak bermain di sebuah arus/di sebuah ruang yang nantinya pasti akan menuai polemic. Apalagi situasi inikan situasi yang memang tidak mudah bagi semua *segment* yang terkena dampak untuk bisa mendapatkan akses bantuan. Baik bantuan tunai, bantuan langsung, maupun yang nantinya akan di desain oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Justru hari ini seharusnya BPJS Ketenagakerjaan itu memberikan sebuah kemudahan, memberikan sebuah jawaban, sama mudahnya, sama (suara tidak jelas) ketika para peserta ini mengiur sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jadi jangan sampai kemudian pada saat melakukan rekrutmen, kemudian menagih pembayaran dan sebagainya, ada sidak-sidak yang memang sangat akomodatif. Tapi begitu situasinya berubah seperti ini kemudian ada tebang pilih.

Ada pertanyaan, mengapa kemudian beberapa negara yang mendapatkan perhatian dalam bentuk pembagian masker, *hand sanitizer*, ternyata beberapa negara yang tadi Bapak tampilkan dalam presentasi tidak mendapatkan perhatian sama sekali? Malaysia, Singapura, Timur Tengah, tidak menjadi prioritas. Ini tentu saja yang juga harus dijawab.

Berikutnya, hari ini kita juga mendapatkan berbagai informasi dari teman-teman pekerja, dari serikat pekerja, dari teman-teman yang ada di Malaysia secara khusus, ternyata banyak sekali kasus PMI Malaysia yang hari ini terkatung-katung/terlunta-lunta, karena kebijakan *lockdown* Malaysia. Sehingga mereka hari ini banyak yang sudah kelaparan. Kira-kira bentuk pendampingan seperti apa yang sudah dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Hari ini juga ada pertanyaan, nanti mungkin akan ditampung oleh Ibu Kurniasih. Sebetulnya juga sudah ditanyakan. Tapi tentu saja ketika kita kemudian mendengarkan paparan Bapak tadi bahwa banyak dana BPJS yang dialokasikan untuk investasi, seperti apa *progress*-nya mengingat kondisi ekonomi hari ini. Bukan hanya di Indonesia, tapi hampir di banyak negara sedang mengalami penurunan.

Kalau kemudian ini dikaitkan dengan program BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kepesertaan ya bagaimana caranya untuk meningkatkan kepesertaan itu, padahal hari ini yang namanya gelombang PHK masih terus akan bergulir. Bukan hanya 1,9 juta yang sudah menjadi korban PHK, tapi saya yakin masih banyak lagi yang akan menjadi korban ini. Dan tentu saja mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan begitu banyak jawaban yang bukan hanya jawaban artifisial, tapi jawaban yang memang secara sistemik akan mampu memberikan solusi.

Dan terakhir, mungkin ini satu pertanyaan yang sangat klasik, tapi saya pikir ini penting untuk ditanyakan. Kalau kemudian Bapak menyebutkan ada bantuan untuk ini, untuk itu, termasuk juga begitu banyak program yang memang didedikasikan untuk mengatasi dampak dari pandemic *covid* ini, sementara di kementerian/lembaga lainnya juga banyak mengalokasikan untuk hal tersebut. Pertanyaan klasiknya, bagaimana koordinasi ini agar kemudian penerima bantuan ini benar-benar tersebar. Jadi jangan sampai kemudian yang itu-itu lagi mendapatkan bantuan. Karena permasalahan data di negeri ini ternyata juga belum beres. Di Komisi VIII dibentuk panja untuk mengurai persoalan data yang belum beres sampai hari ini.

Itu mungkin beberapa pertanyaan yang saya pikir sebagiannya juga sudah ditanyakan, tapi juga perul kita tegaskan.

Terima kasih Pimpinan atas kesempatan yang diberikan.

*Billaahit Taufiq Wal Hidayah,  
Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumsalam.*

Terima kasih Ibu Netti.

Selanjutnya yang dari perwakilan Poksi Demokrat ada tidak? Tidak ada ya.

Silakan Ibu Aliyah.

#### **F-PD (Hj. ALIYAH MUSTIKA ILHAM):**

Terima kasih.

*Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,*

Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua.

Pimpinan Komisi IX beserta Wakil Pimpinan, dan juga yang saya cintai rekan-rekan/sahabat-sahabat dari Komisi IX,

Bapak Dirut BPJS Ketenagakerjaan dan juga para Dewan Pengawas yang sempat hadir dan jajarannya,

Saya tidak berpanjang lebar. Kami dari Demokrat cuma hanya ingin katakan bagaimana mengenai kelanjutan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan, mengingat situasi serius dalam masa pandemic ini bagi sebagian besar perusahaan sehingga relaksasi ini merupakan hal (suara tidak

jelas) yang perlu segera diputuskan Pemerintah untuk meminimalisir gagal bayar perusahaan akan iuran BPJS (suara tidak jelas).

Tadi telah disampaikan Ibu Nadlifah, saya hanya melanjutkan saja mengenai pencairan dana jaminan hari tua dari BPJS TK yang tengah menjadi sorotan. Saya mendapatkan beberapa sumber, ini lantaran per tanggal 13 April 2020 kemarin terdapat kurang lebih 749,4 ribu tenaga kerja formal yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), artinya mereka akan berbondong-bondong untuk mencairkan dana tersebut. Jika memang dana BPJS TK likuid, maka mereka harus cepat merespon permintaan peserta yang sedang mengalami PHK. Untuk itu buruh sangat butuh dana tersebut untuk menyambung hidup. Saya berharap jangan sampai BPJS TK itu bernasib sama dengan PT Asuransi Jiwasraya yang diinvestasikan ke saham gorengan, sehingga kesulitan bayar manfaat peserta. Bagaimana inovasi daripada BPJS Ketenagakerjaan sendiri untuk merespon secara cepat permintaan pencairan para buruh dan karyawan korban PHK tersebut. Bagaimana pula detail mekanisme pencairannya. Kami berharap agar pencairan ini jangan sampai terbelit-belit.

Saya kira cukup dari Fraksi Partai Demokrat. Harapan saya kita semua sehat-sehat dan senantiasa dalam lindungan *Allah Subhaanahu Wa Ta'ala*.

Terima kasih.

*Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumsalam.*

Bapak/Ibu sekalian,

Dari anggota masih ada yang ingin menambahkan?

Tadi Pak Darul Siska yang sudah daftar duluan.

Pak Darul Siska dulu, silakan.

**F-PG (Drs. H. DARUL SISKA):**

Terima kasih Ibu Yayuk.

Ibu/Bapak Pimpinan dan teman-teman Anggota Komisi IX,  
Dirut BP Jamsostek dan BPJS dan Dewan Pengawas,

*Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

Yang pertama pertanyaan saya adalah kami melihat bahwa uangnya BP Jamsostek itu sebagian besar itu diletakkan di surat utang negara. Saya melihat umpamanya 2015 itu ada 46 persen, kemudian 16,1 persen, dan seterusnya. Tolong dijabarkan 46 persen tahun 2015 itu berapa jumlahnya/berapa nilainya, berapa lama tenornya, dan waktu jatuh tempo nanti jadi berapa jumlahnya. Kita ingin tahu berapa kira-kira (suara tidak jelas) BP Jamsostek ini akan sehat untuk jangka yang panjang. Kami minta dirinci tahun 2016 juga 61 persen itu berapa nilainya, berapa lama tenornya, nanti waktu kembali uangnya jadi berapa. Mudah-mudahan dengan demikian kita

jadi tahu posisi keuangan BP Jamsostek tahun jangka panjang. Itu mohon dijelaskan sampai tahun 2019.

Yang kedua adalah, 19. Yang sesuai atau melewati target itu hanya pada 2016 dan 2017. Yang lainnya tidak bisa (suara tidak jelas) dia atau di bawah target. Saya kira ini ada sesuatu yang salah. Harus dijelaskan kepada kita mengapa dari sekian tahun ini/lima tahun tahun terakhir ini yang mencapai target itu hanya dua tahun, yang lainnya di bawah target semuanya. Perlu evaluasi yang menyeluruh tentang hasil investasi atau penempatan investasi dana-dana Jamsostek. Kalau tidak, ini akan bermasalah terus dalam jangka panjang, akan tidak mencapai target terus, dan akan berbahaya bagi keuangan Jamsostek.

Yang berikut kami tanyakan adalah kelolaan aset BP Jamsostek, tahun 2018 itu 10.994 miliar, kemudian pada 2019 naik jadi 11.685 miliar. Sementara hasil investasinya turun dari 1.053 miliar ke 880 miliar. Tolong dijelaskan kenapa ini turun, apa masalahnya. Itu pertanyaan saya yang kedua.

Yang ketiga adalah soal *cut lost*, tadi dijelaskan tidak dilakukan *cut lost* padahal sudah ada tentang *cut lost*. Saya kira ini musti dijelaskan kepada kita apakah kendala hukum yang dikaitkan dengan Undang-Undang Tipikor ini menjadi kendala. Apa yang bisa kita lakukan supaya ini tidak dibiarkan rugi terus? Masak uang pekerja diletakkan di tempat investasi yang cenderung merugi. Tapi dibiarkan terus, tidak dilakukan *cut lost* dengan alasan takut pada Undang-Undang Tipikor. Masa uang pekerja dibiarkan, rugi terus untuk di investasi.

Saya tiga hal itu tolong dijawab oleh Dirut BP Jamsostek dan Dewan Pengawasnya, supaya agak *clear* ini yang menyangkut keuangan BP Jamsostek.

Terima kasih.

*Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumsalaam* Pak Darul.

Selanjutnya Ibu Kurniasih, dipersilakan.

#### **F-PKS (Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.):**

Terima kasih Pimpinan.

Pimpinan dan Anggota Komisi IX yang saya hormati, *wabil khusus* yang datang fisik mudah-mudahan selalu dijaga kesehatannya oleh *Allah Subhaanahu Wa Ta'ala*,

Bapak Direktur, jajaran Direksi dan Dewas BP Jamsostek,

Saya menambahkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Netti tadi terkait dengan JHT. JHT ini memang jangan sampai kita tidak bisa melakukan pertolongan kepada teman-teman yang mengalami PHK di dalam realisasi JHT ini hanya karena masalah regulasi. Jangan regulasi ini menjadi

pengunci buat kita semua, *wabil khusus* buat BP Jamsostek tadi harus segera diusulkan kalau memang ada hambatan-hambatan dalam hal regulasi. Begitu juga dengan jaminan yang lainnya yang ada dalam BP Jamsostek menindaklanjuti situasi pandemik Covid-19 yang banyak menerpa dari para anggota peserta BP Jamsostek.

Yang berikutnya adalah tentang iuran. Pasti yang tidak kena dampak PHK, misalnya dirumahkan sementara, atau dipotong gajinya, ini juga mengalami satu situasi berat, sehingga uang 200 ribu-100 ribu itu sangat berharga sekali. Mudah-mudahan kita mendorong dilakukannya relaksasi iuran tanpa denda, supaya peserta dari BP Jamsostek ini tetap *stay* sehingga tidak semakin berkurang untuk yang belum di PHK. Karena BP Jamsostek juga harus mengantisipasi adanya penurunan peserta dari BPJS ini sangat drastic dengan adanya PHK dan konsekuensi-konsekuensi lainnya pandemic Covid-19.

Yang terakhir, Pak Direksi, Pak Direktur, dan jajaran Direksi, tadi diceritakan ada baksos di DKI Jakarta, teman-teman juga sudah menanyakan. Saya juga menanyakan, karena saya tinggal di Jakarta, dan saya sudah blusukan juga, saya belum melihat ada di titik sana. Seandainya ini bisa di komunikasikan kita bisa membantu melakukan pengawasan, ada di titik mana, dan kenapa juga harus seperti apa yang sudah ditanyakan oleh teman-teman tadi. Artinya, kegiatan yang dilakukan di Jakarta sebagai kota epicentrum ini sangat kita harapkan bisa lebih transparan dan bisa melakukan kerjasama dengan baik.

Satu lagi untuk PMI. Saat ini saya mendapatkan informasi dari Saudi Arabia bahwa perusahaan bin Laden sudah mulai melakukan PHK secara besar-besaran, dan ini berarti harus diantisipasi juga, karena sepertinya PMI yang bekerja di bin Laden ini sebagian besar pasti ikut. Mudah-mudahan terdaftar di BP Jamsostek ini. Karenanya semua hal yang terkait dengan perlindungan PMI yang terkait dengan BP Jamsostek kita sangat minta perhatian prioritas pada saat ini agar mereka tidak terlunta-lunta di negara orang lain. Karena ini adalah harga diri bangsa dan negara.

Terima kasih Pimpinan.

#### **KETUA RAPAT:**

Bapak/Ibu sekalian,

Ini mengingat kita ini kan juga puasa ya, sambil mendengarkan dulu jawaban dari, tanpa membatasi dari Bapak/Ibu sekalian, maksudnya dari pertanyaan-pertanyaan yang ada nanti di jawab dulu. Kemudian setelah itu kalau masih ada pendalaman saya persilakan untuk menyampaikan kembali.

Bagaimana kalau begitu dulu? Ini sudah tinggal satu jam. Di jawab dulu ya, Pak Fadholi. Nanti setelah itu kalau ada pendalaman Pak Fadholi yang nomor satu untuk memberikan tambahan. Begitu, Bapak/Ibu yang ada di sini? Pak Fadholi nanti ya. Saya persilakan dulu dari Direktur BPJS, kemudian Dewan Jaminan Sosial dan Dewan Pengawas untuk menyampaikan. Saya persilakan siapa yang terlebih dahulu. Dari BPJS dulu ya, setelah itu nanti Dewan Pengawas dan selanjutnya DJSN. Yang paling banyak dua ini.

Terima kasih.

Saya persilakan.



**DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN (AGUS SUSANTO):**

Terima kasih Pimpinan.  
Nanti akan diteruskan oleh rekan saya yang lain

**KETUA RAPAT:**

Izin Pak.  
Kalau misalnya nanti secara *virtual* Bapak memerlukan jawaban dipersilakan.

**DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN (AGUS SUSANTO):**

Baik, terima kasih.

Jadi ini saya rangkum saja. Dari beberapa pertanyaan ada yang sama ini, terutama yang terkait dengan sumbangan atau donasi yang sudah kita kerjakan. Jadi sumbangan atau donasi yang kita berikan kepada PMI ini dasarnya kita kerjasama dengan Kemenaker dan juga Kementerian Luar Negeri, dan kedutaan negara setempat. Jadi atas dasar permintaan dari kedutaan setempat yang dikoordinasikan dengan dari Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Tenaga Kerja. Jadi atas dasar surat tersebut kita kirimkan bantuan kepada mereka sebatas kemampuan pendanaan yang ada.

Seperti saya sampaikan di depan tadi bahwa dana dari jaminan sosial ini ada dua kelompok, asset BPJS dan asset dana jaminan sosial. Jadi assetnya badan sama asset dana jaminan sosial. *By* regulasi untuk aset dana jaminan sosial ini adalah iuran, ini tidak memungkinkan untuk memberikan bantuan. Yang memungkinkan adalah dari aset badan. Dan ini berasal dari DAOPS kita, dari anggaran operasional kita yang sangat kecil sekali.

Memang yang kita berikan tidak seberapa besar, karena sumber dananya memang tidak ada. Seperti contohnya ojol. Ojol ini dana yang kita berikan untuk makan gratis ini sebesar 200 juta. Kenapa ojol, karena kita ada kerjasama dengan *provider* ojek, yaitu dari Gojek dan dari Grab. Jadi ini kita umumkan melalui kanal-kanal mereka. Dan untuk wartegnya juga warteg yang kerjasama dengan Grab ataupun dari Gojek. Jadi kita umumkan kepada mereka. Dan ini dananya sangat kecil, karena sesuai dengan kemampuan pendanaan kita yang ada.

Kemudian yang lain yang terkait dengan yang sedang kita kerjakan, baik itu yang sifatnya bantuan, ini nanti mungkin akan disampaikan oleh Direktur Pelayanan kita, karena ini terkait dengan kegiatan *promotive/preventive*.

Kemudian yang masih kita kerjakan juga yaitu untuk relaksasi iuran. Saat ini posisinya relaksasi iuran itu sedang dibahas oleh kementerian. Ini intense sekali, hari ini juga terus diadakan pembicaraan terus. Ijin prakarsanya sudah jalan, mudah-mudahan segera untuk dilakukan harmonisasi. Rencananya akan dikeluarkan PP baru untuk meng-cover selama masa kedaruratan. Jadi ini yang terkait dengan bantuan tadi.

Kemudian yang WFH (*Work From Home*) ini kita terapkan di kota-kota yang telah menerapkan PSBB. Jadi yang terapkan PSBB kita terapkan *full* WFH. Namun demikian operasional dan layanan tetap jalan. Dan kami selalu memastikan kepada seluruh karyawan kita bahwa operasional dan layanan

tetap jalan. Dilakukan dengan secara tanpa kontak fisik, yang kita sebut dengan layanan LAPA ASIK (layanan tanpa kontak fisik).

Kami menyadari bahwa tentu ini ada banyak atau beberapa kekurangan. Karena ini sesuatu yang baru dan sifatnya mendadak. Tetapi kita tidak akan pernah berhenti untuk terus menerus melakukan perbaikan. Dan kita terapkan *continuous improvement*.

Kemudian yang terkait dengan dana JHT. Yang paling banyak ditanyakan adalah dana JHT, dan bagaimana antisipasinya kalau ada penarikan atas peserta yang ter-PHK yang cukup besar.

Ini memang menjadi konsern kita. Hampir tiap hari kita selalu rapat untuk memantau likuiditas kita, dari pelayanan, dari aktuarian, kemudian dari investasi. Selalu duduk bersama, kita selalu *video conference* untuk melihat bagaimana kesiapan likuiditas kita.

Ini kita punya data sudah kita simulasikan sampai Desember 2020 dengan asumsi ada pengurangan iuran, kemudian ada penambahan jumlah klaim PHK. Tetapi ada dana-dana masuk yang dari bunga obligasi, ada obligasi yang jatuh tempo, ada bunga deposito. Ini ada *cashflow*. Ini kalau kita lihat *Insyah Alloh* tidak ada permasalahan likuiditas. Di luar ini masih ada dana-dana kita yang sangat likuid, yaitu di deposito bank-bank pemerintah dan BPD yang saat ini sebesar 41 triliun. Jadi kita tidak sampai menyentuh atau mencairkan deposito, tetapi cukup Dengan *cashflow* ini bisa mendanai kebutuhan JHT. Jadi dengan kata lain bahwa untuk likuiditas dana JHT sangat-sangat aman, dan kita persiapkan dan kelola dengan baik.

Kemudian mungkin yang lain bisa yang terkait dengan kepesertaan saya mohon ijin untuk disampaikan. Mungkin yang lain yang detail akan kami sampaikan secara tertulis, karena angka-angkanya detail sekali.

**F-PKB (Hj. NUR NADLIFAH, S.Ag., M.M.):**

Pimpinan, mumpung masih persoalan penarikan JHT.

Mekanisme pencairannya yang dalam posisi pandemic ini apakah normal seperti biasanya, berikut juga waktunya, ada ada kebijakan khusus. Kemudian terkait persyaratan juga. Mohon untuk ini segera diselesaikan kalau memang belum selesai. Dan segera di *share* sehingga orang-orang yang ter-PHK lebih mudah untuk mencairkan dananya itu. Ini yang tadi belum disampaikan mekanismenya seperti apa, layanannya bagaimana, padahal pegawai BPJS banyak yang bekerja di rumah hari ini. Jangan sampai alasan tidak ada yang melayani, saya tidak mau dengar ada keluhan tidak ada yang melayani ketika ada yang mencairkan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Silakan Pak.

**DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN (AGUS SUSANTO):**

Terima kasih.

Jadi untuk pelayanan kami pastikan bahwa BPJS Ketenagakerjaan tetap berjalan normal seperti biasanya. Dan kami selalu pastikan akan dilayani dengan maksimal walaupun sebagian bekerja dari rumah.

Kemudian untuk mekanismenya masih sama seperti ketentuan regulasi yang ada. Jadi kalau yang ter-PHK langsung bisa mengajukan. Dan ini kami sarankan agar dilakukan secara kolektif oleh perusahaan. Kan perusahaan ini mem-PHK mengklaim kepada BPJS Ketenagakerjaan secara kolektif, namun akan kita bayarkan langsung kepada masing-masing pekerja. Jadi untuk memudahkan.

Dan kemudian untuk yang tidak ter-PHK atau masih aktif, itu masih ada ruang untuk bisa mengambil sebagian, yaitu 10 persen. Namun ada ketentuan pembatasan minimal kepesertaan. Memang kalau kita lihat *benchmark* dengan beberapa jaminan sosial yang lainnya di dunia, memang hampir tidak ada yang memberikan kelonggaran untuk bisa menarik dana jaminan hari tuanya atau pensiunnya. Tetapi yang bisa dilakukan adalah mempermudah pelayanannya atau mempercepat pelayanannya.

**F-PDIP (MUHAMAD NABIL HAROEN, S.Pd., M.Hum.):**

Interupsi, Pimpinan.

Terima kasih atas waktunya.

Saya mau pesan saja, Pimpinan, ini kalau jawabannya tertulis terus terang kami tidak mau. Karena tadi kami pertanyaannya juga tidak tertulis. Kecuali memang niatnya tidak serius ya tolong disampaikan saja. Jadi ini kita sudah capek-capek kesini, sudah ngomong berbasa-busa bulan puasa, terus di jawab tertulis, enak banget.

Terima kasih.

**INTERUPSI F-GERINDRA (drg. PUTIH SARI):**

Pimpinan, menambahkan.

**KETUA RAPAT:**

Mbak Wulan dulu.

**F-NASDEM (Hj. SRI WULAN, S.E.):**

Terima kasih.

Mungkin sama dengan Gus Nabil ya. Jadi kita juga semuanya sudah capek datang ke sini juga, jadi kita paling tidak di *clear*-kan semuanya disini, jadi jelas semuanya. Jangan seperti rapat-rapat yang terdahulu bahwa jawaban tertulis pun tidak memberikan jawaban yang pasti buat kita semuanya. Jadi itu kita tuntaskan disini semuanya, lebih jelas semuanya, kita pulang lebih terang.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Silakan Mbak.

**F-GERINDRA (drg. PUTIH SARI):**

Tadi terkait dengan proses pelayanan yang ditanyakan juga oleh Ibu Nadlifah.

Intinya begini, kalau memang ada kebijakan *work from home* yang dilaksanakan oleh BP Jamsostek, tapi kami meminta untuk pelayanan secara konvensional seperti biasa, yang manual itu tetap dilakukan. Karena tadi saya sampaikan banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi oleh para pekerja kita yang memang sangat kesulitan kalau semua dilakukan secara *online*.

Kalau tadi disampaikan dengan kolektif perusahaan, hari ini sangat jarang perusahaan mau dengan situasi yang sulit perusahaan yang secara sadar melakukan hal yang tadi disampaikan oleh Pak Dirut melakukan kolektif mendaftarkan pekerjanya yang ter-PHK dan lain sebagainya tanpa adanya tentunya dorongan ataupun kebijakan-kebijakan yang bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut.

Jadi saya tegaskan, saya kira untuk pelayanan yang diberikan oleh BP Jamsostek ini kepada para pekerja bisa dilakukan, baik secara *online* maupun juga secara manual seperti biasa, sehingga kantor-kantor cabang yang dimiliki oleh BP Jamsostek tetap buka, tetap memberikan pelayanan. Tentu tetap juga memperhatikan protocol-protokol kesehatan. Samalah saya kira hari ini bank-bank juga melakukan hal yang sama, tetap buka, tapi diatur teknisnya tetap memperhatikan protokoler kesehatan.

Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Pak Agus, yang masih bisa di jawab di jawab. Kemudian kalau yang memang detail, tapi paling tidak globalnya di jawab dulu. Setelah itu baru detailnya disampaikan kenapa disampaikan secara tertulis.

Silakan.

**DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN (AGUS SUSANTO):**

Terima kasih.

Jadi tadi ada pertanyaan dari Pak Saleh Daulay, dari beberapa instrument itu mana yang paling menguntungkan. Ada saham, obligasi, deposito, reksadana. Memang kalau dilihat itu ada siklusnya. Ada saatnya saham itu yang paling tinggi. Kalau kita lihat *historical* 10 tahun terakhir 3 tahun rendah, tapi 7 tahun dia memberikan kontribusi paling besar. Itu saham. Tapi sekarang yang paling rendah. Dan kalau yang paling tinggi saat ini adalah di deposito yang kami tempatkan di bank-bank daerah, ini yang saat ini paling besar.

Kemudian tadi menanyakan untuk potensi *lost*. Ini data kalau di tahun 2018 akhir itu potensi *lost* kita 11 triliun. Jadi bukan potensi *lost*, tapi terapresiasi dengan *mark to market*, nilai pasar wajar. Data yang terakhir per 31 Maret tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Ketua Dewan Pengawas ini kalau tidak salah totalnya sekarang yang tadinya dari 431 triliun, data terakhir kita menjadi 411 triliun, artinya ada penurunan. Betul penurunan ini karena terdepresiasi dari harga pasar saham dan obligasi.

Namun demikian perlu kita pahami bersama bahwa penurunan atau kenaikan 1 persen dari indeks saham itu menghasilkan atau mempengaruhi sekitar 1 triliun rupiah. Jadi kalau indeksnya turun 1 persen maka nilai kita akan turun 1 triliun. Sebaliknya, kalau indeksnya naik 1 persen akan naik 1 triliun.

Kemudian berapa besar dana kita yang ada di pemerintah? Itu totalnya dana yang kita tempatkan di instrument yang berkaitan dengan pemerintah sebanyak 86,68 persen, atau *equivalent* 348 triliun. Ini yang terkait dengan instrumen pemerintah, yaitu ada di obligasi dan juga ada di deposito bank pemerintah.

Obligasi ada obligasi pemerintah, ada obligasi di BUMD. Yang terbanyak adalah yang ditempatkan di obligasi pemerintah, totalnya kalau dalam prosen saya hafal, yaitu sebanyak 61 persen dari total portofolio kita. Kenapa sebesar itu, karena memang ada regulasi dari OJK bahwa dana jaminan sosial harus ditempatkan di Surat Utang Negara minimal 50 persen. Dan saat ini kita sudah memenuhi sebesar 61 persen.

Kemudian yang lainnya mungkin ini terkait dengan kepesertaan, besaran iuran, bagaimana kondisinya, penurunan dan sebagainya, barangkali mungkin bisa dibantu dari Pak Ilyas.

Terima kasih.

**INTERUPSI F-PAN (Dr. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A.):**

Sebelum yang itu, Pak Agus, nanti saya mau tanya.

Ibu Pimpinan, izin.

Tadi soal penempatan dana-dana tadi saya itu ingin mendapat penjelasan yang lebih detail lagi, misalnya yang paling beresiko itu dimana. Kalau Surat Utang Negara yang seperti ini atau penempatan di keuangan negara seperti tadi itukan rata-rata kayaknya tidak bermasalah atau tidak beresiko. Ini mohon dijelaskan dulu tingkat resiko paling tinggi penempatan uang itu dimana dari yang sekarang dilakukan oleh BPJS itu. Mungkin kan biasanya semakin tinggi resikonya hasilnya semakin besar, *high risk high return*. Jadi kan itu perlu kita juga tahu.

**KETUA RAPAT:**

Silakan Pak.

**DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN (AGUS SUSANTO):**

Tingkat resiko paling tinggi tentunya ada di saham. Namun demikian kita memitigasi resiko tersebut dengan memilih jenis-jenis saham yang bagus, artinya yang masuk kepaga LQ45. Dan *alhamdulillah* kita semua di LQ45. Hanya ada beberapa saja yang di luar LQ45. Tapi sebetulnya dulunya LQ45, tapi karena ada penurunan assetnya kemudian dikeluarkan dari LQ45. Kemudian juga juga nilai dari kapitalisasinya besar.

Jadi sebetulnya yang resiko terbesar adalah di saham. Namun demikian kita mitigasi dengan hal-hal tersebut.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Silakan Pak Ilyas mau nambah, silakan.

**F-PAN (Dr. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A.):**

Sebetulnya saya belum, Ibu Ketua. Kalau masih boleh, sedikit lagi saja yang soal risiko saham.

Ini kan sebetulnya kalau persoalan saham inikan juga terkait dengan perekonomian global. Ini dengan adanya Covid-19 ini perekonomian global terganggu sekali. Jangankan kita, Amerika saja goyang. Cina di awal-awal Covid-19 juga goyang. Inikan perlu juga Bapak pertegas kepada kita, supaya uang rakyat itu aman Bapak pegang di situ. Jadi kalau tidak kan kita tidak yakin juga ini taruh disitu. Berapa persen sebetulnya yang ditaruh di saham. Inikan lumayan besar juga saya lihat. Jadi sampai Februari 2020 ini kan sudah sampai 35 triliun sekian. 35 triliun itu besar, itu bisa menutup defisit BPJS Kesehatan.

**DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN (AGUS SUSANTO):**

Betul, jadi porsi saham kita ada sekitar 20 persen di saham. Mungkin nanti kita cek tepatnya.

**INTERUPSI F-PAN (Dr. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A.):**

Izin, Pimpinan.

Saya itu ingin sekali persentase-persentase yang disebut ini jadi riil dulu disebut. Tadi kan yang ke negara saja yang Surat Utang Negara itu 61, saham 20, berarti itu saja sudah 81. Berarti sisanya kan cuma 19 lagi. Ini padahal yang lainnya banyak, deposito, reksadana. Katanya deposito yang paling menguntungkan, kenapa tidak banyak ditaruh disitu. Kemudian yang penyertaan, properti. Maksud saya ini supaya *clear* juga ini anggaran ini kemana saja. Itu uang rakyat, uang pekerja, bayangkan itu. Jadi kita minta kalau bisa dipaparkan, supaya kita menganalisisnya juga dengan benar.

Terima kasih Pimpinan.

**DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN (AGUS SUSANTO):**

Setelah saya mendapatkan datanya Pak. Jadi ini per posisi 31 Maret untuk deposito itu sebesar 9,8 persen, obligasi 68 persen, kemudian saham 13 persen, reksadana 6,7 persen, properti 0,4 persen, penyertaan 0,1 persen. Jadi ini besarnya.

Kemudian mungkin yang di saham itu tadi ada pertanyaan bagaimana dengan *cut lost*.

**INTERUPSI F-PAN (Dr. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A.):**

Tidak segampang itu juga, Pak Agus.

Tadi Pak Agus bilang itu saham 20 persen, Bapak koreksi jadi 13 persen. 7 persen selisihnya Pak. Baru berapa menit ini Bapak berubah pikiran

soal menjawab itu. Tadi kan 20 persen Bapak bilang pertama tadi. Makanya saya tanya berapa sebetulnya. Tadi 61 ditambah 20 jadi 81, benar tidak tadi. Sekarang Bapak jelaskan barusan, baru saya dapat datanya per 31 Maret itu 13 persen. Ini yang mana betul ini. Inilah yang saya sebut tadi penting dibuka data ini. Ini berubah-berubah begini kan tidak jelas juga. Ini jarang-jarang kita buka datanya BPJS Ketenagakerjaan ini.

**KETUA RAPAT:**

Datanya di sini ada tidak Pak? Ada kan? Apakah ini yang kita pegang Pak?

**DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN (AGUS SUSANTO):**

Halaman 29 poin 6 YOI per 31 Maret 2020, ini ada yang poin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ada dana investasi, kemudian ada prosentase, alokasi aset. Ini sudah tertera di situ.

**KETUA RAPAT:**

Biar diselesaikan. Nanti tidak selesai-selesai.  
Pak Ilyas, ditambahkan dulu.

**BPJS KETENAGAKERJAAN (ILYAS):**

Terima kasih Ibu Pimpinan.  
Terima kasih Pak Dirut.

Bapak/Ibu yang terhormat Anggota Komisi IX, baik yang di ruangan maupun yang secara *virtual*,

Saya menambahkan mungkin pertanyaan dari Bapak/Ibu yang terhormat. Pertama mengenai pekerja migran.

Memang pekerja migran kita dengan adanya keputusan dari Menteri Tenaga Kerja ini sudah tidak lagi dulu melakukan pengiriman, Kepmenaker Nomor 151 Tahun 2020. Sehingga target kita pekerja migran yang akan masuk tahun ini sebesar 500 ribuan ini menjadi kemungkinan besar tidak tercapai. Oleh karenanya kami juga berusaha memberi pelayanan terbaik kepada para pekerja kita yang masih di luar negeri, dan perlindungan kepada mereka yang ingin memperpanjang. Tidak pulang tapi mungkin masih ada perpanjangan, itu kita coba tetap lindungi dengan kerjasama dengan konjen kita, khususnya di Taiwan dengan KDI kita disana.

Kemudian ada permintaan dari BNP3 bahwasanya yang sudah dilatih tapi belum jadi berangkat itu untuk minta diperpanjang. Karena sebetulnya mereka sudah membayar iuran tapi kemudian tidak jadi berangkat. Ini diminta diperpanjang perlindungannya. Ini kami sudah bicarakan juga nanti dengan Kemenaker, karena ketentuannya ada di Kemenaker.

Jumlah PMI sampai saat ini yang terdaftar di kita 546 ribu 378 orang, dengan sebaran terbesar tentu di Malaysia dan Taiwan, kemudian juga di Hongkong. Itu tiga besar negara yang paling banyak PMI kita.

Kemudian pertanyaan dari Ibu Putih Sari tadi mengenai *winbag*. *Winbag* itu sebenarnya itu hanya istilah di kami, bagaimana kita sedapat mungkin memberi perlindungan kepada seluruh pekerja. Karena Undang-Undang Jaminan Sosial ini memang mengatakan seluruh pekerja wajib untuk ikut di BPJS Ketenagakerjaan, baik yang formal maupun informal. *Winbag* ini sebenarnya adalah bentuk bagaimana memberi perlindungan kepada pekerja formal yang sudah mengambil JHT nya bekerja pada suatu perusahaan kemungkinan besar mereka mengambil JHT misalnya untuk melanjutkan usahanya. Apalagi yang ter-PHK itu. Jangan sampai ini putus perlindungan. Ini kita beri penjelasan. Jadi tidak ada pemaksaan disini, tetap diberi penjelasan. Kemudian dari dana JHT yang diambil sisihkan sedikit. Dengan iuran yang hanya 16.800 sebulan ini bisa berlanjut perlindungannya. Inilah kita beri penjelasan-penjelasan. Dan proses pendaftarannya juga dilakukan dengan mengisi formulir, kemudian ditandatangani. Jadi benar-benar sesuai dengan ketentuan yang ada. Inilah adalah yang kita maksud dengan *winbag*. Dengan demikian perlindungan jalan terus bagi pekerja yang alih profesi. Ini dengan iuran yang begitu murah, pekerja di sektor formal maupun informal akan menerima jaminan yang sama besar, akan menerima suatu bentuk perlindungan yang sama di jaminan sosial ini. Apalagi sejak akhir tahun kita sudah menaikkan jaminan menjadi suatu yang cukup luar biasa peningkatannya.

#### **INTERUPSI F-GERINDRA (drg. PUTIH SARI):**

Pimpinan, karena itu terkait dengan pertanyaan saya tadi, *winbag*.

Harusnya memang tidak dipaksakan, karena kan pekerja tersebut kena PHK. Faktanya menganggur, jadi baru saja di PHK, jadi baiknya *winbag* tersebut tidak dipaksakan. Tapi tentunya dikembalikan lagi kepada peserta tersebut apakah memang mau melanjutkan atau tidak. Sehingga jangan ada kesan terpaksa melanjutkan. Walaupun baik, untuk melanjutkan program, untuk melanjutkan upaya-upaya perlindungan kepada mereka. Tapi kan tidak semuanya saya kira mampu dan mau untuk ada iuran kembali. Tergantung kondisi dari pekerjaanya. Dan saya mau tanya, itu berapa besarnya *winbag* itu? *Winbag* itu sebesar iurannya atau seperti apa?

#### **BPJS KETENAGAKERJAAN (ILYAS):**

Jadi mengenai iuran kalau untuk peserta yang bekerja di perusahaan yang disebut formal adalah prosentase tertentu dari upah. Misalnya untuk jaminan kecelakaan kerja sektor yang cukup besar risikonya 0,89 persen kali upah sebulan. Itu di sektor formal. Begitu dia menjadi sektor informal, atau *winbag*, iurannya sektor informal itu rupiah murni/nominal murni. Misalnya untuk jaminan kematian *flat*, tidak lagi memandang upah. Semua 6.800 jaminan kematian. Siapapun 6.800 dengan jaminan yang sudah ditingkatkan bisa menerima 42 juta.

Kemudian untuk jaminan kecelakaan kerjanya itu terendah adalah 10.000. 10.000 itu dianggap *equivalent* upahnya 1 juta rupiah. Jadi kalau sampai meninggal dunia peserta dari BPU yang informal ini akan menerima ahli warisnya 48 kali 1 juta. Itu yang minimal. Jadi kalau ikut dua program ini dengan upah terendah 1 juta tadi, iurannya adalah 16.800 perbulan. Jadi ini



kita berikan khususnya kepada pengambil JHT penjelasan-penjelasan ini dengan iuran yang sangat minimal, tetapi perlindungannya jalan.

Prinsipnya betul seperti yang Ibu katakan, tidak ada paksaan disini. Tetapi memang kita berusaha menjalankan undang-undang ini. Jadi kalau masih bekerja kita ajak daftar lagi dengan yang iuran dirubah menjadi secara nominal murni.

Kalau mereka tidak mau isi formulir ya memang tidak apa-apa. Tapi kalau dia menyatakan memang bekerja, kan *by* undang-undang ini harus ikut. Ini tugas kami memberitahu mereka. Jangan sampai nanti tidak ikut dikatakan kami tidak memberi penjelasan, tidak mengajak.

Tapi kalau memang profesinya memang sudah tidak bekerja sama sekali ya memang tidak ada kewajiban. Tidak isi formulir ya tidak akan kita juga kenakan tarif iuran.

Jadi begitu untuk *winbag*. Jadi *winbag* ini dari pengambil JHT kita. Misalnya tahun lalu 2,1 juta pengambil JHT, itu sekitar 50 sampai 60 persennya itu kembali ikut dalam bentuk biaya perorangan kembali. *Alhamdulillah* perlindungan tetap jalan bagi mereka.

Kemudian mengenai iuran, tadi juga ditanya oleh Pak Daulay dari PAN, pasti turun Pak. Tetapi angkanya turun kalau kita lihat penerimaan iuran kita sampai bulan Maret dibanding *year on year* dengan tahun lalu masih bertumbuh sekitar 10-11 persen. Tetapi pertumbuhannya sudah menurun. Januari *year on year* tumbuh 18 persen, Pebruari dia turun ke 14 persen, sekarang tinggal 11. Jadi tiga bulan ini rata-rata kita menerima 6 triliun sebulan. April ini akan mulai terjadi akan terlihat betul dampak dari PHK-PHK yang disebut tadi terhadap penerimaan iuran kita. Dan sampai hari ini kami hanya menerima iuran 4,7 triliun, dampaknya sudah hampir turun 2 triliun. Nanti kami perkirakan lebih anjlok lagi. Apalagi tadi kalau kebijakan relaksasi iuran ini jalan.

Jadi kami merespon permintaan-permintaan di seluruh dunia usaha. Kami rekap seluruh Indonesia masuk 4.500 surat dari pengusaha. Dan kami mencoba mengklasifikasi/mengkategorikan, 57 persen memang meminta pembebasan denda iuran dan penundaan iuran. Hampir tidak ada yang minta pembebasan iuran, jadi minta di tunda. Karena memang 2-3 tahun ini kita usahakan peserta menjadi tertib. 80 persen dari pemberi kerja atau pengusaha menengah/besar itu sudah tertib bayar iurannya. Mereka tertib, tepat waktu. Bahkan ada yang lebih cepat lagi dari waktu yang ditentukan. Yang 80 persen ini sebetulnya menginginkan tidak dikenakan denda kalau pada saat-saat ini mereka terlambat membayar, karena *cashflow*-nya agak terganggu. Jadi sebenarnya memang tidak ada yang minta sampai dibebaskan iurannya. Jadi di tunda.

#### **INTERUPSI F-PAN (Dr. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A.):**

Pimpinan, interupsi sedikit.

Jadi begini, Pak Ilyas, jadi kalau yang kita maksud itukan salah satu dampak soal penundaan. Tapi kan ada tadi fakta orang memang di PHK. Kalau di PHK itu kaitannya dengan program BPJS ini ada dua dampaknya. Pertama, orang itu berhenti kerja otomatis dia tidak bisa bayar iuran. Karena berhenti kan, perusahaannya juga pasti tidak akan bayar. Kemudian yang kedua, orang akan mengambil JHT Pak. Berarti kan ada dua, pengurangan

dari sisi masuknya iuran, pengurangan dari sisi pengambilan JHT-nya. Makanya itu yang perlu sebetulnya digambarkan kepada kita dampaknya itu. Jadi kalau Bapak jawab umum begini ini ya tidak perlu jadi direksi kita ini, itu sudah pasti yang Bapak jawab itu. Kita kan mau mendetail ini supaya lebih paham kita, supaya lebih terbuka maksudnya itu.

Demikian Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Nanti setelah Ibu Dewi, Pak Abidin ya.

**F-PG (Hj. DEWI ASMARA, S.H., M.H.):**

Mungkin yang dimaksud itu oleh Pak Saleh, mungkin juga tadi oleh Ibu Putih Sari, intinya kan bisa diperkirakan. Sekarang uang iuran itu ada berapa? Setelah tentunya dengan hasil investasi dikurangi biaya operasional, kan bisa Baapk tunjukkan semacam suatu *exercise* disertai asumsi.

Kita bilang yang dirumahkan kira-kira sekian juta, tentu kan tidak semua. Ada kira-kira bolongan tertentu yang kita perkirakan tidak akan punya tabungan lagi. Kalau yang pangkatnya direksi dirumahkan, atau manajer dirumahkan, mungkin masih mampu punya tabungan. Kan ada golongan-golongan juga, katakanlah mereka dengan *income* yang hanya sampai dengan 5 juta, itukan bisa dilihat dari iurannya, besarnya iuran yang dengan gajinya sekian itu berapa orang. Kalau diasumsikan sekian persen akan mengambil JHT, itu kira-kira akan menghabiskan uang berapa. Cukupah, atau bagaimana.

Inikan walaupun hanya sifatnya *exercise*, jadi itu teman-teman semua puas mendapat gambaran. Kalau hanya dapat seperti itukan kita tidak bisa melihat. Atas dasar itu sehingga bisa juga dipikirkan ada terobosan program baru atau apa sehingga bisa juga realisitis. Kalau ternyata kurang kan kembali lagi bisa ke program baru.

Kalau kita cuma jawaban-jawaban normatif yang tidak jadi bisa punya gambaran ya ini artinya percuma teman-teman ini dalam rangka melakukan tugas pengawasan hanya bertanya. Istilahnya, anggota bertanya, BPJS menjawab, tapi tidak ada solusi apa-apa. Hanya sekedar yang penting proses rapat dilalui. Masalah apakah hasilnya itu substantive dan berbobot *wallohua'lam*. Jangan sampai begitu Pak. Yang dimaksud Pak Saleh dan teman-teman itu, jadi kita juga ada bayangan. Kita sama-sama bantu pemikiran ini, bukan dalam rangka apa-apa, jadi tidak membuang waktu, rapat hanya sekedar anda bertanya saya menjawab.

Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Sebelum dijawab, Pak Abidin dari tadi.

Silakan Pak Abidin.

Terkait dengan ini ya.

**F-PDIP (ABIDIN FIKRI, S.H.):**

Pekerja kita mengalami PHK atau dirumahkan, karena *force major* berkaitan dengan pandemic *covid-19* ini. Kalau tidak ada skema yang cukup rigit untuk menyelesaikan ini saya kira akan menimbulkan masalah. Tidak hanya sekedar untuk memenuhi jaminan hari tua, kemudian yang di PHK, termasuk juga penundaan-penundaan yang sudah banyak perusahaan meminta kepada Menteri Perekonomian berkaitan dengan penundaan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, seperti disampaikan oleh direksi tadi.

Oleh karena itu menurut saya, dalam 12 bulan terakhir ini harus ada skema yang lebih rigit. Karena jangan sampai katakanlah mereka yang ingin membutuhkan dana itu tidak bisa dipenuhi oleh BPJS Ketenagakerjaan, padahal itu dana mereka/ uang mereka. Itu yang pertama.

Yang kedua adalah THR kan juga isu yang perlu juga diperbincangkan. Saya kira kalau katakan BPJS Ketenagakerjaan tidak punya data yang bisa memprediksi secara akurat berkaitan dengan pemenuhan hak-hak dari pekerja, baik itu dia yang ingin mengambil berdasarkan peraturan perundang-undangan harus dicairkan, kantor-kantornya harus tetap buka, karena dampak PHK atau dirumahkan, itukan mereka membutuhkan dana-dana yang memang itu hak mereka.

Oleh karena itu saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Saleh, jadi jangan hanya prediksi yang tidak akurat untuk nilai angka dari investasi, semuanya. Angka-angka itu harus jelas semua, agar kita bisa memenuhi (suara tidak jelas) dari pekerja itu sendiri. (suara tidak jelas). Pasti ini akan menimbulkan masalah kalau katakanlah kita tidak siap, dalam hal ini adalah BPJS Ketenagakerjaan.

Saya kira itu, Pimpinan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Sebelum saya ke Pak Ilyas, Ibu Intan silakan.

**F-PAN (Hj. INTAN FITRIANI FAUZI, S.H., LL.M.):**

Terima kasih Ibu Ketua.  
Pak Ilyas, Direktur Kepesertaan,

Ini terkait skema JHT. Kalau kita merujuk PP 60/2015 dan Permenaker 319/2015 JHT itu dicairkan dengan jangka waktu satu bulan pencairannya. Sementara karena covid ini kemudian ada kebijakan yang terkena PHK JHT ini bisa diambil dengan masa pencairan satu bulan. Apakah tidak bisa pencairan ini dipercepat. Karena ini masa kedaruratan, dan sudah keluar PP nya untuk masa kedaruratan.

Dan kemudian yang kedua, apakah ini hanya berlaku bagi PHK? Bagaimana dengan para pekerja yang dirumahkan statusnya. Karena sekarang ini banyak pelaku usaha yang memilih merumahkan tenaga kerjanya, bukan mem-PHK, karena mereka berharap pada saat pandemic ini berakhir itu kemudian akan dipekerjakan lagi. Contohnya adalah, dari sisi

pariwisata yang sudah 150 ribu, dan mungkin sekarang sudah bertambah lagi yang dirumahkan, bukan di PHK.

Tadi kalau Pak Ilyas bicara bahwa dari ribuan surat yang masuk tidak ada yang meminta pembebasan, mereka hanya minta penundaan, atau tidak ada dibayarkan denda. Saya rasa tidak begitu Pak, karena memang sudah ada surat yang masuk, antara lain adalah dari Apindo, dan ini anggota Apindo banyak sekali perusahaannya. Mereka minta pembebasan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan selama 12 bulan. Arus kas mereka inikan bicara *cashflow*, mohon dicek lagi, karena memang akan berat bagi industri kalau dalam masa yang cukup panjang ini belum tahu sampai kapan. Ditambah lagi bagi para UKM kalau sudah jatuh untuk bangkit itu akan sulit.

Dan kita tahu BP Jamsostek ini sebetulnya diuntungkan. Namanya gaji itu tiap tahun akan naik, kemudian 5 persen dari gaji. Yang namanya UMP saja, UMP itu kan tiap tahun naik dari provinsi, sehingga tidak akan mungkin yang namanya iuran itu turun.

Terima kasih.

*Wabillaahit Taufiq Wal Hidayah,  
Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumsalam.*

Langsung, Pak. Silakan.

#### **BPJS KETENAGAKERJAAN (ILYAS):**

Terima kasih Ibu Pimpinan.

Jadi sebetulnya saya Direktur Kepesertaan, jadi sebenarnya saya menjawab tadi masalah kepesertaan. Apa yang ditanya tadi sebetulnya ada di porsi rekan kami nanti di Direktur Pelayanan. Maksudnya itu Pak, jadi akan lebih jelas lagi nanti dari Pak Krisna secara keseluruhan yang menangani mengenai pelayanan, baik itu berapa jumlah-jumlah klaim yang akan dilayani, berapa yang akan diambil, itu nanti ada di sana.

Tapi dari segi kepesertaan seperti yang saya gambarkan tadi, salah satu yang mempengaruhi kepesertaan tidak bisa mungkin target tahun ini tercapai adalah pertama tadi misalnya PMI sementara ditutup, kita belum tahu kapan dibuka. Kemudian jasa konstruksi sudah dialihkan. Semua dana-dana untuk pembangunan ini kan kita melihat Menteri Keuangan ini dialihkan dulu untuk penanganan covid ini, sedangkan jakons ini merupakan contributor terbesar juga dari penambahan tenaga kerja di kita. Tahun ini saja targetnya 8 setengah juga orang dari jakons. Tentunya ini akan terpengaruh dengan ditutupnya ini, pengaruhnya terhadap kepesertaan kita.

Kemudian mengenai relaksasi iuran sendiri tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirut, pembahasannya betul-betul intensif. Dan kalau boleh saya sampaikan sedikit, disini antara lain pembahasannya bagaimana betul-betul untuk iuran JKK/JKM hanya dikenakan 10 persen saja untuk tiga bulan pertama. Jadi semacam diberi keringanan 90 persen. Ini tentunya akan sangat murah untuk segala sektor. Misalnya untuk Pekerja Bukan Penerima

Upah sendiri kalau ini menjadi sebuah ketentuan baru tadi, di PP yang baru, Pekerja Bukan Penerima Upah atau informal hanya akan membayar 1.500 rupiah untuk dua program dengan manfaat yang sama. Biaya perawatan pengobatan tidak terbatas, mereka boleh sampai berapapun tapi dengan iuran sangat minimal. Itu antara lain misalnya yang dibahas di dalam PP untuk relaksasi iuran. Antara lain seperti itu.

Tentu ini sangat pengaruh lagi terhadap penerimaan iuran kita. Karena memang ini kami adalah tadi badan penyelenggara/operator yang memang semuanya harus mengacu kepada undang-undang. Jadi diubah PP-nya. Sementara kalau dibebaskan sama sekali, dalam pembahasan dengan pemerintah ini tidak lagi menjadi opsi. Karena memang harus ada pembayaran untuk supaya jaminannya juga tetap timbul, maksudnya hak-hak dari pekerja.

Disini juga ada dua sisi, pembebasan tadi tentunya khususnya untuk program jaminan hari tua dan pensiun itu ada hak perusahaan yang dibayarkan yang merupakan tabungan untuk pekerja. Ini juga menjadi satu pembahasan yang intensif. Jangan sampai misalnya dibebaskan tapi nanti pekerja menuntut lagi, "mana hak kami yang 3,7, bagaimana dengan saldo jaminan hari tua kami yang berkurang". Ini yang masih terus dibahas di relaksasi iuran.

Jadi memang akan ada keringanan iuran, khususnya di JKK/JKM, itu sudah pasti. Kemudian di dua program yang menyangkut ada hak pekerja yang dibayarkan oleh pemberi kerja ini yang masih terus dibahas lebih mendalam supaya terjadi keseimbangan di sini.

#### **KETUA RAPAT:**

Izin, Pak Agus.

Tugasnya siapa ini? Pertanyaan dari teman-teman tadi kan minta ini ada musim covid, kemudian JHT banyak yang mau diambil, kemudian ditambah dengan Bapak tadi iurannya sekaligus juga ini. Kan tadi ada target yang sudah dibuat, rencana anggaran sudah dibuat tadi. Ini tugasnya siapa untuk memberikan detail ini. Silakan, Pak Agus, siapa yang bertugas ini.

#### **DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN (AGUS SUSANTO):**

Terima kasih Pimpinan.

Kebetulan kita punya datanya, ini simulasi atau proyeksi. Jadi kita selalu setiap hari itu antara Direktorat Investasi, kemudian pelayanan, aktuaria. Selalu menghitung berapa kebutuhan dananya, bagaimana ketahanan dana kita, bagaimana likuiditas kita. Kenapa, karena dana yang masuk di BP Jamsostek itu langsung *fully invested*. Jadi hampir tidak ada *cash on hand*. Jadi ada kelebihan dana langsung taruh di investasi, apakah deposito, atau obligasi, atau saham.

Kalau dalam kondisi tidak ada *cash on hand*, sementara iurannya berkurang, dan satu sisi penarikan JHT bertambah, bagaimana *cashflow*-nya. Apakah nanti harus mengambil babonnya/ mengambil dana yang sudah di investasi. Kami punya data dari bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, sampai Desember. Kalau untuk covid ini tiga bulan, itu *alhamdulillah* tidak sampai menggerus *cashflow* yang ada, artinya tidak sampai kita mengambil

babonnya/nilai pokok yang sudah diinvestasikan. Bahkan masih ada dana lebih untuk diinvestasikan kembali. Kalau asumsi covid ini enam bulan, jadi relaksasinya sampai enam bulan, ini ada di bulan Mei masih positif, artinya ada kelebihan dana, di bulan Juni memang ada kekurangan sebesar 714 miliar. Kekurangan ini bisa dialokasikan dari kelebihan dana di bulan sebelumnya. Dari mulai Juli sampai Desember positif, artinya ada kelebihan dana yang bisa diinvestasikan. Jadi dengan kata lain bahwa untuk *cashflow* penarikan JHT tidak ada masalah, cukup didanai dari uang masuk yang berasal dari bunga deposito, kupon obligasi, dan juga obligasi yang jatuh tempo. Jadi tidak sampai mencairkan investasi yang sudah kita tanamkan. Namun demikian masih ada dana yang sangat likuid, yaitu ada di deposito sebesar 40 triliun untuk berjaga-jaga.

Terima kasih.

### **KETUA RAPAT:**

Itulah yang tidak hanya cerita. Maksudnya teman-teman ada gambaran secara tertulis yang diberikan kepada kita supaya semua bisa membaca secara detail apa yang disampaikan oleh Bapak tadi. Kan tadi belum diceritakan hal semacam itu tadi soalnya. Itu kekhawatiran dari teman-teman.

### **INTERUPSI F-PAN (Dr. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A.):**

Izin, Ibu Pimpinan.

Sebetulnya ini belum menjawab semua apa yang saya tanya tadi itu. Masih banyak sebetulnya. Pertanyaan dasarnya itu sebetulnya berapa uang yang diinvestasikan, berapa uang yang tadi masih likuid. Ini sudah dijelaskan sedikit. Ini kan katanya masih bisa bertahan. Inikan proyeksinya seperti apa Bapak bisa mengatakan ini bertahan? Karena ini kita belum tahu sampai batas kapan ini Covid-19 ini akan selesai. Ini supaya Bapak tahu proyeksi dari Kementerian Kesehatan yang rapat disini, nanti bulan Juli jumlah yang terpapar itu 600 ribu orang yang positif corona di Indonesia. Bapak sudah pelajari tidak itu? Itukan ada kaitannya. Karena misalnya kalau Bapak tidak memprediksi kesitu, itukan berarti yang dilihat itu sekarang, baru 9.000 orang yang terpapar, padahal nanti bulan Juli ini Kementerian Kesehatan menjelaskan kepada kita disini bisa mencapai sampai 600 ribu orang. Kalau 600 ribu orang dampaknya kan makin luas Pak. Ketahanan yang anggaran disitu yang likuidnya seperti apa. Kalau dikatakan Bapak tadi kan tidak ada *cash in hand*. Kalau semuanya tidak ada *cash in hand* seperti itu, bagaimana Bapak menutupi orang-orang yang misalnya membutuhkan uang yang *cash* ditanggannya untuk menutupi kebutuhannya sehari-hari, sementara bantuan sosial dari pemerintah kan juga terbatas. Jadi ini yang mesti dijelaskan kepada kita. Karena kami juga berharap banyak BPJS ini bisa membantu pemerintah dalam menangani masalah-masalah ini.

Kemudian yang kedua. Yang soal jenis-jenis investasi tadi ini sebetulnya masih bisa banyak di soal. Kan aneh juga deposito katanya paling banyak untungnya, tapi cuma 9,89 persen ditaruh di situ. Jadi ini penting juga. Kan harus ada narasi dan rasionalisasi kenapa segitu. Saya tidak tahu apakah Pak Agus yang menjawab atau direktur keuangan atau siapa silakan

saja. Yang penting kita butuh jawaban yang lebih konkrit, supaya kita kalau ditanya orang mengerti.

Ini kita ini sudah bolak-balik ikut dengan BPJS Ketenagakerjaan, selalu tidak mengerti. Saya mohon maaf ini, saya termasuk orang yang belum mengerti betul soal BPJS ini. Bolak-balik Pak. Atau memang sengaja tidak dibuka semua supaya kita tidak mengerti, itukan aneh. Jadi mesti semakin sering kita rapat itu pengetahuan kita terhadap apa yang dinamakan dengan BPJS Ketenagakerjaan itu semakin dalam. Inikan ada istilah ini, istilah itu segala macam, kita sebetulnya sangat awam sekali karena belum pernah mendalami. Karena itu Bapak-bapak tolong kami diajari/diberitahu kepada kita supaya kita juga bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat jika memang itu dibutuhkan. Ini kan begini ini, nanti penjelasan dari BPJS ini Direksi dengan Dewas ini kan belum kelihatan ini. Jangan-jangan nanti tidak sinkron. Kan pernah juga kita dengar ada yang tidak sinkron.

Begitu, Ibu Pimpinan, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Silakan dilanjut.

Ada lagi yang mau ditambahkan Pak?

**DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN (AGUS SUSANTO):**

Terima kasih Pak Saleh Daulay.

Jadi yang saya sampaikan ini tadi angka-angkanya nanti kami akan sampaikan. Karena ini adalah proyeksi kita yang belum kita masukkan di dalam buku ini. Proyeksi ini menggunakan beberapa asumsi dan permodelan matematik. Jadi dengan data-data sekarang kita fungsikan nanti kedepan seperti apa, menghasilkan angka seperti ini untuk mengetahui kondisi likuiditas kita. Tetapi yang saya sampaikan ini likuiditas ini cukup didanai dari kupon bunga obligasi yang ada.

Tadi kalau dilihat kalau deposito itu menghasilkan besar kenapa porsinya kecil? Memang melihat ini pada situasi tertentu. Jadi kalau mungkin dilihat pada situasi saham lagi bagus ini saham lebih banyak kenapa tidak paling banyak porsinya, karena sekarang sahamnya menghasilkan paling rendah. Dan saat ini adalah yang paling tinggi di deposito. Jadi memang ini ada situasionalnya, sehingga melakukan *book building* ini perlu waktu dan perlu strategi, baik itu jangka pendek atau jangka panjang untuk di investasi.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Cukup dari BPJS?

**BPJS KETENAGAKERJAAN (ILYAS):**

Menambahkan sedikit, Ibu, tadi ada pertanyaan tentang tenaga medis apakah diikutkan. Kalau memang statusnya tenaga medis ini PNS tentunya ini ditanggung oleh taspen. Tapi kalau yang belum PNS memang seharusnya juga diikutkan ke kami. Namun kami juga sudah bekerjasama/berkoordinasi

dengan Depkes, paling tidak ada 25 ribu dokter-dokter yang kami lindungi. Baik itu dokter internsit, dokter tenaga nusantara sehat, dan sebagainya. Ini ikut dalam skema memang bukan PNS, jadi ini sudah kita lindungi.

**INTERUPSI F-GERINDRA (drg. PUTIH SARI):**

Melalui Pimpinan, mohon maaf.  
Programnya apa ya?

**BPJS KETENAGAKERJAAN (ILYAS):**

Program yang diikuti dua program dulu, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Dua program itu dulu.  
Saya kira itu tadi tambahan dari saya untuk kepesertaan tenaga medis.  
Terima kasih, Ibu Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Cukup Pak? Masih ada lagi yang perlu ditambahkan?

**INTERUPSI F-PAN (Dr. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A.):**

Ada sebetulnya, izin Pimpinan, Saleh Daulay. Ini masih kaitannya dengan pertanyaan yang saya kira belum dijawab semua oleh BPJS. Jadi kalau nanti sudah langsung ke Dewas itu berarti tinggal ini pertanyaan saya.

Misalnya/contoh, inikan ada pemberian masker, *hand sanitizer* tadi ke beberapa negara segala macam ini. Saya tanya tadi banyak itu. Kenapa ini sekian, kenapa disana sekian, kenapa di Malaysia tidak ada. Begitu-begitu kan ada tadi.

Kemudian ini tadi, kenapa bekerjasama dengan 150 warteg di Jakarta saja, tidak dengan kota-kota lain. Yang 150 warteg itu yang memilih siapa. Obyektif tidak milihnya. Apakah mereka punya nomor telepon, alamat, nama. kemudian yang makan disitu ada tidak *by name by address*. Karena saya mau tanya juga ini BPJS ini sanggup tidak ini *by name by address* itu orang-orang ojol yang makan disitu itu.

Terus tadi ditanya kenapa ojol saja? Kan tadi sudah ditanya sama Ibu Netty. Bapak tidak mikirin itu ada yang tukang-tukang bangunan yang tidak bisa bekerja sekarang ini. Ada yang mereka buruh pekerja harian. Misalnya pedagang kopi-kopi yang naik sepeda itu. Kan banyak itu, tidak bisa bekerja juga semuanya. Kenapa ojol saja Bapak kasih. Ini uangnya darimana? "Ini uang operasional kita sekian", berapa?

Ini masih banyak pertanyaannya itu. Termasuk yang tadi relawan-relawan itu kerjasamanya dengan BNPB seperti apa. Apakah dengan BNPB atau dengan Gugus Tugas. Bagaimana sistem *relational* hubungannya, pemeriksaannya seperti apa, anggarannya diperiksa siapa. Kita kan tidak pernah diberitahu ini, baru di paparan ini saja. Dan masih banyak lagi pertanyaan lainnya yang belum terjawab. Jadi ini jangan sampai rapatnya hanya formalitas-formalitas seperti ini. Ini yang menyebabkan tidak pernah tuntas, ini yang menyebabkan ilmu kita tidak pernah dalam soal BPJS ini. Jangan-jangan memang itu tadi, memang dibuat awam saja, jadi Anggota



DPR awam semua. Padahal ini mitra kita yang tugas kita. Kalau semuanya awam ya tidak beda kita dengan yang lain yang di luar sana yang bukan anggota DPR, sama saja pengetahuan kita terkait mereka.

Saya minta ini dijawab, Ibu Pimpinan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Makanya saya tadi masih ada yang ditambahkan Pak, saya tanya. Silakan kalau masih ada yang ditambahkan, Pak Agus.

Sebentar ya, waktunya saya tambah dulu. Tadi kan Jam 16.00. Sampai Jam 17.00, karena ini ada dua yang belum dijawab.

**F-PG (Hj. DEWI ASMARA, S.H., M.H.):**

Jam 18.00.

**KETUA RAPAT:**

Jam 18.00, oke. Setuju Jam 18.00 yang lain, Bapak/Ibu sekalian, yang *virtual*? Bukannya kita jam enam kurang?

**F-PG (Hj. DEWI ASMARA, S.H., M.H.):**

17.30.

**KETUA RAPAT:**

Jam 17.45.

**F-PG (Hj. DEWI ASMARA, S.H., M.H.):**

Tarawih dulu baru mulai lagi.

**KETUA RAPAT:**

Tidak sama, soalnya ada yang di daerah.

Oke, yang Jakarta Jam 17.45, yang di wilayah timur silakan terlebih dahulu mungkin buka puasa terlebih dahulu.

Tadi saya belum sempat memberikan kesempatan kepada Pak Ansory, Ibu Ketua juga belum. Saya tambah ya untuk yang Jakarta Jam 17.45.

**(RAPAT: SETUJU)**

**F-PG (Hj. DEWI ASMARA, S.H., M.H.):**

Terima kasih Pimpinan.

Jadi begini, Pimpinan, tadi menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Saleh Daulay. Jadi mekanisme kita bertanya itu tentunya kan juga di jawab. Tapi kalau sekedar menjawabnya hanya formalitas saja, tidak ada

urgensinya ini kita rapat. Kalau seperti itu, kita dari rumah menyiapkan pertanyaan. Kan saya sudah bilang, kumpulin saja di TA, kemudian dibacakan, silakan saja dijawab semaunya. Kalau kita ini rapat dalam rangka tugas melaksanakan pengawasan, tentunya jawabannya juga harus memberikan jawaban yang sifatnya kita ini ada substansinya yang mengena dengan apa yang kita tanyakan sebagai satu bahan pemikiran. Kan ada banyak, saya ambil contoh saja, tadi kan yang ditanyakan Pak Saleh dan teman-teman ini bagaimana kalau ada program di DKI kapan untuk bisa tahu detailnya? Contohnya saja, bantuannya ini kan misalnya tadi ada 615 ribu APD, kemudian vitamin 123 ribu.

**KETUA RAPAT:**

Sebentar, Ibu Dewi.

Bapak catat tidak pertanyaan-pertanyaan tadi? Catat semua? Tolong yang sudah dijawab diberi tanda, jadi nanti tidak ada yang ketinggalan.

Silakan dilanjut, Ibu Dewi.

**F-PG (Hj. DEWI ASMARA, S.H., M.H.):**

Inikan padahal kalau kita lihat saja jumlah pekerja aktif itu 31,9 juta. Atau Bapak sebutkan saja yang bayar iuran BPJS berapa. Ini saja kan kita bisa lihat realitanya, kan kecil. Maskernya itu cuma 615 ribu, vitamin 123 ribu. Orang yang aktif bayar iuran saja berapa itu. Jadi kan juga tidak *fair*. Masih pula itu tidak ada *by name by address*. Jadi ini dasarnya apa? Itukan harus ada kenapa memberi segitu. Orang uang yang dikelola dari berapa peserta. Jadi kan artinya pemberian bantuan inikan harus ada dasarnya, dasar logikanya itu apa yang ingin diketahui anggota. Pemilihan lokasinya, atau kenapa targetnya itu. Kemudian yang ditanyakan tadi mengenai investasi juga oleh Bang Darul.

Jadi artinya ini tolong yang namanya pertanyaan bila perlu, kalau sekretariat juga mencatat, tolong itu di tik dan dibagikan ke anggota, jadi anggota juga bisa melihat. Jangan menjawab "saya akan mencoba merangkum dari pertanyaan dari beberapa anggota yang kira-kira sama". Itu kan menurut Bapak. Menurut anggota yang bertanya? Saya berharap juga yang bertanya kemudian mendengarkan kira-kira yang dijawab itu mewakili atau tidak jawaban yang diinginkan anggota.

Kita ini bukan sekedar acara bertanya dan menjawab. Tapi jawabannya harus benar-benar ada solutif. Kalau itu kemudian dirumuskan, itulah hasil prestasi mitra kerja dan kita. Bukan hanya rapat-rapat asalan bertanya dan menjawab kemudian tidak ada mutunya. Jadi saya minta dijawabnya itu bukan hanya sekedar Bapak ngomong kita ngomong, bukan itu. Coba sekretariat dibagikan mana tadi semua yang bertanya, pasti di ketik kan, dibagikan ke kita, itu sesuai tidak, ada tidak jawabannya buat itu semua. Dan buat ke depannya, saya usul melalui Pimpinan, di komisi-komisi yang lain setiap selesai rapat, mungkin tidak harus seminggu, setiap masa sidang seluruh pertanyaan dan seluruh jawaban adan transkripnya dan dibagikan kepada anggota. Gunanya itu bisa dibuka-buka pada rapat-rapat selanjutnya. Dalam setiap masa sidang itu bisa setebal ini. Dulu di Komisi III saja yang bertanyanya banyak jawabannya susah, semua dibukukan. Jadi anggota itu

juga punya bahan, mitranya juga bisa. Jadi tidak hanya rapat asal yang penting sudah ngomong, yang penting sudah menjawab. Jawabannya cuma formal, tidak ada mutunya pula nanti kesimpulannya. Ini kita kesimpulan rapat kesimpulan rapatnya Anggota DPR jalani tugas. Kesimpulan Bapak juga sebagai direksi. Bukan cuma tanya jawab kayak kolom di koran 'anda bertanya kita menjawab'. Tolong jawab yang benar.

Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Saya berikan kesempatan kepada Pak Fadholi.  
Silakan Pak Fadholi.

**F-NASDEM (Drs. FADHOLI):**

Terima kasih.

Saya menambah sedikit saja terkait dengan tadi sudah banyak dibahas, tetapi saya butuh penjelasan dalam penanganan covid ini program (suara tidak jelas) selain tadi yang sudah disampaikan itu sebetulnya apa yang ada kaitannya dengan tupoksi daripada Jamsostek itu sendiri.

Yang pertama, program riil yang terkait dengan tenaga kerja kita yang di PHK. Program riilnya apa. Jadi bukan hanya sekedar yang nasi warteg itu saja.

Kemudian yang kedua, berapa alokasi dana yang sekarang ini disiapkan untuk bisa ikut menangani covid ini, dan yang kemudian ada lininya terhadap tenaga kerja ini. Baik yang mungkin sudah ter-PHK atau mungkin punya data berapa tenaga kerja kita yang mungkin terdampak langsung maupun tidak langsung. Yang terdata langsung misalkan dia yang kena PDP atau mungkin sudah sampai pada status sudah terkena penyakit coronanya apa belum. Ini kalau mungkin ada data, berapa data. Dan kemudian kalau mungkin terdampak terkait dengan ini, bukan karena langsung mendapatkan penyakitnya, tetapi karena persoalan ekonominya adakah program bantuan sosial yang memang langsung bisa diberikan kepada mereka. Ini saya pikir penting sekali seperti tadi banyak disampaikan oleh para senior kita, termasuk Pak Saleh dan sebagainya. Kita perlu ada satu rencana dan anggaran yang konkrit berapa sebetulnya anggaran (suara tidak jelas) yang bisa di (suara tidak jelas). Dan di sini juga ada disebut juga bhakti sosial. Ini juga belum di jawab dengan tegas. Bahwa bhakti sosial yang akan diadakan ini jangan sekedar kemudian ikut-ikutan saja membagi nasi bungkus di pinggir jalan. Tetapi yang ada manfaatnya langsung kepada tenaga kerja kita yang berdampak langsung maupun yang tidak langsung. Saya pikir ini menjadi satu (suara tidak jelas).

Kemudian yang kedua, dengan adanya rencana penarikan jaminan (suara tidak jelas) bagi tenaga kerja yang terkena dampak PHK. Sekarang Jamsostek ini sudah siapkan berapa dana untuk bisa mengantisipasi ketika untuk bisa melayani klaim-klaim (suara tidak jelas), ini berapa. Ini memang betul-betul kesiapannya sudah disiapkan betul.

Sejak tadi kita mendengarkan banyak dana-dana yang dialokasikan dengan komersial dan sebagainya. Tapi saya belum mendengarkan alokasi dana yang dipersiapkan untuk kemudian pembayaran (suara tidak jelas) yang

memang (suara tidak jelas), yang baik terdampak langsung (suara tidak jelas) atau dan lain sebagainya. Konkritnya itu tolong bisa diberikan satu penjelasan.

Yang terakhir adalah, dalam rangka untuk bisa menangani ini saya pikir Jamsostek ini perlu melakukan satu kegiatan yang ada kaitannya langsung dengan tenaga kerja kita. Jangan terbias kemana-mana. Tentu yang dikaitkan dengan penanganan masalah *covid*, ini sangat penting (suara tidak jelas).

Terima kasih Pimpinan.

*Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumsalam.*

Pak Ansory, silakan.

**WAKIL KETUA (H. ANSORY SIREGAR, Lc.):**

Saya sedikit saja, Pimpinan.

*Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,*  
Salam sejahtera buat kita semuanya.

Satu saja, Bapak Direksi dengan Bapak Dirut/Pak Agus, dengan Direksi-direksi lainnya, mengenai JHT.

Jadi keadaan kita memang sekarang bukan keadaan biasa, tapi keadaan luar biasa, dalam arti darurat. Jadi kalau ada yang mengklaim tentang JHT itu saya tadi mendengarkan 'satu bulan', sementara dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, mereka itu sudah kelaparan. Bagusnya saya usul, Pak Agus dengan direksi semuanya, kenapa tidak bisa mungkin hanya satu minggu saja siapa yang mengklaim langsung. Jadi kalau SDM Bapak kurang, tambah SDM-nya.

Dan mohon juga kepada Pak Agus dengan direksi lainnya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa saya memang tidak bangga uang-uang BPJS TK ini banyak, tapi buruh tidak terlayani. Tidak harus banyak uangnya. Tapi kalau buruh terlayani, walaupun uangnya sedikit tidak masalah. Jadi tolong dicarikan nanti, Pak Agus, birokrasinya jangan bertele-tele. Atau paling tidak Bapak dan Direksi lainnya tolong jangan sampai ada yang melapor ke kita. Kalau ada yang melapor kan berarti Bapak kurang ini. Jadi tolong diusahakan itu agar dipermudah, itu saja.

*Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumsalam.*

Silakan Pak Melki.

**WAKIL KETUA (EMANUEL MELKIADES LAKA LENA):**

Selamat sore Ibu Yayuk dan semua Anggota Komisi IX,  
Pak Agus dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan, Dewas, dan DJSN.

Saya minta maaf ini saya bicara tanpa foto, karena badan kurang sehat/ kurang fit, lagi demam.

Pertama saya kira kita punya semangat kita ingin mendorong agar BPJS TK ini secara konkrit itu bisa terlibat membantu pekerja yang anggota BPJS TK dalam melalui masa sulit pandemi *covid-19* ini. Sebagaimana juga kami pernah bertelepon dengan teman-teman Direksi dan Dewas itu, kita coba ingin cari cara agar BPJS TK ini keluar dari zona nyaman dia. Karena inikan kondisinya kan kita mengalami pandemi Covid-19 yang pendekatan dan gerak kita semua juga masih harus dalam gerak gaya pandemi. Bukan gerak gaya normal. Persoalan kita adalah, karena kita tahu bahwa memang BPJS TK ini dikelilingi oleh aturan-aturan yang memang bersifat sangat membatasi dia di tengah situasi krisis semacam ini. Situasi normal saja dia sudah susah bergerak, apalagi krisis semacam ini. Kami berharap agar pertemuan sore hari ini kita dapat semacam gambaran yang lebih konkrit aturan apa saja yang perlu coba kita perbaiki/kita revisi sehingga BPJS TK ini juga gerakannya jauh lebih fleksibel dibanding seperti saat ini. Dari tadi saya cermati teman-teman sudah banyak yang mengeluh.

Misalnya contoh begini, kalau kondisi normal kita mungkin tidak terlalu mempersoalkan peran BPJS TK, karena pekerja juga kan masih bisa dibayar oleh pengusaha yang mempekerjakannya. Atau oleh UMKM dia bisa bekerja karena situasinya kondusif. Dalam kondisi seperti inikan kita terus terang juga harus mendorong BPJS TK harus lebih maju. Dengan kondisi pengusaha juga mengalami kesulitan semacam ini, lalu apa peran BPJS TK untuk bisa membuat agar pekerja juga punya sandara di BPJS TK.

Jadi kalau kami usulkan misalnya, kita berharap agar BPJS ini bisa bergerak itu karena faktor operasional tadi, atau dana operasional (DAOPS) nya. Atau adakah fungsi-fungsi lain yang bisa di dorong dalam rangka membantu pekerja. Kalau dana operasional tadi kita pakai Permenkeu itu dia cuma 4,88 persen, baik itu iuran pekerja atau hasil investasi dia, kan kalau saya tidak keliru itu kan PP nya sampai 10 persen, mungkin rekomendasi kita pada rapat kali ini meminta agar permenkeunya diperbaiki dengan PP. Jadi BPJS TK biar lebih fleksibel bergerak dikasihlah dia memakai PP yang 10 persen itu. Dari hasil iuran dan investasi itu BPJS TK boleh memakai 10 persen, itu juga dipakai untuk membantu pekerja dalam suasana semacam ini. Karena yang pekerja butuhkan itu, bukan cuma ojol, kan juga banyak pekerja kita inikan butuh berbagai hal, dan sebenarnya bisa kita petakan mana pekerja yang memang dia masih selamat dalam situasi semacam ini mungkin tidak perlu dibantu. Di sektor-sektor tertentu kan dia masih bisa bekerja di situasi seperti ini. Tapi bagi yang tidak bisa bekerja lagi, dirumahkan istilahnya dan seterusnya itu, mesti harus dibantu. Ini pertama, Ibu Yayuk, saya berharap agar BPJS TK secara lebih konkrit itu terbuka saja dibagikan mana yang dia mengalami kesulitan, sehingga gerak BPJS TK ini lebih fleksibel.

Kedua terkait dengan jaminan kecelakaan kerja atau semacam itu yang bisa juga kita kalau bisa membuat pendefinisian yang bagus, itu

mestinya juga bisa dipakai untuk membantu para pekerja. Bahwa kalau kita bicara jaminan kecelakaan kerja itu *personal* iya. Orang mungkin jatuh, tertimpa sesuatu dan sebagainya, ketika dia bekerja. Tapi kalau namanya pandemi *covid-19* inikan ada kecelakaan kerja ini. Orang mau bekerja tapi ada penyakit pandemi semacam ini. Kalau andaikata pandemi semacam ini bisa dikategorikan juga adalah ini kecelakaan kerja, mestinya juga para pekerja terdampak langsung itu juga bisa kita dorong untuk mendapatkan juga bantuan dari BPJS TK dengan dana yang dimiliki, sehingga dana yang sudah ada di BPJS TK itu punya payung hukum untuk dipakai bagi para pekerja. Jadi ini memang *debatable*, jadi bisa diperdebatkan. Tapi harus ada gerak yang lebih *progressive* dari kita untuk mendorong BPJS TK, sehingga juga fasilitas, anggaran/dana yang dimiliki itu juga bisa dipakai.

Itu saya kira coba kita dengar dari BPJS TK yang lebih terbuka apa adanya, sehingga gerakan dari BPJS TK ini juga harus sebuah respon yang memang dalam suasana pandemi, bukan suasana normal. Kami tentu paham bahwa Direksi inikan juga sebentar lagi selesai, jadi pasti juga ingin agar menyelesaikan tugas tanpa masalah. Tidak ada masalah hukum dan seterusnya. Tapi andaikata itu terkait dengan aturan hukum yang kita miliki, kan kita bisa perbaiki. Permenkeu misalnya, kalau memang ada beberapa permenkeu yang memang perlu diperbaiki ya kita perbaiki terkait dengan membuat operasional BPJS TK lebih fleksibel. Termasuk peraturan pemerintah yang kami dengar katanya peraturan pemerintah yang untuk relaksasi iuran kan sudah dibahas, dan sebentar lagi mungkin sudah selesai. Itu kan untuk menjawab pengusaha. Untuk pekerja inikan kita juga harus membuat PP yang juga membuat mereka juga punya manfaat yang cukup baik dalam kondisi pandemi semacam ini. Pengusaha sudah dapat relaksasi, pekerja dapat apa dalam kondisi kayak begini. Itu juga mesti kita pikirkan.

Yang tadi saya usul itu kita mendefinisikan kembali tentang makna kecelakaan kerja. Kan ada yang itu *personal*, ada juga itu bersifat mungkin perusahaannya, atau juga mungkin ini bersifat besar karena di satu negara, bahkan di dunia ini pandeminya.

Mungkin yang ketiga terkait yang tadi banyak teman-teman sampaikan, terkait saham, terkait juga berbagai macam investasi yang dimiliki oleh BPJS TK. Hari ini tentu sebagaimana yang kami ketahui memang Pemerintah juga sangat membutuhkan peran BPJS TK. Dan juga mungkin perlu kita dengar BPJS TK ini diminta Pemerintah untuk terlibat lebih jauh dalam menangani khusus pekerja yang menjadi anggota BPJS TK, tapi apa yang menjadi kendala sehingga kemudian dorongan Pemerintah ini masih kesulitan oleh BPJS TK.

Jadi sekali lagi kita ingin sore hari ini kita punya gambaran tentang suasana yang lebih konkrit di dalam, sehingga ketika kita mau dorong juga untuk satu hal yang bersifat operasional ini juga bisa jalan. Kemarin misalnya saya dengar dari TA mengatakan bahwa mereka juga ingin apakah ada peraturan Direksi juga yang perlu kita bantu untuk diperbaiki. Kami kesulitan untuk juga mendapatkan apa-apa yang perlu diperbaiki.

Jadi kami ini sebenarnya dari Komisi IX kami ingin agar BPJS TK ini juga lebih bisa berperan dan betul-betul itu dalam aturan main yang betul-betul juga mengamankan Bapak/Ibu para Direksi yang tentu, sekali lagi kami tahu bahwa ini sudah mau selesai dan ingin juga tidak ada masalah, tapi kan kita bisa mencari cara sehingga peran itu juga tidak menimbulkan masalah

hukum, dan secara konkrit juga itu bisa menjadi salah satu *legacy* atau warisan Bapak/Ibu dalam konteks pandemi ini untuk juga bisa kita lakukan perbaikan, pendekatan, dan juga pelayanan BPJS Tenaga Kerja.

Saya kira itu, Ibu Yayuk, yang bisa kami sampaikan. Kami mohon agar ini bisa dijawab konkrit apa-apa saja masalah-masalah peraturan yang memang masih membuat BPJS TK tidak bisa bergerak fleksibel. Kalau undang-undang kita mungkin agak panjang, tapi peraturan pemerintah lebih mudah diperbaiki mestinya. Atau Peraturan Menteri Keuangan kan bisa kita rekomendasikan dalam rapat ini untuk berbagai hal yang mengganjal itu bisa dibenahi, bisa diperbaiki, membuat BPJS TK bergerak lebih baik.

Demikian, Ibu Yayuk.

Terima kasih.

Selamat sore.

**KETUA RAPAT:**

Selamat sore.

Terima kasih Pak Melki.

Bapak/Ibu sekalian,

Karena waktunya langsung atau lanjut, tolong silakan kalau mau Sholat Ashar secara bergiliran untuk Sholat Ashar. Tadi kan tidak ada waktu untuk *break*.

Silakan Ibu Nini.

**WAKIL KETUA (Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A.):**

*Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

Pimpinan/Anggota Komisi IX,  
Bapak/Ibu yang saya hormati,

Yang pertama yang perlu saya pertanyakan adalah *grand design*-nya itu seperti apa tentang covid dan pasca covid ini? Karena kalau kita tidak memiliki *grand design*, apa yang dilakukan ketika covid ini apa, intervensinya seperti apa, *pasca covid* ini juga seperti apa? Karena pasca covid ini pasti banyak yang di PHK. Sekarang saja sudah banyak di PHK. Lalu apa yang akan dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan dalam menangani pasca covid-nya seperti apa.

Biasanya kalau ada kecelakaan kerja, ada masalah dengan kondisi tubuh pekerja, mereka bisa mendapat pelatihan untuk mendapatkan akses pekerjaan dengan kondisi tubuhnya. Yang saya tanyakan, pasca covid ini juga seperti apa? Jangan sampai kita melakukan langkah itu yang tidak berkesinambungan satu dengan yang lain. Pokoknya sekarang covid ini, setelah itu tidak terpikirkan.

Kalau tadi disampaikan tentang beberapa poin yang dilakukan teman-teman kenapa harus di Jakarta dan kenapa Ojol? Sudahlah Pak, jangan Ojol lagi-Ojol lagi begitu, kita sudah *puyeng*. Apa-apa Ojol, kartu pra kerja Ojol,

lalu subsidi BBM juga ojol lagi, pulsa ojol lagi. Ini padahal yang kalau tidak ojol yang lebih banyak lagi. Apalagi contoh seperti kami Komisi IX inikan pasti ada masyarakat di daerahnya yang juga memiliki kartu BPJS Ketenagakerjaan, dan mereka sekarang tidak mendapat pekerjaan, dan bukan ojol juga. Dan bisa jadi di daerah tidak ada warteg juga. Ini secara garis besarnya apa yang bisa dilakukan. Dan juga kita harus memikirkan tentang bagaimana penambahan manfaat dari program-program yang ada. Kalau penambahan manfaat kemarin ada beasiswa, lalu apa lagi yang bisa kita lakukan penambahan manfaatnya dalam kondisi seperti ini. Jangan sampai kita seperti kata Pak Melki tadi kita terlalu *street* pada aturan yang kita sendiri akhirnya tidak bisa memberikan manfaat. Ini dibanding lembaga lain, BPJS ketenagakerjaan ini sekarang sangat berlimpah uang/berlimpah dana. Kalau selama ini memang dana-dana itu tidak terlalu bergerak, tapi inilah saatnya/waktunya untuk membuktikan ke masyarakat bahwa BPJS Ketenagakerjaan ini ada.

Masyarakat selama ini banyak melakukan pembayaran, lalu apa yang sebenarnya bisa kita berikan, terutama kepada sektor-sektor informal yang selama ini tidak banyak tersentuh. Jangan sampai nanti dana-dana yang ada ini terfokus pada sektor-sektor yang sebenarnya itu hanya untuk klaim-klaim media. Sudah bukan waktunya pencitraan lagi klaim medianya seperti apa. Karena kalau saya melihat kalau hanya bantuannya di Jakarta saya berpikir itu hanya persoalan-persoalan klaim media saja. Karena Jakarta dekat dengan pusat informasi, pusat dengan media, jadi apapun gerakannya sedikit apapun kalau di Jakarta pasti ter-cover oleh media. Lalu bagaimana dengan daerah-daerah yang lain? Walaupun disitu tidak ada yang positif, tapi dampaknya itu pasti kemana-mana. Di daerah saya *alhamdulillah* belum ada yang positif, belum ada yang PDP, tapi disitu tentunya juga mendapatkan dampak dari corona ini.

Yang terakhir adalah soal penggunaan-penggunaan dana. Dana yang ada tadi soal melakukan bantuan kepada pekerja ini secara *random*-nya seperti apa, *random* pembagiannya seperti apa. Saya memang sempat tahu di beberapa daerah ada kepala cabang yang melakukan *random* pembagian-pembagian seperti itu. Tapi saya tidak tahu bagaimana me-*random* pembagiannya seperti apa. Ini yang perlu kita awasi sebagai Komisi IX, salah satunya adalah fungsi pengawasan kita yang dari tadi teman-teman ini bertanya dengan detail soal bantuan ini kaitannya dengan itu untuk memastikan bahwa bantuan itu benar-benar menysasar orangnya, dan yang digunakan dananya itu juga pas.

Investasi-investasi yang selama ini banyak investasi yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan sekarang ini waktunya untuk mengeluarkan. Jangan sampai kita, kalau orang Jawa '*eman-eman*' mengeluarkan tapi membiarkan pekerja yang sebenarnya menjadi fokus dari BPJS Ketenagakerjaan ini tidak mendapatkan manfaat.

Itu saja, Pak Ketua.

Terima kasih.

*Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*



**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumsalam.*

Kita ke BPJS dulu ya, Bapak/Ibu? Pak Darul ya, silakan Pak.

**F-PG (Drs. H. DARUL SISKA):**

Saya ingin mendapatkan penegasan dari Direksi. Ini kan ibaratnya Direksi itu dapat amanah uang pekerja dikelola oleh mereka, terus di investasikan. Dan sekarang trendnya merugi, kok tidak di-*cut lost*. Saya kira ini butuh penegasan dari direksi kenapa tidak di-*cut lost*. Kan ini tidak amanah, masa uang di investasikan cenderung merugi tidak dibiarkan. Saya mohon penegasan dari direksi apa itu masalahnya. Karena tidak ada kerugian negara disitu, itu kerugian uang pekerja.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak.

Silakan Pak. Tolong pertanyaan dari kawan-kawan tadi

**DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN (AGUS SUSANTO):**

Terima kasih Pimpinan.

Jadi satu yang terkait dengan bantuan mungkin saya akan kembali ke *slide* kami di halaman 12 dan 13, yaitu tentang peruntukkan aset BPJS. Saya kira ini untuk merespon Pak Melki tadi apa yang bisa dibantu untuk keluar dari kebuntuan ini. Bahwa dana kita kalau bicara BPJS ini ada dua hal. Satu, organnya/institusinya BPJS, satunya adalah dana amanahnya. Untuk dana amanah ini hanya bisa dimanfaatkan untuk pembayaran manfaat, operasional, dan investasi.

Di halaman 13 ini kami gambarkan bahwa, kalau dana dari amanah untuk ke program bantuan ini kita hingga saat ini menjadi masalah. Kebuntuan kita di regulasi. Ini yang kita perlu bantuan untuk dicarikan solusi seperti apa ini.

Kemudian yang memungkinkan adalah dari dana DAOPS (Dana Operasional). Tapi dana operasional itu kami peroleh sekian persen dari iuran dan sekian persen dari hasil pengembangan. Iurannya kedepan ini sudah akan turun, hasil pengembangannya turun, tentu DAOPS kita juga turun, sehingga dana kita menjadi sangat pas-pasan. Oleh karena itulah bantuan yang kita berikan/kami sampaikan tadi, dan itu sifatnya masih sangat kecil.

Jadi yang seperti Ojol, kenapa Ojol? Ini adalah sebetulnya untuk sosialisasi edukasi program. Jadi kita menggunakan fasilitas yang sudah tersedia di grab dan di gojek untuk sosialisasi program. Tentu orang yang membaca sosialisasi kita mereka akan mengetahui ada program tersebut. kemudian juga di dalam pelaksanaannya kita berikan brosur-brosur untuk informasi-informasi. Dan ini baru *piloting*, tapi kita hentikan, karena kembali kita melihat DAOPS kita akan berkurang, tidak mampu kita untuk melakukan hal tersebut.

Kemudian yang *cut lost*, ini tadi yang ingin kami sampaikan, memang ini menjadi kendala kita yang perlu kita carikan solusi sebaiknya bagaimana. Satu, kita tidak bisa melakukan *cut lost* karena tidak memiliki basis hukum yang kuat. Betul kita di Perdir itu ada. Itu Perdir yang lama kemudian kita revisi. Namun demikian setelah kita telaah dari beberapa ahli hukum, ini tidak cukup memadai. Karena resiko *cut lost* itu adalah kerugian negara, dan kerugian negara ini diatur di Undang-Undang Tipikor, sifatnya Tipikor. Di revisi PP 55 kami juga mengajukan agar diberikan payung hukum sehingga kita bisa melakukan *cut lost*. Namun demikian dalam pembahasan antar kementerian *cut lost* ini tidak bisa dimuat di dalam PP. Ini dari Kumham, Kumham keberatan, ini tidak bisa diatur di PP, karena risikonya ada di undang-undang, sehingga harus diatur selevel dengan undang-undang. Hingga saat ini kita tidak bisa melakukan *cut lost*, dan ini menjadi permasalahan dalam pengelolaan investasi di kita. Mungkin kita akan carikan sama-sama bagaimana solusi kedepannya.

Mungkin yang lain yang belum terjawab adalah terkait dengan tadi kegiatan bansos ini ada Direktur Pelayanan, sama kemudahan untuk melakukan JHT. Mungkin mohon ijin bisa diberikan waktu kepada Direktur Pelayanan kami.

Terima kasih.

**INTERUPSI F-PAN (Dr. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A.):**

Interupsi, Pimpinan.

Inikan ada tadi penjelasan soal DAOPS itu digunakan untuk bantuan sosial tadi. inikan sebetulnya saya tidak tahu apakah dulu waktu Bapak mau mengajukan anggaran itu masuk disana atau tidak. Atau mungkin muncul setelah Covid-19 ini. Itu dulu diperjelas. Dan angkanya berapa, kan dari tadi belum keluar angkanya. Masa kita tidak boleh tahu Pak?

Ini lembaga Bapak ini lembaga publik. Kalau lembaga publik itu boleh di audit oleh publik. DPR juga begitu Pak. Kami sekarang gaji ke-13 tidak boleh, kami kasih semua, di potong gaji kami semua untuk membantu Covid-19. Kami kasih, tidak ada masalah. Tidak boleh kunker kemana-mana. Pokoknya kita semua ikut itu. Tidak boleh rapat yang apa namanya itu ya kita ikuti semua. Sekarang Bapak ini lembaga publik, dibuka saja menurut saya itu. Termasuk tadi pertanyaan saya, ini warteg yang 150 darimana? Ojol-ojol itu diminta tidak nomor teleponnya, *by name, by address*. Itu pertanyaan kecil-kecil, tapi bagi teman-teman ini penting. Jadi bagi Bapak-bapak itu tidak penting, bagi kami penting juga.

Demikian, Pimpinan.

Terima kasih.

**F-PG (Hj. DEWI ASMARA, S.H.):**

Saya interupsi juga, Pimpinan. Interupsi tambahan saja ini Pak.

Kita juga dengar, ini melalui Pimpinan, inikan diantara kita saja. Ini kan era keterbukaan, kita terbuka sajalah Pak. Bapak itukan ada tadi diantara 5 triliun dana operasional itu yang hampir 5 T ada kan untuk penyuluhan dan sebagainya. Kita juga tahulah kinerja itu ingin tampil bagus barangkali di ruang publik. Termasuk melalui media cetak, media macam-macam. Cobalah

itu. Kita kan juga tahu sama tahu, lebih baik dana *buzzer* yang Bapak pakai itu *buzzer*-nya supaya bikin opini bagus. Banyak itu *buzzer*-nya Bapak. Mendingan itu yang bisa dipakai buat bikin program lain yang lebih manfaat. Begitu saja, Pimpinan. Coba jelaskan itu.

**KETUA RAPAT:**

Silakan Pak Abidin.

**F-PDIP (ABIDIN FIKRI, S.H.):**

Pertanyaannya berkaitan dengan program yang sudah dilakukan oleh Direksi BPJS TK itu berkaitan dengan penanganan Covid-19. Sudah dilakukan misalkan untuk bagi-bagi nasi bungkus ke ojol, diserahkan ke warteg-warteg. Itu kan program yang bisa di desain oleh BPJS TK. Itu berapa sebetulnya, jumlahnya berapa, kenapa kesana, itu harus dijawab. Artinya apa, kita itu kan juga punya konsituen yang harus kita urus juga. Itu maksud saya. Jangan katakanlah ini kalau mereka membuat program semauanya mereka itu bisa, kita untuk memperjuangkan hak-hak dari pekerja, juga dapil kita yang peserta BPJS Tenaga Kerja, kita tidak bisa. Ini kan menimbulkan masalah menurut saya. Kenapa kita tidak terbuka saja? Oke sekarang kita lihat di program untuk covid, di warteg sekian, segala macam sekian, dananya sekian darimana. Apakah itu dari CSR, apa dari *refocusing*. Tapi harus ada penanganan Covid-19 ini. Karena uang itu adalah uang pekerja kita, harus dikembalikan ke pekerja kita yang sekarang sedang mengalami kesusahan. Ada yang dirumahkan, ada yang di PHK, dan lain sebagainya.

Saya kira itu yang harus dijawab oleh Direksi. Jadi jangan muter-muter. Angkanya tidak mungkin mereka mengeluarkan uang itu asal-asalan. Itu kan bukan uang para Direksi, itu uang dari pembiayaan yang memang dialokasikan berdasarkan pertimbangan mereka. Jadi jangan katakanlah, kalau (suara tidak jelas/terlalu cepat) ditanyakan soal yang ke warteg, ke Ojol, Bapak (suara tidak jelas/terlalu cepat). Berapa *sih* dananya yang dialokasikan untuk itu. Pertanyaannya kenapa juga harus Jakarta? Apa daerah-daerah yang lain tidak bisa? Bisa, sama. Sekarang covid itu sudah semua merata di seluruh Indonesia Pak, dampaknya sudah merata. Jadi jangan katakanlah memang sentrumnya adalah Jabodetabek, tapi dampaknya itu sudah seluruh Indonesia. Dan kita ini berasal dari daerah pemilihan yang seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia itu ada 80 daerah pemilihan. Komisi IX itu paling tidak itu sudah separuh Indonesia kalau kita urus. Anggota kita ada 50 sekian dari dapil seluruh Indonesia.

Jadi saya kira kalau katakanlah pertanyaan-pertanyaan yang menimbulkan ketidakjelasan kenapa program alokasinya itu hanya terbatas pada wilayah-wilayah tertentu pasti tidak bisa di kontrol secara baik, itu yang akan menimbulkan masalah.

Saya kira itu, Pimpinan, tolong dijawab dulu pertanyaannya Saleh Daulay tadi, agar kita tahu pakai dananya apa segala macam. Dana-dana itu seperti yang Ibu Dewi sampaikan bisa itu dilakukan. Atau dana CSR nya bisa dialokasikan.

Dana program kita yang tempo hari tidak ada kesepakatan, inikan tertutup, kesepakatan katakanlah bagaimana kalau itu untuk menangani

*covid*, dengan aturan-aturan yang memang tidak bisa lagi kita yang sekarang ini mengusulkan banyak hal. Kita harus sekarang semua rakyat harus di bantu di daerah pemilihan kita.

Saya kira itu, Pimpinan. Jangan katakanlah kita bolak-balik berkaitan dengan penanganan Covid-19 ini tidak bisa secara optimal kita lakukan, padahal sebenarnya kita bisa. Kita mau atau tidak saja, Direksi mau atau tidak saja. Kalau dia tidak mau ya sudah, rapat ini selesai.

Saya kira itu, Pimpinan.

Terima kasih.

*Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumsalam.*

Silakan Pak dijawab.

**DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN (AGUS SUSANTO):**

Terima kasih.

Jadi mungkin yang belum terjawab tadi yang terkait dengan bantuan sosial ini karena belum dilakukan. Jadi menjawab dari pertanyaan Bapak tadi apa saja yang sudah dilakukan itu sudah kita sampaikan di dalam buku ini. Ada yang 'dan', ada juga yang 'sedang dalam proses'.

**INTERUPSI F-GERINDRA (Hj. SRI WULAN, S.E.):**

Pimpinan, interupsi.

Jadi dengan kata-kata 'belum dilaksanakan' ini harus diperjelas. Jadi maksudnya mana yang sudah dilaksanakan, mana yang belum dilaksanakan. Jadi kita jangan dibikin putar-putar. Karena dari tadi saya memperhatikan juga jawaban Bapak berputar-putar.

Terima kasih.

**DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN (AGUS SUSANTO):**

Jadi yang sudah 'dan' dan yang 'belum' kami tulis di dalam bahan ini. Ada tulisannya 'dan', dan ada tulisannya yang '*on progress*'.

Jadi seperti yang *on progress* ini di halaman 14. Satu, relaksasi iuran BP Jamsostek. Yang kedua, bantuan *preventif* dan *promotif*. Ini yang *on progress* jadi sudah kita tulis di dalam buku ini halaman 14 dan halaman 15. Ini yang kami minta untuk dijelaskan oleh Direktur Pelayanan, karena ini terkait di Direktur Pelayanan.

Terima kasih.

**INTERUPSI F-PDIP (MUCHAMAD NABIL HAROEN, S.Pd., M.Hum.):**

Interupsi, Pimpinan.

Ini saya lihat jawabannya BPJS ini muter-muter saja.

Jawabannya Pak Saleh kenapa tidak di Malaysia itu belum di jawab. Terus tadi “kami belum jelaskan karena ini belum dilaksanakan”. Ini sudah jelas ada yang *done*, ada yang tidak.

Sudah, saya minta komitmen saja, ini serius tidak ini mau jawab? Kalau tidak, kita persilakan pulang saja. Kita mau rapat sama Dewas saja. Tidak jelas kalau begini ini.

Banyak pertanyaan yang saya mau tanya ke BPJS ini, cuma saya tahan saja ini. Ini puasa saya jadi emosi saya ini. Komitmen tidak, mau jawab tidak?

#### **KETUA RAPAT:**

Bapak Agus dari Dirut BPJS, teman-teman kan tadi sudah menyampaikan kembali ini dipertegas. Yang paling gampang ya, mengapa harus ojol, mengapa di Jakarta. Tadi ada sebagian di jawab “karena mungkin peserta tadi”, Bapak menjawab seperti itu. Tapi kenapa hanya di Jakarta, itu perlu dipertegas. *By name* apa *by address*, apa hanya sekedar begitu saja?

Kan kalau Bapak menyampaikan “oh karena peserta” alasannya, artinya kan itu *by name/by address*. Tapi kalau itu disampaikan di jalan kan tidak tahu siapa yang diberi. Warteg misalnya, tadi pertanyaan-pertanyaan itu juga belum dijawab oleh teman-teman.

#### **F-PDIP (ABIDIN FIKRI, S.H.):**

Mohon maaf, tidak sampai satu menit, 30 detik saja.

Kalau tidak dijelaskan secara konkrit saya khawatir ini akan menimbulkan spekulasi. Justru teman-teman Direksi memanfaatkan kondisi Covid-19 ini untuk katakanlah mengambil uang dari peserta itu. Mereka tidak mau transparan. Mereka jadi menumpang di isu Covid-19 ini untuk melakukan program-program yang tidak bisa di kontrol. Itu kekhawatiran/kecurigaan kita kalau katakanlah kita tidak mendapatkan penjelasan yang baik. Jadi jangan sampai dengan adanya covid ini justru malah menimbulkan persoalan baru. Niatnya mau bagus tapi ada yang menumpang. Bisa jadi ini menimbulkan masalah *conflict of interest* terjadi. Ini bisa menimbulkan kecurigaan kita apakah mungkin ada korupsi di situ.

Jadi ini yang menurut kami ini ada masalah, jelaskan saja argumen-argumen kenapa di Jakarta. Itu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan kita. Saya ini menyampaikan ini untuk membantu agar tidak menyebar spekulasi-spekulasi diantara anggota bahwa Direksi BPJS Tenaga Kerja memanfaatkan Covid-19 ini untuk menarik keuntungan dari dana-dana yang bisa dialokasikan tapi sebenarnya tidak jelas. Wujudnya ada, untuk Ojol untuk apa, tapi tidak terkontrol secara baik. Karena apa, karena tidak dijelaskan kepada Komisi IX sehingga menimbulkan spekulasi macam-macam.

Saya kira itu, Pimpinan, jelaskan saja. Misalkan warteg berapa ribu untuk kebutuhannya sekian, segalam macam. *Simple* saja. Kalau soal katakanlah untuk konsentrasi kepada yang terdampak, bukan hanya Jakarta saja. Sentrumnya memang di Jakarta, tapi di daerah pemilihan kita sudah berjibaku untuk menolong/berbuat supaya usulan kita untuk meringankan beban dari konsituen kita yang peserta dari BPJS TK yang di PHK, yang dirumahkan di daerah pemilihan masing-masing.

Oleh karena itu menurut kita, kalau itu menjadi bahan kita untuk katakanlah bertindak dalam rangka Covid-19 ini itu bisa kita lakukan secara bersama-sama. Jadi jangan katakanlah ada yang menumpang di isu ini untuk mengambil keuntungan. Kalau tidak dijelaskan itu menimbulkan kecurigaan. Dan namanya DPR kan wajar saja dia melakukan pengawasan, karena memang tugas dia untuk melakukan pengawasan.

Jadi *simple* saja sebenarnya, dijelaskan saja, tidak apa-apa. Kita mengerti apa yang harus dilakukan. Tetapi kalau ada yang disembunyikan, kita pun juga tahu 'ini main-main'. Oleh karena itu saya kira, Pimpinan, karena ini rapat tertutup tidak ada dusta diantara kita, diselesaikanlah. Jangan sampai katakanlah kita menimbulkan soal baru. Direksi juga ingin katakanlah kerjanya bagus, dan juga ada tanggap terhadap wabah ini juga ikut serta dalam meringankan beban kita semua. Dan mudah-mudahan dengan rapat ini kita ada titik terang agar kita bisa konkrit apa yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan warga kita/konsituen di Dapil kita yang sekarang dirumahkan, kena PHK dan lain sebagainya.

Saya kira itu bisa dibahas, Ibu Ketua. Dan saya mohon kapoksi yang hadir di rapat pada sore ini mungkin setelah rapat ini ditutup nanti cobalah rapat. Atau kapoksi dengan Pimpinan dan dengan Direksi untuk membahas langkah-langkah konkrit apa yang harus dilakukan untuk katakanlah kita bersama-sama dalam rangka menangani Covid-19 ini di daerah pemilihan kita masing-masing.

Saya kira itu, Pimpinan.

Terima kasih.

*Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Abidin.

Silakan Pak.

..... (.....):

Mohon maaf, karena saya lihat supaya lebih maju saja.

Jadi banyak pertanyaan tadi sebenarnya tidak bisa langsung dijawab Pak Agus, karena yang mengurus pelayanan itu Pak Krisna. Jadi semua pertanyaan tadi pelayanan itu ke Pak Krisna, tapi tidak kita izinkan dari tadi Pak Krisna sehingga bolak-balik. Jadi saya mohon Pak Krisna sekarang dikasih waktu untuk berbicara.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak.

**INTERUPSI F-PDIP (MUCHAMAD NABIL HAROEN, S.Pd., M.Hum.):**

Interupsi, Pimpinan.

Jadi siapa yang bilang kita tidak mempersilakan Pak Krisna. Selain Pak Agus saja boleh bicara. Jadi Pimpinan yang mengatur rapat. Jangan mitra ikut atur-atur rapat di sini. Dan lucu juga kalau Dirut terus tidak paham persoalan ini. *Ngapain* jadi Dirut. Mending jadi staf saja kalau tidak paham begini. Ditanya kan harus tahu yang dilakukan anak buahnya. Dewas ini harusnya mengawasi direksi. Malah *bantuin*, bagaimana ini.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Nabil.  
Pak Nabil ini menjelang berbuka puasa ini semakin keren.

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Kita memberikan waktu kepada Dirut. Terserah Dirut akan siapa yang menyampaikan. Jadi kita dari tadi mempersilakan. Dari BPJS tidak menyebut nama, jadi terserah Pak Agus akan memberikan waktunya kepada siapa.  
Silakan.

**DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN (AGUS SUSANTO):**

Terima kasih.

Jadi tadi ada pertanyaan kenapa bukan Malaysia. Ini kita berikan berdasarkan permintaan dari kedutaan besar dan juga dari Kementerian Luar Negeri, serta Kementerian Tenaga Kerja. Jadi kami mendapatkan surat dari mereka untuk memberikan bantuan kepada PMI di Hongkong, Taiwan, Korea Selatan, dan Brunei. Malaysia kami belum mendapatkan. Mungkin demikian penjelasan kami. Mungkin yang lain jika diperkenankan mungkin bisa.

**KETUA RAPAT:**

Silakan Pak.

**INTERUPSI F-GERINDRA (drg. PUTIH SARI):**

Pimpinan.

Tadi terkait PMI tadi kan larinya 'permintaan dari sana'. Jadi lepas mekanisme dan bagaimana teknis pembagian juga diserahkan langsung oleh BPJS TK kepada KBRI tanpa ada *report* kemana saja penyaluran bantuan yang diberikan oleh BPJS TK.

**KETUA RAPAT:**

Nanti biar sekalian dijawab ya, Ibu Putih. Terima kasih.  
Silakan ke Pak siapa yang akan menjawab.

**MANAGER OPERASIONAL BPJS KETENAGAKERJAAN:**

Terima kasih Ibu Pimpinan.

Bapak/Ibu Anggota Dewan yang terhormat,  
Ketua DJSN, Bapak Pimpinan dari Dewas, Bapak Dirut dan Teman-teman  
Direksi,

Mohon izin kami mau menyampaikan. Pertama mau menyampaikan tentang kondisi pelayanan pada saat masa *covid*. Jadi kita pelayanan publik tetap ada di tiap cabang. Tetapi kita memberikan kemudahan, khususnya di wilayah PSBB ataupun di wilayah nasional lainnya, bagi peserta yang ingin melakukan klaim JHT tidak harus datang ke kantor cabang.

Jadi ada yang tadi disebut yang kita dengar namanya Andrian Online. Tetapi masih banyak saudara-saudara kita yang senang datang ke cabang walaupun sudah kita publikasikan secara *massive*.

Itu kalau datang ke cabang, kita di tiap cabang kita siapkan namanya *drop box*. Jadi walaupun mereka ada di cabang, ada *drop box*-nya, kita tetap memperhatikan yang disebut *physical distancing*. Jadi tidak ada yang namanya tatap muka berdekatan. Jadi memang disitu ada petugas kami yang ditunjuk, lalu dia akan berkomunikasi melalui sarana *digital*, apakah itu *ipad* ataupun TV, dengan petugas kami yang ada di dalam.

Jadi selama sebulan terakhir, kami kalau boleh menyampaikan apa adanya, di minggu pertama sejak terjadinya *covid* kita memberlakukan *work from home* di lokasi-lokasi tertentu itu kapasitas produksi kita, kurang lebih kapasitas *performance* kita, itu masih di *level* 40 persen. Jadi kurang lebih kalimatnya banyak *pending*-nya. Karena semuanya merubah budaya. Budaya di intern kami untuk operasional, juga ada budaya di peserta itu sendiri. Tapi dengan berjalannya waktu semakin membaik. Tetapi masih banyak peserta kita yang datang ke *drop box*.

Sekarang permasalahannya kalau kami mau menyampaikan pelayanan per lapangan. Tidak semua orang dikasih tahu cara antrian *online*, lalu *upload* dokumen, mereka mengerti. Jadi karena ini kelihatannya buat mereka *ribet*, mereka cenderung menyuruh teman-temannya di lingkungan pabriknya, atau saudaranya, atau kalimatnya 'nyuruh calo', sehingga datang ke kami banyak yang disebutnya 'calo'. Mereka yang tidak mau repot-repot. Ada tipenya masyarakat pekerja yang senangnya datang ke kantor cabang, kita siapkan *drop box*.

Jadi kalau kita melihat ke karakter kultur, saya punya data kebetulan, yang tidak lengkap dokumen itu 30 persen. Yang datang ke *drop box* tidak lengkap dokumen pun 30 persen. Jadi itu yang kita *improve*.

Jadi kami mempunyai kendala di internal, kami harus membudayakan dulu. Karena kita juga punya protokol pelayanan selama masa *covid*, tetapi kami juga harus membiasakan pekerja-pekerja kita juga supaya, sebetulnya ini *secude*, permasalahan lain di lapangan adalah masih banyak TK-TK kita yang datangnya tidak ada *handphone email*. Disitulah kesulitannya waktu kita mau melakukan namanya verifikasi digital. Karena kita tidak mau melanggar aturan kirim-kirim, salah bayar, kurang bayar, lebih bayar. Karena tidak ada data HP, itu kelemahan yang selama ini. *Handphone*-nya masih suka berubah-ubah, jadi data yang ada di kita sama data yang di punyanya mereka yang terbaru *handphone*-nya karena ganti-ganti.

Jadi kalau boleh saya kasih tahu, yang suka datang mengambil selama ini, apakah selama *covid* ataupun sebelumnya, itu usia kepesertaannya 1 sampai 3 tahun. Jadi ini sepertinya sesuai dengan kultur di kawasan industri,



mereka bikin kontrak itu rata-rata dua tahunan. Bikin kontrak ganti perusahaan *outsourcing*, tukar lagi. Yang sudah diputus kontrak baru mengambil JHT. Usia peserta rata-rata 1 sampai 3 tahun. Lalu yang mengambil usianya 20 sampai 30 tahun usia pesertanya. Lalu saldonya kebanyakan mengambilnya rata-rata di 3 sampai 5 juta, upahnya 3 sampai 5 juta. Lalu saldonya waktu mengambil rata-rata 5 sampai 10 juta. Itu karakter yang banyak ini mengambil.

Jadi protokol pelayanan kami dari waktu ke waktu, hari ke hari, minggu ke minggu, kita perbaiki sistem. Karena perubahan budaya ini, ada yang kerja di rumah, kerjadi kantor, ini memerlukan kerjasama dan koordinasi yang luar biasa. Tapi kita disini memang masih punya banyak kelemahan, mohon jujur. Tapi memang semangat kita untuk perbaikan itu untuk merubah terus, saya pikir ini luar biasa. justru hikmahnya pada saat kita melakukan di masa *covid* luar biasa untuk memperbaiki namanya *continuous process improvement*. Itu yang terkait pelayanan.

Jadi kita juga punya yang namanya 175 lewat *contact center*. Tapi sayangnya 175 belum bisa melakukan klaim. Jadi kalimatnya disitu hanya untuk tanya-tanya, ataupun bersifat informasi.

Kembali tadi ada pertanyaan dari Pak Saleh Daulay tentang *mayday*, mau seperti apa ini *mayday*, karena kita tinggal beberapa hari lagi. *Mayday* ini bukan hanya pekerja di Jakarta saja. Karena kalau di Jakarta biasanya kita diminta diarahkan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Tapi sampai saat ini sampai tanggal sekian kita belum mendapatkan arahan seperti apa. Tapi kami di internal kami dengan anggaran yang sangat terbatas, kita minta ini yang namanya *mayday* melibatkan unsur pekerja, serikat pekerja, atau individu di seluruh titik cabang ataupun wilayah ataupun pemberi kerja.

Jadi kami sudah bikin surat edaran. Bentuknya bisa berbentuk *webinar*, sifatnya edukasi, bisa berbentuk untuk edukasi buat vokasi, bisa juga berbentuk namanya bhakti sosial atau pembagian sembako. Kita merencanakan di tanggal 1 secara *massive* kita memberikan sembako kepada SP-SP tripartit yang di wilayah DKI. Tetapi kita kan bentuknya sembako, kita harus koordinasi sama Bulog. Bulog tidak bisa serta merta seminggu langsung barangnya siap. Itu masalahnya Bulog tidak bisa mempersiapkan barangnya seminggu harus ini. Jadi memerlukan waktu 2-4 minggu.

Jadi direncanakan di 1 Mei dengan publikasi kita, kita akan memberikan secara simbolis/seremoni kepada SP-SP tripartit di wilayah DKI, dan juga nanti sembakonya atau bhakti sosialnya diberikan juga di nasional. Jadi itu merencanakannya seperti itu. Jadi kita melibatkan cabang atau wilayah supaya melibatkan *engage* semua pengurus ataupun individu yang ada di SP dan SB.

Kami ada sedikit informasi tentang promotif/prefentif, mohon izin Bapak/Ibu Anggota Dewan yang terhormat. Promotif/prefentif kita anggarkan.

**INTERUPSI F-PAN (Dr. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A.):**

Sebelum itu, Ibu Pimpinan, terima kasih.

Saya mau tanya, jadi Bapak selalu *ngomong* “dana terbatas”, berapa anggarannya yang mau Bapak bhakti sosial itu? Dari tadi tidak pernah dijawab

ini soal anggaran. Bapak ini pejabat publik, kalau saya mau tanya itu harus Bapak kasih tahu. Bagaimana ceritanya dari tadi ini? Masa kami tidak boleh tahu anggarannya berapa bhakti sosial itu. Yang sedikit itu berapa?

Kemudian Bapak bilang tadi "di Jakarta", nanti habis itu ke nasional, bagaimana maksudnya itu tadi? Tadi Jakarta dulu, habis itu nasional. Nasional yang mana? Kalau Bulog itu di nasional ada, di semua provinsi ada. Bahkan di kabupaten/kota juga banyak. Ini tidak jelas sebetulnya program-program ini, menggunakan anggaran di dalam itu tidak jelas. Ini yang maksud saya diperjelas ke kita. Inilah rapat ini pentingnya.

Tolong diperjelas dulu Pak, Ibu Pimpinan.

Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak.

Jadi yang dipertanyakan Anggota tadi bahwa ingin tahu terbatas itu sebenarnya dalam berbentuk angka kira-kira berapa?

#### **BPJS KETENAGAKERJAAN/MANAJER OPERASIONAL:**

Terima kasih Ibu Pimpinan.

Kalau di Jakarta itu kita punya anggaran maksimum 1 miliar di tempat saya/di tempat pelayanan. Kecuali nanti mendapatkan dukungan dari unit kerja lain. Tapi di tempat saya untuk Jakarta 1 miliar. Di tiap cabang itu menggunakan anggaran cabang. Di tiap cabang punya anggaran sendiri-sendiri, menggunakan kalimatnya disitu namanya 'pembinaan administrasi'. Tidak ada disitu sebutannya 'khusus *mayday*'. Jadi mungkin hanya 20-30 juta per cabang. Jadi tidak besar.

Jadi kalau yang tadi di nasional, karena kita biasanya suka bekerja sama dengan Kemenaker, kami sudah anggarkan 1 miliar untuk di tahun ini. Jadi kalau di cabang nanti kita kembalikan kepada wewenang atau kebijakan masing-masing. Kalau memang dia punya kelebihan bisa lebih besar lebih bagus. Kurang lebih seperti itu untuk yang *mayday*. Jadi tidak besar itu.

#### **KETUA RAPAT:**

Jadi itu kan anggaran normal ya. Kalau dalam *covid* inikan berarti gerakannya bukan gerakan normal. Gerakan salto ya Pak. Jadi kalau ada gerakan salto saya kira ada anggaran salto tidak khusus untuk yang *covid*? Kalau itukan 1 miliar, 20, 30, per cabang itukan anggaran normal. Kalau *covid* itu kira-kira berapa?

#### **BPJS KETENAGAKERJAAN/MANAJER OPERASIONAL:**

Mohon izin.

Jadi tadi mungkin memang belum sampai ke *covid*. Jadi ini sekarang yang saya mau sampaikan adalah yang terkait *covid*. Tadi baru ke kaitannya sama *mayday*.

Kalau *covid* kita ada namanya promotif/prefentif. Di situ ada anggaran untuk tahun ini 12 miliar. Hanya 12 miliar di tempat saya. Kemarin kami sudah

radir di bulan lalu, waktu itu belum ada covid waktu menyusunnya, kita rubah yang namanya APD buat jakon atau yang lain-lainnya yang kira-kira kayak seminar tidak penting misalnya kita rubah kalimatnya menjadi APD yang terkait covid. Bisa untuk hasmat, *glove*, dan segala macam. Tapi hanya 7 miliar. 5 miliar memang masih punya ruang kalau kita mau pakai semuanya. Tapi kemarin kita siapkan *incase* kalau kita mau melakukan kegiatan promotif/prefentif lainnya, seperti misalnya *savety riding* dan sebagainya.

Itu jadi 7,5 miliar belum. Mungkin kalau sudah berjalan, karena surat edaran sudah berjalan di tiap cabang, tapi saya kalau sampai itu terimplementasi mungkin angkanya mungkin masih baru 5 persen karena surat edaran baru dua minggu sebelumnya.

**KETUA RAPAT:**

Saya usulkan kesepakatan nanti anggota, baik yang fisik maupun yang *virtual* yang hadir, kita minta catatan resmi berapa anggaran-anggaran mulai dari pusat sampai cabang, sehingga kita bisa melakukan pengawasan dengan baik.

Silakan Ibu Wulan.

**F-NASDEM (Hj. SRI WULAN, S.E.):**

Terima kasih.

Jadi saya harap bukan hanya catatan saja. Jadi kita disini juga kita diperjelas semuanya bahwa kita hadir disini juga tahu. Jadi saya pribadi juga tidak mengharapkan bahwa ini kita hanya mendapatkan catatan saja. Karena yang kita tahu bahwa, ini tadi kan barusan muncul angka, yang 12 miliar tadi terbagi dua, yaitu 7 yang dipakai, dan kemudian sisanya masih 5.

**BPJS KETENAGAKERJAAN/MANAJER OPERASIONAL:**

Sisanya yang tidak terkait covid. Masih ada peluang.

**F-GERINDRA (Hj. SRI WULAN, S.E.):**

Masih ada ruang maksudnya? 5 yang masih ada, betul? Apakah yang 7 miliar ini yang dipakai adalah untuk bantuan Covid-19 *in progress*? Beda?

**KETUA RAPAT:**

Tadi kan 7 dan 5. Lalu apakah yang untuk covid itu sedang *on progress*?

**BPJS KETENAGAKERJAAN/MANAJER OPERASIONAL:**

Masih *on progress*. Tapi saya belum lihat. Harusnya mereka sudah jalan. Jadi mungkin ada yang sudah jalan, ada mungkin yang belum jalan. Karena surat edaran baru beredar dua minggu yang lalu. Jadi saya harus telepon satu-satu siapa-siapa yang sudah jalan, siapa yang belum.

**INTERUPSI F-NASDEM (Hj. SRI WULAN, S.E.):**

Pimpinan, sebentar.

Maksudnya *on progress* ini ada dalam data ini atau bagaimana? Jadi kan disini bahwa disampaikan bantuan Covid-19 *in progress* itu kan ada beberapa kegiatan. Apakah itu yang dimaksud atau ada yang lain? Dan yang lain itu apakah sudah jalan atau belum?

Terima kasih.

**BPJS KETENAGAKERJAAN/MANAJER OPERASIONAL:**

Mungkin mohon izin kalau Bapak/Ibu bisa melihat halaman 15.

**KETUA RAPAT:**

Sebelum Ibu Dewi Asmara, kita lihat dulu halaman 15.  
Silakan Pak lanjutkan dulu.

**BPJS KETENAGAKERJAAN/MANAJER OPERASIONAL:**

Jadi yang 7 miliar itu digunakan untuk ini yang 1, 2, dan 3.

**KETUA RAPAT:**

Jadi berarti kan sudah ketahuan dari awal kalau itu 7. Berarti bukan *on progress*. Ini berarti kan sudah terdistribusikan, sudah dianggarkan.

**BPJS KETENAGAKERJAAN/MANAJER OPERASIONAL:**

Belum sampai ke individu. Mungkin di kita masih beli barang, masih pengadaan, masih proses-proses seperti itu.

**KETUA RAPAT:**

Silakan Ibu Dewi.

**F-PG (Hj. DEWI ASMARA, S.H., M.H.):**

Begini, Pimpinan.

Inikan kita menjalankan fungsi pengawasan. Sehubungan adanya kegiatan pandemi covid ini saya rasa kalau sekarang mau dibahas tidak bakalan selesai. Sebaiknya kita tunda saja, kita *break* saja sampai dengan besok.

Ini sebagai contoh saja, kita kan berarti tidak tahu perencanaan secara detail itu apa. Ini saya ambil saja halaman 34 yang dari Dewas ini misalnya. Disinikan disebut 'Komposisi program RKAT Dana Operasional 2020'. Kalau kita lihat ini 7 utama, humas, hukum, SPI, sekretariat badan, proyek manajemen. Ini ada tulisannya ini, bansos, bencana. Termasuk Covid-19, APD, sembako, sosialisasi 5 miliar, dalam kurung (Humas). Itu ada tulisannya ini 'berada di bawah Direktur Utama', kok bisa direktur utamanya tidak tahu?

Ini yang benar yang mana? Apa Dewas mengetiknya agak salah ketik, tidak tahu, apa bagaimana? Dari situ kita balik lagi ini ke penjelasan ini. Ini penjelasan detail. Ternyata yang konon katanya 5 M ini buat macam-macam, ternyata ini cuma dipakai 615 ribu masker, 123 ribu vitamin, kan sedikit sekali kalau kita lihat halaman 15. Berarti kan masih banyak yang belum.

Yang katanya '*on going*' surat edaran sudah dua minggu. Dua minggu itu tidak tahu, mungkin ada yang sudah, ada yang belum. Jadi artinya sebenarnya ini kita bicaranya masih *how-how*, halusinasi. Jadi saya rasa kalau memang kita benar mau pengawasan ya ini harus jelas.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Ibu Dewi.

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Saya tawarkan, karena ini ternyata masih banyak data-data yang belum jelas, ini jumlahnya juga masih jumlah angka barang, bukan nominal uang. Karena contoh tadi APD 615 ribu masker *bla-bla-bla*. Ini yang perlu kita perjelas. Jadi saya tawarkan kepada Anggota, bagaimana kalau kita skors, kan skors itu 24 jam ya, kita lanjutkan besok. Karena kita kalau malam ini terlalu ini. Karena kita puasa juga, jadi kita skors sekarang, besok kita lanjutkan dengan data yang lebih detail. Termasuk data di tiap kabupaten/kota.

Karena begini, Bapak/Ibu yang saya hormati, anggota ini sekarang posisinya banyak di daerah. Ini banyak fraksi yang tidak hadir karena posisinya di daerah. Kita berharap yang di daerah pun juga melakukan pengawasan yang sama di kantor-kantor cabang.

Saya tawarkan begitu. Tolong dibuka *mute*-nya untuk anggota yang ada di daerah silakan bila ada usul. Tolong dibuka *mic*-nya.

**F-PAN (Dr. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A.):**

Jadi Ibu Ketua, menurut saya walaupun ditunda besok ini tidak ada gunanya. Kalau memang tidak ada niat baik dari BPJS Ketenagakerjaan ini untuk memberikan data informasi kepada kita untuk apa.

Tadi pertanyaannya Pak Nabil saya tidak tahu sudah di jawab belum yang soal mafia-mafia tadi itu. Kalau tidak, kasih dulu kesempatan itu sama BPJS untuk mafia dulu, biar kita bongkar dulu sekalian mafia. Biar main mafia dulu kalau tidak. Lagi tertutup ini sekalian. Kan tadi sampai Jam 17.45 itu, Ketua. Main mafia dulu kalau tidak.

**KETUA RAPAT:**

Jadi jelas kalau hari ini tidak akan selesai, karena banyak data-data yang belum disiapkan. Jadi kita akan memberikan waktu yang kira-kira bisa dijawab sekarang. Kita tadi waktunya sampai Jam 17.45.

Izin, Pak Direksi, kita lanjut ke Dewas.

**DEWAN PENGAWAS BPJS KETENAGAKERJAAN (POEMPIDA HIDAYATULLAH):**

Izin, Ibu Pimpinan, Pak Ketua sedang sholat.

**KETUA RAPAT:**

Yang ada saja bisa untuk mewakili, silakan.

**DEWAN PENGAWAS BPJS KETENAGAKERJAAN (POEMPIDA HIDAYATULLAH):**

Terima kasih Ibu Pimpinan.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,  
Bapak Ketua DJSN dan Ibu Anggota DJSN yang saya hormati,  
Teman-teman Dewas dan Direksi yang saya hormati tentunya, dan  
Seluruh yang hadir di sini,

Tadi dari Pak Nabil bertanya tentang *statement* saya yang di media yang kemudian di *quote* di beberapa media *online* lainnya tentang mengenai masalah keberadaan mafia di praktek investasi di BPJS Ketenagakerjaan. Saya tidak akan langsung *direct* menguliti satu persatu, tapi saya akan membicarakan di dalam konteks cara berpikir saya yang mengatakan bahwa memang ada.

Jadi yang pertama adalah definisi mafia. Definisi mafia yang saya mengerti itu adalah sekelompok orang ataupun satu organisasi yang bekerja bersama-sama di dalam konteks melakukan kegiatan yang ilegal, atau merupakan suatu tindak kejahatan.

Kedua, di BPJS Ketenagakerjaan ini sistem informasi untuk investasinya tidak lengkap. Artinya, basis proses investasi dari mulai sesuatu itu di *propose* sampai kemudian di eksekusi ini tidak terekam dengan baik. Jadi satu resiko yang sangat tinggi disitu.

Resiko apa? Resiko banyak hal. *Deal-deal* yang tidak jelas, dan lain-lain. Saya tidak sebut jenis portofolionya apa. Tapi semuanya sama, tidak terekam dengan jelas sistem informasi tersebut.

Yang kedua adalah sistem manajemen resiko yang tumpang tindih dan tidak jelas juga. Padahal amanat bahwa yang namanya praktek investasi itu harus *comply* dengan PP. Di dalam undang-undang dan PP ada kewajiban menggunakan yang namanya manajemen resiko. Di BPJS Ketenagakerjaan tidak ada. Bisa saya bilang terbalik-balik. Kenapa demikian? Bapak dan Ibu bisa lihat di paparan Dewas di halaman 13 dan 14. Disitu sudah jelas, ada Perdir tentang resiko *appetite/risk appetite*, atau selera resiko daripada lembaga. Dikatakan disitu harus *slow* tingkatnya di dalam konteks investasi, strategis, operasional, *bla-bla* dan semuanya. Apa yang terjadi, Bapak-bapak/Ibu-ibu? Tadi juga sudah diakui bahwa investasi di saham itu mempunyai resiko yang paling besar. Tetapi kenapa di tahun 2015, 2016, 2017 semuanya meningkat di dalam konteks saham. Dan Perdir ini tidak pernah di revisi dari 2015, jadi selera resiko tidak pernah di *declare* disitu.

Saya berkali-kali sudah bicara secara internal. Tadi saya disindir oleh mantan kolega saya, Saudara Indra. Saya berharap sebenarnya kalau ada Pompida disitu akan ada perubahan. Saya di dalam juga mendorong terus terjadi perubahan. Tapi ini di dalam konteks investasi dahsyat sekali, luar biasa, mereka sangat sulit memberikan data, satu. Yang kedua, SDM nya sudah bertahun-tahun bercokol disitu, dan itu itu saja. Tidak bisa diganti-ganti. Saya tidak mengerti kenapa tidak bisa diganti-ganti.

Kemudian, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, dana yang kita kelola ini dana murah, dana yang murah banget, siapa saja mau. *Hedge fund* di Hongkong itu bisa menawarkan bagi hasil 20 persen. Kita ini hanya cuma melebihi daripada bunga deposito. Plus 0 koma sekian juga dianggap plus. Jadi ini murah sekali. Padahal bank saja meminjamkan ke karyawan-karyawan, meminjamkan kepada pekerja-pekerja kita itu dengan angka yang jauh lebih tinggi daripada itu.

Modus operandinya bagaimana Pak kalau bicara ada mafia?

Bapak-bapak/Ibu-ibu boleh cek, di setiap pengelolaan dana kita, terutama di dalam konteks yang namanya reksadana, yang namanya saham, itu ada yang namanya manajer investasi, dan juga yang namanya sekuritas. Bapak-bapak/Ibu-ibu, disinilah modus operandi itu bermain. Ada yang namanya broker-broker disitu, *rent seeker-rent seeker* yang nitip, dan lain-lain. Kita tidak tahu bank-bank daerah itu menjanjikan bunga itu berapa. Kita tidak pernah tahu *deal-deal*-nya itu. Sulit sekali menangkap ini semua.

Yang lucunya, Bapak-bapak/Ibu-ibu, di tahun 2018 kami melakukan audit bersama *Prize Waterhouse Cooper* yang menyatakan bahwa insan BPJS Ketenagakerjaan itu, artinya begini, BPJS Ketenagakerjaan tidak boleh berinvestasi di saham yang dimiliki oleh BPJS Ketenagakerjaan. Sampai sekarang aturan ini tidak ditegakkan. Jadi ada satu PP yang mengatakan bahwa BPJS Ketenagakerjaan tidak boleh berinvestasi di saham yang dimiliki oleh insan BPJS Ketenagakerjaan. Artinya apa, Bapak-bapak/Ibu-ibu, harus ada pelarangan insan BPJS Ketenagakerjaan bermain saham secara terbuka, agar BPJS Ketenagakerjaan mempunyai keleluasaan bermain ini.

**INTERUPSI F-PAN (Dr. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A.):**

Interupsi, ada tidak orangnya itu?

**DEWAN PENGAWAS BPJS KETENAGAKERJAAN (POEMPIDA HIDAYATULLAH):**

Semua bermain disana. Semua bebas, karena tidak ada larangan Pak.

**F-NASDEM (Hj. SRI WULAN, S.E.):**

Maksudnya semua kayak apa? Diperjelas, Pak Pompida.

**DEWAN PENGAWAS BPJS KETENAGAKERJAAN (POEMPIDA HIDAYATULLAH):**

Artinya, karena tidak ada larangan bermain saham, tidak ada kontrolnya, semua orang ikut. Karena tidak ada kontrolnya, kira-kira seperti itu.

Jadi, Bapak-bapak/Ibu-ibu, juga saya ingin angkat satu isu, bahwa reksadana yang BPJS Ketenagakerjaan ambilin 100 persen dimiliki oleh BPJS Ketenagakerjaan. Artinya apa, ketika kita masuk 100 persen pernah tidak ada orang memiliki reksadana tersebut? Pernah tidak? Karena kita baru yang masuk 100 persen. Artinya, kenapa kita bisa melakukan mengambil resiko 100 persen, kenapa reksadana itu kita bisa tahu/yakin reksadana ini sukses. Masuk lagi kedalamnya kalau Bapak-bapak dan Ibu-ibu berani. Saya punya data, 'nyuri-nyuri lah', bukan data resmi, ini 'nyuri-nyuri'. Di dalam reksadana itu seperti apa, bongkar satu-satu.

Jadi saya sangat salut dengan senior saya, Pak Darul Siska, tadi mengangkat yang namanya *cut lost*. Kenapa *cut lost* ini seolah-olah jadi *cut* dan *lost*? Tidak, tidak seperti itu. *Cut lost* itu meng-*cut* yang namanya *lost*, artinya mengurangi potensi kerugian. Bukan *cut* terus jadi *lost*, bukan. Tapi ini diolah seolah-olah supaya dana itu tetap di dalam satu portofolio aman jangka panjang. Dana murah, orang menikmati ini. Dan bisa saya pastikan, Bapak-bapak/Ibu-ibu, sampai sekarang tidak ada investasi BPJS Ketenagakerjaan yang mensejahterakan pekerja. Semuanya memperkaya orang yang sudah kaya. Saya ulangi, semuanya memperkaya orang yang sudah kaya, dan saya sangat sedih dengan itu. Berkali-kali saya secara internal itu mengingatkan ini. Tapi kalau kemudian saya sendiri berbicara dan tidak ada mau perubahan, sulit.

Oleh karena itu di dalam forum yang terhormat ini saya secara pribadi, dan juga dari komite yang kebetulan saya pimpin, Pak Ketua Dewas, saya mohon dukungan dari DPR untuk mengadakan yang namanya audit forensik di tahun ini. Rencananya kita akan kerjakan di awal tahun. Tapi karena ada *covid* ini ya jadi tertunda, Bapak-bapak/Ibu-ibu. Saya akan tetap konsisten, saya akan bongkar ini. Dan nanti saya akan laporkan waktunya ketika kita semua sudah melihat dalam bentuk yang lebih konkret lagi.

Demikian saja, terima kasih.

*Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumsalam.*

**INTERUPSI F-PAN (Dr. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A.):**

Izin, Ibu Pimpinan. Memperdalam.

**KETUA RAPAT:**

Sebentar Pak ya.



Silakan Pak. Cukup?  
Silakan Pak Saleh.

**F-PAN (Dr. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A.):**

Memang kita yang mau memperdalam ini.

Jadi, Pak Pompida, terima kasih. Ini sebetulnya sudah lama ini teman-teman bisik-bisik disini ini soal apa yang disampaikan Pak Pompida terkait dengan mafia BPJS Ketenagakerjaan ini.

Sekarang pertanyaan saya yang *simple* saja, mafia itu di dalam atau diluar?

Ini yang di tanya Pompida, yang jawab Ibu Dewi. Sebentar dulu, biar dia yang jawab. Yang bertanggungjawab kan di Pak Pompida ini.

**DEWAN PENGAWAS BPJS KETENAGAKERJAAN (POEMPIDA HIDAYATULLAH):**

Jadi ini semua saling terkait. Sinyalemennya ada orang di dalam, ada orang yang mantan orang di dalam, dan juga ada orang di luar. Kira-kira seperti itu.

**F-PAN (Dr. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A.):**

Berarti orang dalam dan orang luar, ada kerjasama.

Kemudian yang pertanyaan saya berikutnya, sebetulnya ini diketahui oleh seluruh Dewan Pengawas, atau hanya Pak Pompida saja yang tahu ini?

**DEWAN PENGAWAS BPJS KETENAGAKERJAAN (POEMPIDA HIDAYATULLAH):**

Saya tidak tahu. Tapi beberapakali di dalam konteks rawas saya melaporkan kecurigaan saya terhadap ini. Ada rekomendasi dari Dewas mengenai masalah seperti pelarangan, reksadana 100 persen yang berpotensi pidana, dan lain-lain. Banyak hal. Tapi juga nanti mungkin kita rekap terlebih dahulu. Intinya, saya pernah *sharing* ini, dan dewas-dewas yang lain juga tahu saya rasa.

**INTERUPSI F-PAN (Dr. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A.):**

Lagi, Ibu Pimpinan.

Tadi kan Bapak mengatakan investasi BPJS Ketenagakerjaan itu tidak ada yang mensejahterakan orang miskin atau pekerja, padahal itu uang pekerja. Rata-rata kan banyak yang pekerja yang miskin, di buruh-buruh. Pertanyaan saya, itu kalau memang hanya memperkaya orang kaya, yang Bapak maksud dengan 'orang kaya' itu siapa? Apa direksinya atau siapa? Ini harus jelas, supaya *clear*.

**DEWAN PENGAWAS BPJS KETENAGAKERJAAN (POEMPIDA HIDAYATULLAH):**

Bapak-bapak/Ibu-ibu bisa lihat portofolio saham misalnya. Pasti yang *blue chip*. *Blue Chip* itu perusahaan apa kira-kira? Apakah pernah ada kita mempunyai satu program berinvestasi di dalam konteks mengangkat UMKM misalnya? Tidak ada sama sekali. Jadi seperti itu, jadi boleh di cek itu satu persatu. *Statement* saya *shahih* itu.

**F-PAN (Dr. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A.):**

Nanti saya mau memperdalam lagi, tapi tidak enak sama Pak Nabil yang dari tadi mau nanya.

**KETUA RAPAT:**

Silakan Pak Nabil.

**F-PDIP (MUHAMAD NABIL HAROEN, S.Pd., M.Hum.):**

Terima kasih Pak Pompida.

Kira-kira apa lagi yang masih menjadi ke Gundahan Bapak? Kira-kira ke Gundahan apalagi yang masih ada didalam benak Bapak yang belum dikeluarkan? Karena ini forum tertutup saya pikir, dan kita bisa buka-bukaan disini Pak. Tadi kok masih ada yang tertahan. Dan Bapak sebetulnya butuh dukungan, kita dukung disini untuk kebaikan bersama. Bapak butuh apa kita dukung.

**DEWAN PENGAWAS BPJS KETENAGAKERJAAN (POEMPIDA HIDAYATULLAH):**

Langsung dijawab ya, Pimpinan, minta maaf.

Terima kasih Pak Nabil.

Yang jelas begini, Pak Nabil, di dalam konteks data saya ini saya minta akses ke dalam sistem saja saya tidak dikasih *username* dan *password*. Bagaimana saya bisa mengontrol pergerakan saham ataupun juga reksadana di dalam konteks sehari-hari. Tidak bisa sama sekali. Jadi saya harus cari-cari sendiri.

Saya kemudian dapat data tentang portofolio. Saya simulasi sendiri, saya buat semua sendiri. Di tanggal 19 Maret di ragab itu saya sampai nanya, "kok kita tenang-tenang saja". 19 Maret itu, Bapak-bapak/Ibu-ibu, *potential lost* kita itu ada di sekitar 60 T. *Potential lost* kita itu di 60 T, saya ulang. Dan di Ragab itu semua tenang-tenang saja, melaporkan bahwa: "Ya, kita situasinya siaga."

"Situasi siaga bagaimana?", saya bilang. "Ini harusnya dibicarakan ini bagaimana, mau ngapain kita".

Ini tidak main-main lagi. JHT kita per Januari itu tinggal 95 persen dananya. JHT kita per Januari sekarang ini sudah lebih di bawah 90 persen, sudah krisis. Jadi kalau ada ada *rush* (suara tidak jelas). BPJS Ketenagakerjaan tidak bisa bayar. Silakan di cek. Saya terbuka saja.

**F-PAN (Dr. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A.):**

Ini beda dengan penjelasan tadi, jauh sekali.

**DEWAN PENGAWAS BPJS KETENAGAKERJAAN (POEMPIDA HIDAYATULLAH):**

Silakan dicek. Jadi ini tidak main-main. Kondisinya kondisi sangat sulit sekali. Karena apa, karena kita ada portofolio yang tertahan di dalam konteks *potential lost* tadi. Tidak ada yang berani *cut lost* sehingga saham yang tergerus ini di bawah ini nunggu *bounce pack*. Dan ini ada yang bertahun-tahun.

Jadi nanti silakan di cek. Saya mencari data ini tanpa saya dikasih akses data. Saya terus terang, Bapak-bapak/Ibu-ibu, saya sudah tidak percaya angka-angka yang ditampilkan di dalam presentasi-presentasi. Kenapa demikian, karena ini bukan *raw data*. Ini adalah data olahan yang disajikan. Jadi Bapak-bapak/Ibu-ibu kalau minta data dari BPJS Ketenagakerjaan, tidak ada satu sistem yang kemudian memerintahkan bisa di *print*, tinggal milih saya mau ini-ini keluar, tidak ada. Datanya harus diambil, kemudian diambil ditampilkan di dalam *excel*, baru ditampilkan seperti yang Bapak-bapak/Ibu-ibu lihat. Inilah yang saya bilang tidak ada transparansi di dalam konteks angka-angka disana.

Kami sekarang sedang meluruskan ini bagaimana cara menghitung. Kalau kemudian saham dihitung dengan *yield on investment* menurut saya tidak masuk akal. Kinerja, misalnya saham ataupun reksadana, harus dihitung berdasarkan basis-basis yang lebih erat. Jangan berdasarkan *yield on investment*. Lebih baik kita banyak cara, ada *waited*, dan lain-lain. Nanti kita sedang merumuskan hal-hal ini dengan lebih baik tentunya.

Tapi, Bapak-bapak/Ibu-ibu, kita dalam posisi krisis, dan ini harus disadari. Tidak bisa kita bermain-main lagi. Tidak bisa kita kemudian berpikir bahwa ini dalam keadaan normal. Sekarang diminta diangkat 37-an hasilnya. Jadi ini sudah banyak revisi-revisi dan macam-macam.

Jadi forum yang terhormat ini di dalam konteks karena saya ditanya langsung, dan saya tidak bisa menutup-nutupi. Apa adanya saya sampaikan.

Demikian, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Pak Pompi, saya tidak tahu, apakah ada aturannya sebenarnya data itu sehingga tidak bisa di akses. Ini perlu jawaban secara ini, itu maksud saya. Terima kasih.

**DEWAN PENGAWAS BPJS KETENAGAKERJAAN (POEMPIDA HIDAYATULLAH):**

Ada aturannya, Ibu Sri Rahayu yang saya hormati. Jadi aturannya di undang-undang bahwa setiap data ataupun permintaan dari dewan pengawas/dewan direksi harus mengakomodasi dan dan harus menyampaikannya pada dewan pengawas. Itu aturannya. Tapi tidak di gubris. Dan saya diamkan, saya juga tidak mau memperpanjang ini. Karena ujung-

ujungnya nanti saya berhadapan dengan Pak Jusni, karena Pak Jusni harus buat tim panel di dalam konteks itu. Saya tidak mau melakukan itu, karena saya ingin bekerja saja. Dan saya tidak mau seolah-olah saya bermain politik menjatuhkan kolega-kolega saya, itu yang saya tidak mau. Saya ingin buka-bukaan. Berkelahi-berkelahilah, ribut-ribut, tapi selesai. Kalau saya mau main tusuk-tusuk belakang, saya lapor Pak Jusni. Saya dekat sama Pak Jusni sebetulnya. Cuma saya tidak mau, karena bukan itu targetnya, bukan seseorang terzalimi, tapi masalah yang terselesaikan, itu harapan saya.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Karena ini badan hukum publik ya, artinya siapapun harusnya bisa mengakses.

Silakan.

**F-PDIP (MUHAMAD NABIL HAROEN, S.Pd., M.Hum.):**

Terima kasih Pimpinan.

Jadi menurut saya ini harus betul-betul masuk di kesimpulan. Dan bagaimana Dewas ini betul-betul bisa mengakses ke dalam itu.

Saya harus mempersilakan teman-teman yang lain yang ada ikut *virtual* juga ikut mengupas ini. Karena ini sangat penting sekali. Contoh tadi pernyataan soal JHT antara Dewas dan Direksi ini berbeda, ini bahaya sekali. Jangan sampai nanti skandal Jiwasraya terulang di sini.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Silakan Pak Abidin.

**F-PDIP (ABIDIN FIKRI, S.H.):**

Apa yang disampaikan oleh Pak Pompida sahabat saya, usul saya dalam kesimpulan kita bentuk panja tentang BPJS Tenaga Kerja, agar kita dalam secara bagus. Karena panja mafia investasi di BPJS Tenaga Kerja. Saya kira itu upaya politik kita untuk menuntaskan apa yang diduga oleh Pompida sahabat saya yang sekarang sudah tidak tahan lagi ingin membongkar semua keadaan yang tidak memungkinkan dia bekerja secara baik di Dewas. Kita sama-sama dulu ada harapan dengan Pak Pompida di Dewas bisa diperbaiki BPJS Ketenagakerjaan.

Saya kira usul saya begitu, Ibu Ketua, kita berdasarkan tata tertib DPR bahwa fungsi pengawasan bisa kita bentuk panja tentang mafia investasi di BPJS Ketenagakerjaan. Saya kira itu usul saya. Saya usulkan itu atas nama pribadi nanti silakan kapoksi kalau setuju untuk dikomunikasikan dengan kapoksi PDI Perjuangan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Abidin.  
Silakan Ibu Kurnia.

**F-PKS (Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.):**

Terima kasih Pimpinan.

Ini jawaban dan pertanyaan saya terakhir pada rapat dengan BPJS Jamsostek sebelum reses. Waktu itu kita menanyakan banyak hal terkait dengan investasi ini, tetapi jawabnya masih normatif. Dan dijanjikan jawaban tertulis tapi jawabannya tidak sangat mendalam. Akhirnya hari ini terbuka.

Dan kita juga sama-sama tahu bahwa kemarin ada berita di awal-awal Maret pada saat *covid* ini sudah masuk ke Indonesia, ada rencana juga kan untuk investasi memborong saham yang lagi turun yang dilakukan oleh BPJS Jamsostek. Ini juga satu hal yang perlu di analisis lebih mendalam lagi.

Jadi kita juga harus mengingat juga rekomendasi dari panja yang sebelumnya. Karena sebelumnya saya sudah membaca di periode yang lalu sudah pernah ada panja itu kalau tidak salah. Dan hasilnya juga sebenarnya merekomendasikan untuk bisa memperdalam terkait dengan investasi ini bekerjasama dengan Dewas. Karenanya saya mengusulkan ada rapat khusus dengan Dewas yang terpisah dengan Direksi, sehingga bisa lebih mendalami lagi, supaya kita sama-sama tahu apa yang sedang terjadi dalam investasi saham ini. Ini adalah uangnya para pekerja yang saat ini sedang mengalami kesulitan, sedang mengalami penderitaan, jadi mari sama-sama kita buka hati nurani kita, dan kita sama-sama punya tanggungjawab terhadap semua yang kita lakukan.

Jadi saya mengusulkan, Ibu Pimpinan, agar ada rapat lanjutan lagi tentang ini. Karena tidak mungkin dilanjutkan malam ini rasanya. Pimpinan dan teman-teman kan juga harus segera istirahat. Karena ini puasa Ramadhan jadi harus dibatasi juga.

Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Memang puasa tidak masalah. Tapi kan ada yang tarawih di rumah. Terserah, *monggo* nanti, silakan. Keputusannya seperti apa silakan nanti.

**INTERUPSI F-PAN (Dr. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A.):**

Izin, Pimpinan, saya mau usul konkret saja.

Jadi begini, ini sebetulnya apa yang dijelaskan oleh Pak Pompida ini menurut saya hanya kulitnya saja. Jadi masih 'pemantik' kalau bahasa saya itu, jadi belum intinya ini. Karena itu kalau hanya pemantik kalau pun kita diskusikan sampai masa waktu kita rapat tadi diperpanjang sampai Jam 17.45 tidak akan selesai ini, Ibu Ketua.

Ini kan Pak Abidin juga progresif ini sebetulnya sarannya. Jadi Beliau mengusulkan untuk membentuk 'Panja Mafia Investasi BPJS Ketenagakerjaan'. Ini serius ini barang berarti kan.

Jadi menurut saya sebelum itu tentu kita boleh juga menurut saya memperpanjang rapat ini. Tapi bukan sekarang. Jadi saya usul besok kita mulai lagi rapatnya. Jadi karena itu ini bisa di tutup dulu rapatnya. Tapi besok itu presentasinya kita minta Pak Pompida dulu yang buat apa yang dia maksud dengan 'mafia' itu dengan rincian-rincian tadi dan indikasi-indikasinya, supaya kita lebih paham. Kalau sekarang kan masih lisan, tertulisnya kan belum. Nanti baru dari situ kita menentukan apakah perlu membuat Panja Mafia atau tidak. Jadi nanti supaya jangan hanya inikan jadi fitnah nanti. Kita juga tidak boleh memfitnah orang-orang. Untuk besok juga rapatnya tertutup. Jadi usulan tentang rapat tertutup ini jadi terjawab, Ibu Ketua. Jadi inikan tidak boleh keluar juga, kita-kita saja ini. Jadi untuk itu terbuka saja. Namanya kita niatnya ini untuk menyelesaikan masalah. Mudah-mudahan Ramadhan ini ada solusi yang kita bisa berikan kepada BPJS ini.

Jadi saran saya begitu, Ibu Ketua, kita tutup dulu rapatnya ini. Besok kita minta Pak Pompida dulu buat presentasi seperti apa. Kenapa misalnya Pak Pompida yang harus buat, karena Pak Pompida yang berani ngomong bahwa ini ada mafia disitu. Dan itu ada di *youtube* sebetulnya itu, ada videonya sekitar berapa menit, dan menit ke-14 itu Pak Pompida itu bicara. Saya kan sudah mendengar itu, sudah nonton videonya. Jadi menurut saya, karena Pak Pompida yang berani ngomong berarti Pak Pompida yang bisa menjelaskan kepada kita secara terbuka.

Nanti kalau ada misalnya sanggahan dari Dewas yang lainnya *monggo* saja, tidak apa-apa, terbuka saja menurut saya. Atau sanggahan dari pihak Direksi kan boleh juga. Namanya kita mau membuka semua, jadi tidak ada masalah kan. Yang penting rapat ini jangan sampai keluar, kita tertutup saja.

Demikian, Ibu Pimpinan, saran saya.  
Terima kasih.

*Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumsalam.*

Kesimpulannya adalah dilanjut besok.  
Dewan Jaminan Sosial tadi belum diberi kesempatan ya.  
Ibu bisa? Tidak bisa. Harus ada perintah ya.

#### **INTERUPSI F-PDIP (MUHAMAD NABIL HAROEN, S.Pd., M.Hum.):**

Interupsi Pimpinan.

Jadi sambil menunggu Pak DJSN masuk ruangan lagi, untuk lanjutan rapat besok saya betul-betul minta Pak Pompida untuk menyiapkan presentasi terkait mafia ini dengan serius. Nanti ada *power point* dan sebagainya yang praktis, jadi lebih mudah memahaminya. Tidak perlu tebal-tebal begini kalau kemudian juga bikin kita bingung.

Saya kira begitu.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Tadi saya juga presentasi dari Dewas tadi juga sedikit mendengar 'ada *fee-fee*' tadi, nanti mohon dijelaskan '*fee*' apa. Tadi dijelaskan dalam penjelasannya tadi ada, saya catat. Jadi tolong nanti dijelaskan '*fee*' apa yang dimaksud dengan itu. Tadi kan disampaikan tentang '*fee*', makanya '*fee*' yang seperti apa.

Silakan Bapak diberikan kesempatan. Masih ada waktu 8 menit. Silakan.

**KEPALA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL/DJSN (T.B ACHMAD CHOESNI):**

Terima kasih.

Maaf, tadi saya harus sholat.

Pertanyaan untuk DJSN, Pak Shaleh Daulay.

Sebetulnya kalau dari sudut pengawasan dana kita memang mengikuti peraturan perundangan, termasuk juga Perpres 25/2020, itu kita diberi wewenang untuk berkoordinasi dengan Kemkes untuk BPJS Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kemenaker.

Kita juga terlibat di RKAT. Termasuk juga melihat laporan bulanan dan tahunan. Cuma memang keterlibatan kita baru yang *general*. Termasuk waktu itu kita dengan Dewas kita diskusi tentang *cut lost*.

*Cut lost* sebetulnya kita sudah ngobrol agak lama, Pak Guntur. Cuma waktu itu memang belum ada peraturan yang memastikan kapan bisa. Seperti yang dikatakan "*cut lost* kan bukannya *lost* terus". *Thinking fund*-nya supaya lebih sedikit. Itu saja kita bolak-balik diskusi juga belum. Tapi sesuai dengan Bapak Shaleh Daulay dan juga teman-teman Anggota Komisi IX saya kira kita harus perbaiki kemampuan kita.

Tapi memang kalau untuk yang sangat detail, misalnya investasinya apa saja. Kita melihat yang LQ 45 memang kita pastikan kalau mereka kalau misalnya main. Karena kan saham kan seperti Pak Daulay bilang "*high return/high risk*". Kita cuma lihat pokoknya harus main di LQ 45. Tapi beberapa kan keluar dari LQ 45, itu bisa kita monitor.

Yang pasti saya harus cerita sama Bapak/Ibu yang *cut lost* itu Pak. Kita tahu *cut lost* itu harus kita laksanakan. Tapi peraturannya juga kita masih bolak-balik sama Dewas juga tidak tahu.

Jadi secara umum kita akan perbaiki kemampuan kita sesuai dengan tupoksi kita. Tapi memang secara umum kita memang mengawasi performa BPJS Ketenagakerjaan, termasuk juga mendesain *key performance indicator* yang *related* sama dengan keuangan.

Begitu, Pak Daulay.

Terima kasih.

Detailnya kita tidak tahu Pak.

**INTERUPSI F-PG (Hj. DEWI ASMARA, S.H., M.H.):**

Melalui Pimpinan, tadi kalau tidak saya tidak salah dengar disampaikan kan termasuk antara lain Bapak kan mau buat *key performance*, ukurannya apa. Termasuk Bapak baca laporan keuangan? Diberikan?

Kalau di laporan keuangan harusnya jelas mengenai investasi. Kalau besok mau rapat tertutup, melalui Pimpinan saya minta dihadirkan Direktur Investasi. Karena hari ini tidak ada. Itu catatan.

Itu kan Bapak dikasih laporan keuangan kan, jadi kan harusnya juga bisa tahu, laporan keuangan itu di *investment*-nya kelihatan. Apalagi tadi Bapak juga bicara mengenai *thinking fund*, pasti itu kelihatan Pak. Jadi kalau Bapak bilang “belum tahu” ya tidak apa-apa, tidak usah di jawab. Tapi bagi saya ini tidak tahu atau Bapak banyak *ewuh pakewuh*. Saya tahu kalau bicara *thinking fund*, apa yang dibicarakan oleh Pak Pompida, saya juga tahu. Karena dulu saya juga sama waktu masih Bakinvestama saya *vice director* disitu, jadi saya tahu apa yang Pak Pompida tahu. Tapi besok lah kita bicara mengenai itu. Jadi saya harap semua pihak ini keterbukaan. Kita ini membina, bukan membinasakan. Saya percaya yang namanya mafia itu ada. Tapi itukan oknum, jadi mari kita bereskan sama-sama. Itu juga termasuk tugasnya Direksi.

Jadi antara lain seperti itu, Ibu Yayuk, jadi dalam arti bagaimana itu, kalau melihat laporan keuangan tapi tidak bisa membacanya dengan benar. Kalau memang sekarang keadaannya sudah lampu merah, *thinking fund*-nya sudah semakin menurun, itu sama saja kayak cadangan devisa negara juga makin kecil, itukan hampir sama saja kondisinya.

Mungkin itu saja.

Terima kasih, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Baik.

Bapak/Ibu sekalian,

Sesuai dengan waktu yang kita sepakati bersama tadi, hampir Jam 17.45, saya juga menyampaikan kepada Pak Agus bahwa, karena selama ini saya belum baca, akan ada isu, bukan isu lagi ya, ada uang yang dari para pekerja yang dulunya menjadi pekerja, kemudian ketika keluar ada yang tidak mengurus dan sebagainya, itu dulu kan sempat juga disampaikan. Oleh karena itu saya hanya minta, dari uang yang sekian triliun itu berapa sebenarnya milik murni, milik JHT, miliknya JKK, dan seterusnya yang murni, sehingga kita tahu bahwa ini sebenarnya hak yang dimiliki oleh para tenaga kerja atau peserta.

Kemudian kan itu di *invest*-kan. Dari masing-masing *invest* yang memang betul-betul menjadi haknya para pekerja itu berapa sebenarnya jumlahnya masing-masing hak para pekerja. Kan biasanya di dalam laporan, ini mungkin agak terlalu jauh, laporan keuangan apa itukan mesti ada cadangan. Yang namanya cadangan untuk apa-apa itukan mesti ada. Kenapa saya tanyakan, saya ingin tahu ini loh yang sebenarnya menjadi hak dari para pekerja, ini loh yang sebenarnya milik satu aset daripada BPJS itu sendiri.



Entah itu asalnya darimana, entah asalnya dari bagian dari pendapatan, atau sisa hasil usahanya, atau mungkin juga yang tadi saya sampaikan, itu menurut saya menjadi penting bagi kita untuk metani satu persatu sebenarnya seperti apa BPJS Tenaga Kerja keuangannya.

Termasuk kan yang di investasi. Kalau di investasi kan rata-rata global kan tadi. Semua uang kemudian di investasikan kesini-kesini-kesini, dan hasilnya seperti ini. Ini kenapa kita ingin tahu larinya kemana sebenarnya pendapatan-pendapatan ini. Benar tidak ini memang untuk para pekerja. Kan kita tidak tahu ini benar-benar untuk para pekerja apa tidak kan kita tidak tahu ini. Tahunya kan hasilnya sekian, kan begitu saja.

Saya kira itu mungkin tambahan dari saya. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya.

Silakan Mbak Putih.

**F-GERINDRA (drg. PUTIH SARI):**

Sekalian usul konkret. Untuk besok kita lanjutkan kembali mungkin bisa disepakati mulai Pukul 11.00 mungkin.

**KETUA RAPAT:**

Belum disepakati ini tadi.

**F-GERINDRA (drg. PUTIH SARI):**

Saya usul Pukul 11.00.

Tapi selain itu juga, karena memang kita ingin terkait dengan data-data investasi ini jelas kita minta juga Direktur Investasi untuk juga hadir besok. Sekaligus datanya tentunya.

**KETUA RAPAT:**

Saya usul, Bapak/Ibu sekalian, jangan Jam 11.00. Kalau Jam 11.00 itu *mepet* dengan dzuhur. Mungkin Jam 10.00 kita mulai. Biasanya kan kita lebih enak Jam 10.00.

**DEWAN PENGAWAS BPJS KETENAGAKERJAAN (POEMPIDA HIDAYATULLAH):**

Izin, Pimpinan, setelah dzuhur. Karena saya mungkin agak banyak harus mempersiapkan, jadi mohon izin ada waktu tambahan supaya lebih baik lagi presentasinya.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Setelah dzuhur berarti, Jam 13.00 ya. Bagaimana Jam 13.00? Yang *virtual* bagaimana, Jam 13.00 atau Jam 11.00? Jam 13.00.

Untuk itu kesimpulan hari ini rapat kita skors sesuai dengan harapan dan keinginan dari teman-teman kita kupas habis. Ini untuk kepentingan kita

semua, untuk bangsa Indonesia, khususnya juga para pekerja untuk mengetahui secara benar bagaimana sebenarnya pengelolaan dari BPJS yang sebenarnya. Karena selama ini yang selalu ditonjolkan adalah jumlah uangnya yang sekian triliun yang kita seringkali juga tidak tahu secara persis seperti apa, kalau saham seperti apa, kalau kita ini mau menanam disana/investasi kesana-kesana ini. Kita kan informasinya hanya ini, tahunya disana, hasilnya ini, dan seterusnya.

Oleh karena itu sampai besok kita Pukul 13.00 kita mulai untuk melanjutkan rapat hari ini. Untuk itu sekarang saya skors.

**(RAPAT DISKORS PUKUL 18.48 WIB)**

Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu dari BPJS Ketenagakerjaan, dari Dewan Jaminan Sosial dan dari Dewan Pengawas BPJS Tenaga Kerja. Besok untuk dihadirkan Direktur Investasi.

Jakarta, 28 April 2020  
a.n. KETUA RAPAT  
Sekretaris Rapat,

Yanto Supriyanto, S.H.  
NIP.196305241992031001